Volume 9 No. 1, Juni 2019 ISSN: 2089-6980

JURNAL
KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 9	No. 1	Hal. 1 - 78	Jakarta Juni 2019	ISSN 2089-6980

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **30/E/KPT/2018**

Diterbitkan bersama :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jaringan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 9 Nomor 1, Juni 2019

Penanggung Jawab :
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:
Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana (*Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*)

Anggota:
Prof. Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumber Daya*)
Dr. Armen Zulham (Sistem Usaha Perikanan)
Dr. Asep Agus Handaka (*Sosial Ekonomi Perikanan*)
Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Redaksi Pelaksana :
Sinta Nurwijayanti, S. Pi, M. SE., M.A
Dr. Irwan Muliawan
Hakim Miftahul Huda, M.Si
Nila Mustika Wati, S.S
Edwin Yulia Setyawan, S.T
Rahadi Susetyo Frendly Muhammad, S. Ikom

Desain dan Tata Letak :
Ilham Ferbiansyah, S. Kom

Alamat Redaksi :
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: pt.sosek@gmail.com
Jurnal Online: *http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse*

Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/ PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Analisis Potensi Keberlanjutan Multi Usaha Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Sidoarjo; (ii) Mencapai keberlanjutan Ekosistem Laut Melalui *Marine Spatial Planning* (MSP): Mungkinkah?; (iii) Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul; (iv) Evaluasi Hasil Pelatihan *Good Manufacturing Practices* (GMP) Untuk Perempuan Pesisir: Analisis Kesejahteraan Subjektif; (v) Pengembangan Komoditas Rumput Laut Nusa Tenggara Barat Dengan Model Hexagon Untuk Pembangunan Ekonomi Lokal; (vi) Implikasi Kebijakan Relokasi Kapal Izin Pusat Terhadap Nelayan Lokal di Kepulauan Aru, dan (vii) Analisis Deskriptif Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Tangkap (Studi Kasus: Kota Kendari).

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 9 Nomor 1, Tahun 2019

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

UCAPAN TERIMA KASIH ii

DAFTAR ISI iii

ANALISIS POTENSI KEBERLANJUTAN MULTI USAHA SUB SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Oleh : Titis Istiqomah, M. Pudjihardjo, Sumarno dan Bagyo Yanuwiadi ..... 1 - 10

MENCAPAI KEBERLANJUTAN EKOSISTEM LAUT MELALUI *MARINE SPATIAL PLANNING* (MSP): MUNGKINKAH?

Oleh : Andrian Ramadhan dan Wilmar A. Salim ..... 11 - 21

ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Oleh : Riesti Triyanti dan Indah Susilowati ..... 23 - 35

EVALUASI HASIL PELATIHAN *GOOD MANUFACTURING PRACTICES* (GMP) UNTUK PEREMPUAN PESISIR: ANALISIS KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF

Oleh : Zuzy Anna, Rahmahwati Rosidah, Armida S. Alisjahbana dan Robi Andoyo ..... 37 - 44

PENGEMBANGAN KOMODITAS RUMPUT LAUT NUSA TENGGARA BARAT DENGAN MODEL HEXAGON UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL

Oleh : Alfian Hidayat dan Purnami Safitri ..... 45 - 55

IMPLIKASI KEBIJAKAN RELOKASI KAPAL IZIN PUSAT TERHADAP NELAYAN LOKAL DI KEPULAUAN ARU

Oleh : Christina Yuliaty, Nendah Kurniasari, Rizky Muhartono dan Fatriyandi N. Priyatna ..... 57 - 67

ANALISIS DESKRIPTIF FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN TANGKAP (STUDI KASUS: KOTA KENDARI)

Oleh : Deshinta Vibriyanti ..... 69 - 78

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

Vol. 9 No. 1, Juni 2019

ANALISIS POTENSI KEBERLANJUTAN MULTI USAHA SUB SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Analysis of Potential Sustainability of Multi Fisheries Sub Sector Business in the Sidoarjo Regency

Titis Istiqomah, M. Pudjihardjo, Sumarno dan Bagyo Yanuwiadi

ABSTRAK

Permasalahan sektor perikanan saling terkait antar sub sektor perikanan tangkap, budidaya, serta olahan dan pemasaran hasil perikanan. Penelitian bertujuan menganalisis potensi keberlanjutan usaha multi sub sektor perikanan skala kecil - menengah oleh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian deskriptif dilaksanakan April 2015 s/d April 2018. Survey terestris dengan teknik rekam data tertutup dan terarah menggunakan alat bantu kuesioner. Data diberi bobot dan dianalisa menggunakan analisis *shift share* dan statistik untuk mengetahui keterkaitan antar sub sektor perikanan terhadap potensi keberlanjutannya. Hasil analisis keberlanjutan usaha tangkap (kode 01.T) bernilai terendah 2,3529 gap 6,0 dari nilai tertinggi 8,3529. Nilai regresi usaha penangkapan ikan Y = 0,005 + 0,961 X menunjukkan usaha penangkapan ikan belum mampu memberdayakan sektor lain. Tingkat signifikansi uji T tidak nyata 22,2%. Nilai R *Square* 0,005 dan *Adjusted* R *Square* -0,061 merepresentasikan tingkat kepercayaan usaha penangkapan ikan sangat rendah. Keberlanjutan usaha perikanan budidaya di tambak (simbol 02.Y) bernilai terendah 2,9783. Nilai regresi linier sebesar Y = 0,980 + 3,375 X menunjukkan usaha budidaya memberikan keberdayaan bagi sub sektor lain secara signifikan 97,8%*. Nilai R *Square* 0,225 dan *Adjusted* R *Square* 0,188 merepresentasikan keberlanjutan usaha budidaya kurang menjanjikan. Keberlanjutan olahan dan pemasaran hasil perikanan (kode 03.U) bernilai terendah 7,2600 dengan *shift* share gap positif 0,2600. Nilai regresi linier Y = 6,031 + 3,235 X signifikansi 100% menunjukkan usaha olahan dan pemasaran berpengaruh terhadap usaha lainnya, dengan nilai R *Square* 0,651 dan nilai *Adjusted* R *Square* 0,636. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sub sektor olahan dan pemasaran hasil perikanan berpeluang besar untuk ditumbuh-kembangkan.

Kata Kunci: potensi keberlanjutan; usaha perikanan; olahan dan pemasaran; produk perikanan; sektor perikanan

ABSTRACT

The problems of fisheries sector are interrelated between the capture fisheries, cultivation, processing and marketing of fishery products. The research aims to analyze the potential sustainability of small and medium scale multi sub-sector fisheries businesses by people in Sidoarjo Regency. Descriptive research was conducted from April 2015 to April 2018. Terrestrial survey with closed data recording techniques and questionnaires were used in the study. Data were measured and analyzed using shift share matrix and statistics to find out the relation between fisheries sub-sectors to their potential sustainability. Results of the capture business sustainability analysis (code 01.T) have the lowest value of 2.3529 gap 6.0 from the highest value of 8.3529. The regression value of fishing business Y = 0.005 + 0.961 X indicates that fishing businesses have not been able to empower other sectors. The significance level of the T test is not real 22.2%. The R Square value of 0.005 and Adjusted R Square -0.061 represents the relatively low level of trust in fishing businesses. The sustainability of aquaculture business in the pond (symbol 02.Y) has the lowest value of 2.9783. The linear regression value of Y = 0.980 + 3.375 X indicates that cultivation provides empowerment for other sub-sectors significantly of 97.8%. The value of R Square 0.225 and Adjusted R Square 0.188 representing the sustainability of aquaculture is less promising. Sustainability of processed and marketing of fishery products (code 03.U) has the lowest value of 7.2600 with a positive shift share gap of 0.2600. The linear regression value Y = 6.031 + 3.235 X 100% significance indicates that the processed business and marketing affect other businesses, with the value of R Square 0.651 and the value of Adjusted R Square 0.636. It is concluded that the processed and marketing of fishery products sub-sector have a great opportunity to be developed.*

Keywords: ***sustainability potential; fisheries business; processed and marketing; fisheries product; fisheries sector***

MENCAPAI KEBERLANJUTAN EKOSISTEM LAUT MELALUI *MARINE SPATIAL PLANNING* (MSP): MUNGKINKAH?

Achieving Marine Ecosystem Sustainability Through Marine Spatial Planning (MSP): Is it possible?

Andrian Ramadhan dan Wilmar A. Salim

ABSTRAK

Pesisir dan laut telah sejak kala mengalami tekanan aktivitas manusia sehingga mengancam keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem di dalamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, perhatian terhadap masalah ini menjadi semakin besar dan melahirkan konsep-konsep keberlanjutan pada wilayah pesisir dan laut seperti *Marine Spatial Planning* (MSP). Tulisan berikut mengeksplorasi konsepsi MSP dan hambatan yang dihadapi dalam tinjauan prosedur perencanaan. Metode yang digunakan adalah *systematic review* dalam rangka mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi berbagai literatur atau hasil kajian terkait. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya problematika empiris untuk diimplementasikan dalam tataran praktis. Idealisme MSP yang menggabungkan pendekatan komprehensif dan partisipatif akan menghadapi berbagai rintangan mulai dari ketiadaan data dan informasi, terbatasnya pengetahuan, keterikatan terhadap nilai dan budaya, sampai dengan isu dominasi kekuasaan atas suatu perencanaan yang bersifat kolaboratif. Penulis berargumentasi bahwa perencana perlu memberikan perhatian terhadap kekuasaan dan mampu mengontrol kekuasaan tersebut. Hal ini diperlukan agar kelemahan konsep MSP dapat tertutup dengan keberpihakan kekuasaan terhadap isu-isu keberlanjutan.

Kata Kunci: Marine Spasial Planning (MSP); keberlanjutan; ekosistem laut; problematika; kolaboratif

ABSTRACT

Since a long time ago, the coast and the sea have undergone hard pressure from human activities that threaten the sustainability of the ecosystem functions. As time goes by, the attention to this problem becomes greater and creates sustainability concepts in coastal and marine areas such as MSP. The following article explores MSP conceptions and its theoretical problems by reviewing the planning procedures. The method used in this study is a systematic review in order to identify, evaluate and interpret various literatures or results of related studies. The results indicate a theoretical weakness to be implemented. The idealism of MSP which combines a comprehensive and participatory approach will face various obstacles starting from the absence of data and information, limited knowledge, attachment to value and culture, to the issue of domination of power over a collaborative plan. I argues that planners need to pay attention to power and take control of it. This is necessary so that the weakness of the MSP concept can be covered by the alignment of power towards sustainability issues.

Keywords: ***Marine Spasial Planning (MSP); sustainability; marine ecosystem; problematic; collaborative***

ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Stakeholders Analysis of Sustainable Coastal Zone Management in the Gunungkidul Regency

Riesti Triyanti dan Indah Susilowati

ABSTRAK

Pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan memerlukan peran dan dukungan seluruh *stakeholders.* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kepentingan, dan pengaruh *stakeholders* dalam pengelolaan kawasan pesisir Gunungkidul, serta merumuskan strategi untuk pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan alat bantu kuesioner dan wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April-Juli 2018; sedangkan pengolahan data menggunakan *software Mactor* dan dianalisis

ABSTRACT

Sustainable management of coastal area requires a role and support from all stakeholders. The aims of this study are to analyze the role, interest, and influence of stakeholders in the coastal zone management of Gunungkidul, as well as to formulate sustainable coastal management strategies. The research used quantitative and qualitative methods with questionnaires and in-depth interview. Data were collected from April to July 2018; processed by Mactor software and analysed using stakeholder analysis. The results showed that coastal management of Gunungkidul

menggunakan analisis *stakeholders*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul melibatkan tiga pemangku kepentingan kunci, enam pemangku kepentingan utama, dan tiga pemangku kepentingan pendukung, yang bertindak sebagai koordinator, fasilitator, dan pelaksana. Pemetaan *stakeholders* menunjukkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir sebagai subyek, pemain, aktor, dan penonton. Strategi untuk mengoptimalkan pengaturan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan diperlukan melalui peningkatan kolaborasi dan kerja sama antara subyek dan pemain yang memiliki tingkat kekuasaan dan kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Hal ini dapat terwujud melalui peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam perwujudan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan. Strategi pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat melindungi sumber daya alam dan jasa lingkungan, memperhatikan kualitas lingkungan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: pemangku kepentingan; pengelolaan pesisir berkelanjutan; Gunungkidul

Regency involved three key stakeholders, six primary stakeholders, and three supporting stakeholders as a coordinator, facilitator, and implementer. Mapping stakeholders shows the categories of stakeholders involved in the management of coastal zones as subjects, players, actors, and spectator. Therefore, strategies are necessary to optimize stakeholder arrangements in realizing sustainable coastal area management through increasing collaboration and cooperation between subjects and players who have a level high of power and interest in coastal management policies. The sustainable coastal area management policies can be realized through effective collaboration and cooperation between government and community. The strategies must also involve all related parties to protect natural resources and environment, to concern with environment quality, and it increase the income of coastal communities.

Keywords: stakeholders; management; coastal; berkelanjutan; Gunungkidul

---

EVALUASI HASIL PELATIHAN *GOOD MANUFACTURING PRACTICES* (GMP) UNTUK PEREMPUAN PESISIR: ANALISIS KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF

Training Results Evaluation on Good Manufacturing Practices (GMP) for the Coastal Women: A Subjective Well-being Analysis

Zuzy Anna, Rahmahwati Rosidah, Armida S. Alisjahbana dan Robi Andoyo

ABSTRAK

Sektor perikanan tangkap adalah sektor yang memberikan kontibusi yang cukup besar bagi perikanan Indonesia. Sektor ini diharapkan bisa menjadi peranan strategis bagi pembangunan perikanan Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah peningkatan hasil perikanan tangkap. Indramayu merupakan daerah dengan hasil perikanan tangkap yang memberikan kontribusi sebesar 60% dari perikananan tangkap Jawa Barat, menjadikan Indramayu sebagai daerah dengan tingkat kontribusi produksi perikanan terbesar diantara daerah-daerah lainnya. Produksi dari aktivitas perikanan ini didapatkan rata-rata sebesar 2500 ton dengan nilai rata-rata 30 miliar perbulan. Nilai ini akan lebih meningkat dengan adanya aktivitas pengolahan menjadi suatu produk. Untuk mendapatkan hasil produk perikanan yang bernilai tinggi, diperlukan suatu upaya salah satunya adalah dengan praktik manufaktur yang baik atau *good manufacturing practice (GMP)*. Universitas Padjadjaran melalui program pelatihan *GMP* Eretan

ABSTRACT

Capture fisheries give significant contribution to Indonesian fisheries. This sector is expected to be a strategic role in Indonesia fisheries development. One of the strategies is increasing capture fisheries products. Indramayu is an area with capture fisheries products which contributes 60% of West Java capture fisheries, therefore, Indramayu has the most significant contribution to fisheries production among other regions. Average production of this sector is 2500 tons with average value of 30 billion per month. This value will increase with the fisheries processing product actitivites. Good Manufacturing Practice (GMP) is one of effort to obtain high-value fishery products. Padjadjaran University has conducted GMP Eretan training from 2013 to 2015. There is an evaluation to analyzed the welfare of the community. So far, welfare has been assessed objectively. In this study, subjective welfare was analyzed to provide an overview of individual respondents' perspectives with subjective welfare analysis and logistic regression to

telah melakukan pelatihan *GMP* dari tahun 2013-2015. Sebagai evaluasi, analisis kesejahteraan dilakukan. Sejauh ini kesejahteraan dinilai secara objektif. Pada penelitian ini, kesejahteraan secara subjektif dianalisis untuk memberikan gambaran dari perspektiv individu responden dengan analisis kesejahteraan subjektif dan regresi logistik untuk mengetahui faktor lain yang berpengaruh. Hasilnya kesejahteraan subjektif di pesisir Indramayu bisa meningkat dengan adanya pelatihan *GMP* dimana responden yang mendapatkan pelatihan *GMP* meningkat kesejahteraan subjektifnya dibandingkan dengan sebelum adanya pelatihan.

Kata Kunci: kesejahteraan subjektif; perempuan pesisir; GMP; non-GMP; evaluasi

determine other influential factors. As a result, subjective welfare on the coastal area of Indramayu can be increased with GMP training. It means that respondents with GMP training have increased subjective welfare compared with before training.

Keywords: subjective well-being; coastal women; GMP; non-GMP

PENGEMBANGAN KOMODITAS RUMPUT LAUT NUSA TENGGARA BARAT DENGAN MODEL HEXAGON UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL

Development of Seaweed Commodities in West Nusa Tenggara Using the Hexagon Model for Local Economic Development

Alfian Hidayat dan Purnami Safitri

ABSTRAK

Rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah NTB belum secara maksimal dikelola dengan baik. Potensi yang besar serta didukung dengan kultur masyarakat pesisir seharusnya mampu menjadikan komoditas rumput laut NTB berdaya saing tinggi. Kondisi permasalahan mendasar diatas kemudian menarik untuk diteliti dengan model Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai metode dalam melihat permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan PEL model Hexagon dengan melihat dalam 6 dimensi terkait yakni *target group, locational factors, policy focus and synergy, sustainability, governance serta planning*. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah Provinsi NTB sesungguhnya telah memulai program Pembangunan Ekonomi Lokal, namun belum optimal dalam beberapa program yang telah dilakukan mulai dari pemilihan kelompok target yang disesuaikan dengan kapasitas industrial daerah, penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas ekonomi, keberhadiran kebijakan dan regulasi yang bersiat *pro-environment* dan *pro-poor* untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, hingga pada upaya sinergisitas para *stakeholders* serta upaya monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: pembangunan ekonomi lokal (PEL); model hexagon; rumput laut NTB; daya saing

ABSTRACT

Seaweed, one of the competitive commodities in West Nusa Tenggara (NTB), has not been well governed. High potential value and coastal community culture are supposed to improve the competitiveness of the seaweed. Those conditions are the background of this research using Local Economic Development (LED) approach to describe the problems. LED has six dimensions of analysis; targeting group, location factors, policy focus and synergy, sustainability, governance and planning. This study found that NTB government has actually begun to implement LED dimension. However, there should be more optimal efforts to implement this program including selection of targeting group, development of infrastructure, pro-environment and pro-poor policy and regulation to support sustainable development, collaboration among stakeholders and monitoring and evaluation.

Keywords: local economic development; hexagonal model; seaweed; competitveness

IMPLIKASI KEBIJAKAN RELOKASI KAPAL IZIN PUSAT TERHADAP NELAYAN LOKAL DI KEPULAUAN ARU

Policy Implications of Relocating Centralized Vessels Licensie to Local Fishers in the Aru Islands

Christina Yuliaty, Nendah Kurniasari, Rizky Muhartono dan Fatriyandi N. Priyatna

ABSTRAK

Kebijakan yang diambil Kementerian Kelautan Perikanan berupa relokasi wilayah tangkap kapal berijin pusat (> 30 GT) dari WPP 712 ke wilayah-wilayah yang dianggap masih mempunyai sumberdaya perikanan yang lebih moderat, di antaranya ke WPP 718 memberikan dampak bagi masyarakat di wilayah tujuan relokasi. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan implikasi nelayan pendatang terhadap relasi dan pola usaha nelayan lokal yang berada di Kepulauan Aru. Kajian ini dilakukan di Kota Dobo dan beberapa desa di Kepulauan Aru sebagai salah satu lokasi relokasi kapal berijin pusat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran kondisi secara nasional, meskipun pendalaman dilakukan pada lokasi sampel yang terbatas. Hasil penelitian memperlihatkan jumlah kapal berijin pusat di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 293,2% selama periode 2015-Maret 2018 dan terdapat potensi konflik terkait perebutan ruang tangkapan dan perubahan terhadap potensi relasi produksi ilegal.

Kata Kunci: kebijakan relokasi kapal ijin pusat; nelayan lokal; Kepulauan Aru

ABSTRACT

The policy of Ministry of Marine Affairs and Fisheries to relocate the capture areas of in central licensed vessels (> 30 GT) from Fisheries Management Area (WPP) 712 to other more moderate fishery areas including to WPP 718 gives an impact on communities in the destination areas. This paper aims to describe the implications of migrant fishers on the relations and business patterns of local fishers in the Aru Islands. This study was conducted in Dobo City and several villages in the Aru Islands as one of destination fishing area. This is a descriptive qualitative reserach. This study gives an overview of national condition, even though more comprehensive analysis focused on limited sample location. The results showed a significant increase in the number of central licensed vessels in the WPP 718 Fisheries Management Region of 293.2% during 2015 to March 2018. This study also found potential conflicts related to struggle for fishing areas and changes to the potential of illegal production.

Keywords: relocation of central licensed vessel; local fishers; Aru Islands

---

ANALISIS DESKRIPTIF FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN TANGKAP (STUDI KASUS: KOTA KENDARI)

Descriptive Analysis of Socio Economic Factors Influencing to Fishers' Household Income (Case Study: Kendari City)

Deshinta Vibriyanti

ABSTRAK

Sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun pada kenyataannya belum mampu membuat nelayan keluar dari jeratan kemiskinan. Pendapatan yang bersifat tidak pasti membuat keberlanjutan profesi sebagai nelayan tangkap menjadi terancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data primer di lakukan pada bulan Mei tahun 2015 di desa Purirano dan Bungkutoko dengan mewawancarai 200 responden di tingkat rumah tangga. Data primer diperoleh juga melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga sampel per-bulan di kedua

ABSTRACT

Fisheries resources are potential to improve the living standard and welfare of fishers, however, its production has not able yet to lift fishers out of poverty. The uncertain level of income threaten the sustainability of the fishers livelihood. This study aims to determine factors that influence the income of fishers and fisheries resources management in Kendari City, Southeast Sulawesi. Primary data were collected from 200 household respondents in May 2015 through Focus Group Discussion (FGD) in Purirano and Bungkutoko villages. Secondary data were collected from literature. Data were analysed using SPSS program. The results showed that average household income per month in the two locations was IDR2,307,863. The average income in Purirano Sub-district was IDR3,094,803. It was IDR1,981,209 higher than the income in Bungkutoko Sub-District.The highest average household income was obtained during

lokasi Rp2.307.863. Pendapatan rata-rata di Kelurahan Purirano Rp3.094.803 lebih tinggi dari pendapatan di Kelurahan Bungkutoko sebesar Rp1.981.209. Rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi diperoleh pada musim gelombang tenang (sekitar Rp3 juta), dan terendah pada musim panceklik (sekitar Rp1,6 juta). Faktor pembeda pendapatan nelayan yaitu (1) faktor internal (kepemilikan jenis armada dan alat tangkap dan besarnya biaya produksi), (2) faktor eksternal (musim, harga dan pemasaran, dan degradasi sumber daya laut).

Kata Kunci: faktor sosial ekonomi; pendapatan nelayan; rumah tangga nelayan tangkap; Kota Kendari

the calm wave season (around IDR 3 million), and the lowest income was obtained in the strong wave season (around IDR 1.6 million). The fishers income differentiate factors are (1) internal factors (ownership of fleet type, fishing gear, and production costs), (2) external factors (season, prices and marketing, and degradation of marine resources).

Keywords: socio economic factors; income fishers, capture fisheries; Kendari City

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bebestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Bebestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 9 Nomor 1, Juni 2019 adalah:

1. Dr. Syahyuti *(Sosiologi Pertanian - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)*
2. Dr. Irwan Muliawan (*Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
3. Dr. Siti Hajar Suryawati *(Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
4. Dr. Budi Wardono *(Sistem Usaha Pemasaran - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
5. Dr. Harsuko Riniwati *(Ekonomi Mikro dan Manajemen Sumberdaya Manusia - Universitas Brawijaya)*
6. Dr. Singgih Wibowo *(Keamanan pangan dan ingkungan - Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan)*
7. Dr. Yesi Deswita Sari *(Ekonomi Sumber Daya - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
8. Maharani Yulisty, S.Pi., M.Si. *(Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*
9. Dr. Istiqlaliyah Muflikhati *(Ekonomi Keluarga - Institut Pertanian Bogor)*
10. Ir. Hery Saksono, M.A. (*Sosiologi dan Ekonomi - Universitas Gajah Mada)*

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

Vol. 9 No. 1, Juni 2019

ANALISIS POTENSI KEBERLANJUTAN MULTI USAHA SUB SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Analysis of Potential Sustainability of Multi Fisheries Sub Sector Business in the Sidoarjo Regency

Titis Istiqomah, Bagyo Yanuwiadi, Sumarno dan M. Pudjihardjo

ABSTRAK

Permasalahan sektor perikanan saling terkait antar sub sektor perikanan tangkap, budidaya, serta olahan dan pemasaran hasil perikanan. Penelitian bertujuan menganalisis potensi keberlanjutan usaha multi sub sektor perikanan skala kecil - menengah oleh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian deskriptif dilaksanakan April 2015 s/d April 2018. Survey terestris dengan teknik rekam data tertutup dan terarah menggunakan alat bantu kuesioner. Data diberi bobot dan dianalisa menggunakan analisis *shift share* dan statistik untuk mengetahui keterkaitan antar sub sektor perikanan terhadap potensi keberlanjutannya. Hasil analisis keberlanjutan usaha tangkap (kode 01.T) bernilai terendah 2,3529 gap 6,0 dari nilai tertinggi 8,3529. Nilai regresi usaha penangkapan ikan Y = 0,005 + 0,961 X menunjukkan usaha penangkapan ikan belum mampu memberdayakan sektor lain. Tingkat signifikansi uji T tidak nyata 22,2%. Nilai R *Square* 0,005 dan *Adjusted* R *Square* -0,061 merepresentasikan tingkat kepercayaan usaha penangkapan ikan sangat rendah. Keberlanjutan usaha perikanan budidaya di tambak (simbol 02.Y) bernilai terendah 2,9783. Nilai regresi linier sebesar Y = 0,980 + 3,375 X menunjukkan usaha budidaya memberikan keberdayaan bagi sub sektor lain secara signifikan 97,8%*. Nilai R *Square* 0,225 dan *Adjusted* R *Square* 0,188 merepresentasikan keberlanjutan usaha budidaya kurang menjanjikan. Keberlanjutan olahan dan pemasaran hasil perikanan (kode 03.U) bernilai terendah 7,2600 dengan *shift* share gap positif 0,2600. Nilai regresi linier Y = 6,031 + 3,235 X signifikansi 100% menunjukkan usaha olahan dan pemasaran berpengaruh terhadap usaha lainnya, dengan nilai R *Square* 0,651 dan nilai *Adjusted* R *Square* 0,636. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sub sektor olahan dan pemasaran hasil perikanan berpeluang besar untuk ditumbuh-kembangkan.

Kata Kunci: potensi keberlanjutan; usaha perikanan; olahan dan pemasaran; produk perikanan; sektor perikanan

ABSTRACT

The problems of fisheries sector are interrelated between the capture fisheries, cultivation, processing and marketing of fishery products. The research aims to analyze the potential sustainability of small and medium scale multi sub-sector fisheries businesses by people in Sidoarjo Regency. Descriptive research was conducted from April 2015 to April 2018. Terrestrial survey with closed data recording techniques and questionnaires were used in the study. Data were measured and analyzed using shift share matrix and statistics to find out the relation between fisheries sub-sectors to their potential sustainability. Results of the capture business sustainability analysis (code 01.T) have the lowest value of 2.3529 gap 6.0 from the highest value of 8.3529. The regression value of fishing business Y = 0.005 + 0.961 X indicates that fishing businesses have not been able to empower other sectors. The significance level of the T test is not real 22.2%. The R Square value of 0.005 and Adjusted R Square -0.061 represents the relatively low level of trust in fishing businesses. The sustainability of aquaculture business in the pond (symbol 02.Y) has the lowest value of 2.9783. The linear regression value of Y = 0.980 + 3.375 X indicates that cultivation provides empowerment for other sub-sectors significantly of 97.8%. The value of R Square 0.225 and Adjusted R Square 0.188 representing the sustainability of aquaculture is less promising. Sustainability of processed and marketing of fishery products (code 03.U) has the lowest value of 7.2600 with a positive shift share gap of 0.2600. The linear regression value Y = 6.031 + 3.235 X 100% significance indicates that the processed business and marketing affect other businesses, with the value of R Square 0.651 and the value of Adjusted R Square 0.636. It is concluded that the processed and marketing of fishery products sub-sector have a great opportunity to be developed.*

Keywords: ***sustainability potential; fisheries business; processed and marketing; fisheries product; fisheries sector***

MENCAPAI KEBERLANJUTAN EKOSISTEM LAUT MELALUI *MARINE SPATIAL PLANNING* (MSP): MUNGKINKAH?

Achieving Marine Ecosystem Sustainability Through Marine Spatial Planning (MSP): Is it possible?

Andrian Ramadhan dan Wilmar A. Salim

ABSTRAK

Pesisir dan laut telah sejak kala mengalami tekanan aktivitas manusia sehingga mengancam keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem di dalamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, perhatian terhadap masalah ini menjadi semakin besar dan melahirkan konsep-konsep keberlanjutan pada wilayah pesisir dan laut seperti *Marine Spatial Planning* (MSP). Tulisan berikut mengeksplorasi konsepsi MSP dan hambatan yang dihadapi dalam tinjauan prosedur perencanaan. Metode yang digunakan adalah *systematic review* dalam rangka mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi berbagai literatur atau hasil kajian terkait. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya problematika empiris untuk diimplementasikan dalam tataran praktis. Idealisme MSP yang menggabungkan pendekatan komprehensif dan partisipatif akan menghadapi berbagai rintangan mulai dari ketiadaan data dan informasi, terbatasnya pengetahuan, keterikatan terhadap nilai dan budaya, sampai dengan isu dominasi kekuasaan atas suatu perencanaan yang bersifat kolaboratif. Penulis berargumentasi bahwa perencana perlu memberikan perhatian terhadap kekuasaan dan mampu mengontrol kekuasaan tersebut. Hal ini diperlukan agar kelemahan konsep MSP dapat tertutup dengan keberpihakan kekuasaan terhadap isu-isu keberlanjutan.

Kata Kunci: Marine Spasial Planning (MSP); keberlanjutan; ekosistem laut; problematika; kolaboratif

ABSTRACT

Since a long time ago, the coast and the sea have undergone hard pressure from human activities that threaten the sustainability of the ecosystem functions. As time goes by, the attention to this problem becomes greater and creates sustainability concepts in coastal and marine areas such as MSP. The following article explores MSP conceptions and its theoretical problems by reviewing the planning procedures. The method used in this study is a systematic review in order to identify, evaluate and interpret various literatures or results of related studies. The results indicate a theoretical weakness to be implemented. The idealism of MSP which combines a comprehensive and participatory approach will face various obstacles starting from the absence of data and information, limited knowledge, attachment to value and culture, to the issue of domination of power over a collaborative plan. I argues that planners need to pay attention to power and take control of it. This is necessary so that the weakness of the MSP concept can be covered by the alignment of power towards sustainability issues.

Keywords: ***Marine Spasial Planning (MSP); sustainability; marine ecosystem; problematic; collaborative***

ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Stakeholders Analysis of Sustainable Coastal Zone Management in the Gunungkidul Regency

Riesti Triyanti dan Indah Susilowati

ABSTRAK

Pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan memerlukan peran dan dukungan seluruh *stakeholders.* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kepentingan, dan pengaruh *stakeholders* dalam pengelolaan kawasan pesisir Gunungkidul, serta merumuskan strategi untuk pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan alat bantu kuesioner dan wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April-Juli 2018; sedangkan pengolahan data menggunakan *software Mactor* dan dianalisis

ABSTRACT

Sustainable management of coastal area requires a role and support from all stakeholders. The aims of this study are to analyze the role, interest, and influence of stakeholders in the coastal zone management of Gunungkidul, as well as to formulate sustainable coastal management strategies. The research used quantitative and qualitative methods with questionnaires and in-depth interview. Data were collected from April to July 2018; processed by Mactor software and analysed using stakeholder analysis. The results showed that coastal management of Gunungkidul

menggunakan analisis *stakeholders*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul melibatkan tiga pemangku kepentingan kunci, enam pemangku kepentingan utama, dan tiga pemangku kepentingan pendukung, yang bertindak sebagai koordinator, fasilitator, dan pelaksana. Pemetaan *stakeholders* menunjukkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir sebagai subyek, pemain, aktor, dan penonton. Strategi untuk mengoptimalkan pengaturan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan diperlukan melalui peningkatan kolaborasi dan kerja sama antara subyek dan pemain yang memiliki tingkat kekuasaan dan kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Hal ini dapat terwujud melalui peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam perwujudan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan. Strategi pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat melindungi sumber daya alam dan jasa lingkungan, memperhatikan kualitas lingkungan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: pemangku kepentingan; pengelolaan pesisir berkelanjutan; Gunungkidul

Regency involved three key stakeholders, six primary stakeholders, and three supporting stakeholders as a coordinator, facilitator, and implementer. Mapping stakeholders shows the categories of stakeholders involved in the management of coastal zones as subjects, players, actors, and spectator. Therefore, strategies are necessary to optimize stakeholder arrangements in realizing sustainable coastal area management through increasing collaboration and cooperation between subjects and players who have a level high of power and interest in coastal management policies. The sustainable coastal area management policies can be realized through effective collaboration and cooperation between government and community. The strategies must also involve all related parties to protect natural resources and environment, to concern with environment quality, and it increase the income of coastal communities.

Keywords: stakeholders; management; coastal; berkelanjutan; Gunungkidul

---

EVALUASI HASIL PELATIHAN *GOOD MANUFACTURING PRACTICES* (GMP) UNTUK PEREMPUAN PESISIR: ANALISIS KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF

Training Results Evaluation on Good Manufacturing Practices (GMP) for the Coastal Women: A Subjective Well-being Analysis

Zuzy Anna, Rahmahwati Rosidah, Armida S. Alisjahbana dan Robi Andoyo

ABSTRAK

Sektor perikanan tangkap adalah sektor yang memberikan kontibusi yang cukup besar bagi perikanan Indonesia. Sektor ini diharapkan bisa menjadi peranan strategis bagi pembangunan perikanan Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah peningkatan hasil perikanan tangkap. Indramayu merupakan daerah dengan hasil perikanan tangkap yang memberikan kontribusi sebesar 60% dari perikananan tangkap Jawa Barat, menjadikan Indramayu sebagai daerah dengan tingkat kontribusi produksi perikanan terbesar diantara daerah-daerah lainnya. Produksi dari aktivitas perikanan ini didapatkan rata-rata sebesar 2500 ton dengan nilai rata-rata 30 miliar perbulan. Nilai ini akan lebih meningkat dengan adanya aktivitas pengolahan menjadi suatu produk. Untuk mendapatkan hasil produk perikanan yang bernilai tinggi, diperlukan suatu upaya salah satunya adalah dengan praktik manufaktur yang baik atau *good manufacturing practice (GMP)*. Universitas Padjadjaran melalui program pelatihan *GMP* Eretan

ABSTRACT

Capture fisheries give significant contribution to Indonesian fisheries. This sector is expected to be a strategic role in Indonesia fisheries development. One of the strategies is increasing capture fisheries products. Indramayu is an area with capture fisheries products which contributes 60% of West Java capture fisheries, therefore, Indramayu has the most significant contribution to fisheries production among other regions. Average production of this sector is 2500 tons with average value of 30 billion per month. This value will increase with the fisheries processing product actitivites. Good Manufacturing Practice (GMP) is one of effort to obtain high-value fishery products. Padjadjaran University has conducted GMP Eretan training from 2013 to 2015. There is an evaluation to analyzed the welfare of the community. So far, welfare has been assessed objectively. In this study, subjective welfare was analyzed to provide an overview of individual respondents' perspectives with subjective welfare analysis and logistic regression to

telah melakukan pelatihan *GMP* dari tahun 2013-2015. Sebagai evaluasi, analisis kesejahteraan dilakukan. Sejauh ini kesejahteraan dinilai secara objektif. Pada penelitian ini, kesejahteraan secara subjektif dianalisis untuk memberikan gambaran dari perspektiv individu responden dengan analisis kesejahteraan subjektif dan regresi logistik untuk mengetahui faktor lain yang berpengaruh. Hasilnya kesejahteraan subjektif di pesisir Indramayu bisa meningkat dengan adanya pelatihan *GMP* dimana responden yang mendapatkan pelatihan *GMP* meningkat kesejahteraan subjektifnya dibandingkan dengan sebelum adanya pelatihan.

Kata Kunci: kesejahteraan subjektif; perempuan pesisir; GMP; non-GMP; evaluasi

determine other influential factors. As a result, subjective welfare on the coastal area of Indramayu can be increased with GMP training. It means that respondents with GMP training have increased subjective welfare compared with before training.

Keywords: subjective well-being; coastal women; GMP; non-GMP

PENGEMBANGAN KOMODITAS RUMPUT LAUT NUSA TENGGARA BARAT DENGAN MODEL HEXAGON UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL

Development of Seaweed Commodities in West Nusa Tenggara Using the Hexagon Model for Local Economic Development

Alfian Hidayat dan Purnami Safitri

ABSTRAK

Rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah NTB belum secara maksimal dikelola dengan baik. Potensi yang besar serta didukung dengan kultur masyarakat pesisir seharusnya mampu menjadikan komoditas rumput laut NTB berdaya saing tinggi. Kondisi permasalahan mendasar diatas kemudian menarik untuk diteliti dengan model Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai metode dalam melihat permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan PEL model Hexagon dengan melihat dalam 6 dimensi terkait yakni *target group, locational factors, policy focus and synergy, sustainability, governance serta planning*. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah Provinsi NTB sesungguhnya telah memulai program Pembangunan Ekonomi Lokal, namun belum optimal dalam beberapa program yang telah dilakukan mulai dari pemilihan kelompok target yang disesuaikan dengan kapasitas industrial daerah, penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas ekonomi, keberhadiran kebijakan dan regulasi yang bersiat *pro-environment* dan *pro-poor* untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, hingga pada upaya sinergisitas para *stakeholders* serta upaya monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: pembangunan ekonomi lokal (PEL); model hexagon; rumput laut NTB; daya saing

ABSTRACT

Seaweed, one of the competitive commodities in West Nusa Tenggara (NTB), has not been well governed. High potential value and coastal community culture are supposed to improve the competitiveness of the seaweed. Those conditions are the background of this research using Local Economic Development (LED) approach to describe the problems. LED has six dimensions of analysis; targeting group, location factors, policy focus and synergy, sustainability, governance and planning. This study found that NTB government has actually begun to implement LED dimension. However, there should be more optimal efforts to implement this program including selection of targeting group, development of infrastructure, pro-environment and pro-poor policy and regulation to support sustainable development, collaboration among stakeholders and monitoring and evaluation.

Keywords: local economic development; hexagonal model; seaweed; competitveness

IMPLIKASI KEBIJAKAN RELOKASI KAPAL IZIN PUSAT TERHADAP NELAYAN LOKAL DI KEPULAUAN ARU

Policy Implications of Relocating Centralized Vessels Licensie to Local Fishers in the Aru Islands

Christina Yuliaty, Nendah Kurniasari, Rizky Muhartono dan Fatriyandi N. Priyatna

ABSTRAK

Kebijakan yang diambil Kementerian Kelautan Perikanan berupa relokasi wilayah tangkap kapal berijin pusat (> 30 GT) dari WPP 712 ke wilayah-wilayah yang dianggap masih mempunyai sumberdaya perikanan yang lebih moderat, di antaranya ke WPP 718 memberikan dampak bagi masyarakat di wilayah tujuan relokasi. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan implikasi nelayan pendatang terhadap relasi dan pola usaha nelayan lokal yang berada di Kepulauan Aru. Kajian ini dilakukan di Kota Dobo dan beberapa desa di Kepulauan Aru sebagai salah satu lokasi relokasi kapal berijin pusat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran kondisi secara nasional, meskipun pendalaman dilakukan pada lokasi sampel yang terbatas. Hasil penelitian memperlihatkan jumlah kapal berijin pusat di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 293,2% selama periode 2015-Maret 2018 dan terdapat potensi konflik terkait perebutan ruang tangkapan dan perubahan terhadap potensi relasi produksi ilegal.

Kata Kunci: kebijakan relokasi kapal ijin pusat; nelayan lokal; Kepulauan Aru

ABSTRACT

The policy of Ministry of Marine Affairs and Fisheries to relocate the capture areas of in central licensed vessels (> 30 GT) from Fisheries Management Area (WPP) 712 to other more moderate fishery areas including to WPP 718 gives an impact on communities in the destination areas. This paper aims to describe the implications of migrant fishers on the relations and business patterns of local fishers in the Aru Islands. This study was conducted in Dobo City and several villages in the Aru Islands as one of destination fishing area. This is a descriptive qualitative reserach. This study gives an overview of national condition, even though more comprehensive analysis focused on limited sample location. The results showed a significant increase in the number of central licensed vessels in the WPP 718 Fisheries Management Region of 293.2% during 2015 to March 2018. This study also found potential conflicts related to struggle for fishing areas and changes to the potential of illegal production.

Keywords: relocation of central licensed vessel; local fishers; Aru Islands

---

ANALISIS DESKRIPTIF FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN TANGKAP (STUDI KASUS: KOTA KENDARI)

Descriptive Analysis of Socio Economic Factors Influencing to Fishers' Household Income (Case Study: Kendari City)

Deshinta Vibriyanti

ABSTRAK

Sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun pada kenyataannya belum mampu membuat nelayan keluar dari jeratan kemiskinan. Pendapatan yang bersifat tidak pasti membuat keberlanjutan profesi sebagai nelayan tangkap menjadi terancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data primer di lakukan pada bulan Mei tahun 2015 di desa Purirano dan Bungkutoko dengan mewawancarai 200 responden di tingkat rumah tangga. Data primer diperoleh juga melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga sampel per-bulan di kedua

ABSTRACT

Fisheries resources are potential to improve the living standard and welfare of fishers, however, its production has not able yet to lift fishers out of poverty. The uncertain level of income threaten the sustainability of the fishers livelihood. This study aims to determine factors that influence the income of fishers and fisheries resources management in Kendari City, Southeast Sulawesi. Primary data were collected from 200 household respondents in May 2015 through Focus Group Discussion (FGD) in Purirano and Bungkutoko villages. Secondary data were collected from literature. Data were analysed using SPSS program. The results showed that average household income per month in the two locations was IDR2,307,863. The average income in Purirano Sub-district was IDR3,094,803. It was IDR1,981,209 higher than the income in Bungkutoko Sub-District.The highest average household income was obtained during

lokasi Rp2.307.863. Pendapatan rata-rata di Kelurahan Purirano Rp3.094.803 lebih tinggi dari pendapatan di Kelurahan Bungkutoko sebesar Rp1.981.209. Rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi diperoleh pada musim gelombang tenang (sekitar Rp3 juta), dan terendah pada musim panceklik (sekitar Rp1,6 juta). Faktor pembeda pendapatan nelayan yaitu (1) faktor internal (kepemilikan jenis armada dan alat tangkap dan besarnya biaya produksi), (2) faktor eksternal (musim, harga dan pemasaran, dan degradasi sumber daya laut).

Kata Kunci: faktor sosial ekonomi; pendapatan nelayan; rumah tangga nelayan tangkap; Kota Kendari

the calm wave season (around IDR 3 million), and the lowest income was obtained in the strong wave season (around IDR 1.6 million). The fishers income differentiate factors are (1) internal factors (ownership of fleet type, fishing gear, and production costs), (2) external factors (season, prices and marketing, and degradation of marine resources).

Keywords: socio economic factors; income fishers, capture fisheries; Kendari City

ANALISIS POTENSI KEBERLANJUTAN MULTI USAHA SUB SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Analysis of Potential Sustainability of Multi Fisheries Sub Sector Business in the Sidoarjo Regency

***Titis Istiqomah, M. Pudjihardjo, Sumarno dan Bagyo Yanuwiadi**

Universitas Brawijaya Malang

Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia

Diterima tanggal: 4 Desember 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 Maret 2019

Disetujui terbit: 26 Juni 2019

ABSTRAK

Permasalahan sektor perikanan saling terkait antar sub sektor perikanan tangkap, budidaya, serta olahan dan pemasaran hasil perikanan. Penelitian bertujuan menganalisis potensi keberlanjutan usaha multi sub sektor perikanan skala kecil - menengah oleh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian deskriptif dilaksanakan April 2015 s/d April 2018. Survey terestris dengan teknik rekam data tertutup dan terarah menggunakan alat bantu kuesioner. Data diberi bobot dan dianalisa menggunakan analisis *shift share* dan statistik untuk mengetahui keterkaitan antar sub sektor perikanan terhadap potensi keberlanjutannya. Hasil analisis keberlanjutan usaha tangkap (kode 01.T) bernilai terendah 2,3529 gap 6,0 dari nilai tertinggi 8,3529. Nilai regresi usaha penangkapan ikan Y = 0,005 + 0,961 X menunjukkan usaha penangkapan ikan belum mampu memberdayakan sektor lain. Tingkat signifikansi uji T tidak nyata 22,2%. Nilai R *Square* 0,005 dan *Adjusted* R *Square* -0,061 merepresentasikan tingkat kepercayaan usaha penangkapan ikan sangat rendah. Keberlanjutan usaha perikanan budidaya di tambak (simbol 02.Y) bernilai terendah 2,9783. Nilai regresi linier sebesar Y = 0,980 + 3,375 X menunjukkan usaha budidaya memberikan keberdayaan bagi sub sektor lain secara signifikan 97,8%*. Nilai R *Square* 0,225 dan *Adjusted* R *Square* 0,188 merepresentasikan keberlanjutan usaha budidaya kurang menjanjikan. Keberlanjutan olahan dan pemasaran hasil perikanan (kode 03.U) bernilai terendah 7,2600 dengan *shift* share gap positif 0,2600. Nilai regresi linier Y = 6,031 + 3,235 X signifikansi 100% menunjukkan usaha olahan dan pemasaran berpengaruh terhadap usaha lainnya, dengan nilai R *Square* 0,651 dan nilai *Adjusted* R *Square* 0,636. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sub sektor olahan dan pemasaran hasil perikanan berpeluang besar untuk ditumbuh-kembangkan.

Kata Kunci: potensi keberlanjutan; usaha perikanan; olahan dan pemasaran; produk perikanan; sektor perikanan

ABSTRACT

The problems of fisheries sector are interrelated between the capture fisheries, cultivation, processing and marketing of fishery products. The research aims to analyze the potential sustainability of small and medium scale multi sub-sector fisheries businesses by people in Sidoarjo Regency. Descriptive research was conducted from April 2015 to April 2018. Terrestrial survey with closed data recording techniques and questionnaires were used in the study. Data were measured and analyzed using shift share matrix and statistics to find out the relation between fisheries sub-sectors to their potential sustainability. Results of the capture business sustainability analysis (code 01.T) have the lowest value of 2.3529 gap 6.0 from the highest value of 8.3529. The regression value of fishing business Y = 0.005 + 0.961 X indicates that fishing businesses have not been able to empower other sectors. The significance level of the T test is not real 22.2%. The R Square value of 0.005 and Adjusted R Square -0.061 represents the relatively low level of trust in fishing businesses. The sustainability of aquaculture business in the pond (symbol 02.Y) has the lowest value of 2.9783. The linear regression value of Y = 0.980 + 3.375 X indicates that cultivation provides empowerment for other sub-sectors significantly of 97.8%. The value of R Square 0.225 and Adjusted R Square 0.188 representing the sustainability of aquaculture is less promising. Sustainability of processed and marketing of fishery products (code 03.U) has the lowest value of 7.2600 with a positive shift share gap of 0.2600. The linear regression value Y = 6.031 + 3.235 X 100% significance indicates that the processed business and marketing affect other businesses, with the value of R Square 0.651 and the value of Adjusted R Square 0.636. It is concluded that the processed and marketing of fishery products sub-sector have a great opportunity to be developed.*

Keywords: sustainability potential; fisheries business; processed and marketing; fisheries product; fisheries sector

**Korespodensi Penulis:*

email: pdklpi@gmail.com

Doktor Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang

Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia

PENDAHULUAN

Usaha perikanan di Kabupaten Sidoarjo dapat dibagi menjadi 3 sub sektor perikanan yaitu: (1) sub sektor perikanan tangkap, (2) sub sektor perikanan budi daya, serta (3) sub sektor olahan dan pemasaran hasil perikanan. Sub sektor perikanan tangkap diwujudkan dalam aktivitas nelayan di selat Madura dibayangi potensi konflik antar nelayan yang tinggi antara nelayan Sidoarjo dengan nelayan dari Kabupaten/Kota sekitarnya, akibat perebutan wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*). Penelitian Hikmah (2008) mengenai analisis konflik nelayan di Selat Madura melaporkan bahwa telah terjadi 6 tipologi konflik yaitu: konflik kepemilikan sumber daya, konflik pengelolaan sumber daya, konflik cara produksi/ alat tangkap, konflik lingkungan, konflik usaha dan konflik primordial. Konflik yang terjadi cenderung terbuka dan bernuansa kekerasan karena dipicu oleh kondisi *overfishing* di perairan Selat Madura di sisi Barat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Sidoarjo sebenarnya dapat diarahkan untuk pemanfaatan tanaman mangrove sebagai bahan baku industri skala rumah tangga; untuk menekan potensi konflik. Keragaman mangrove secara empiris sangat kaya dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman industri, namun belum dilakukan oleh Pemerintah setempat maupun stake holder lainnya (Istiqomah, 2018a). Potensi tamanan mangrove yang banyak sudah mulai dicoba untuk diolah dan dipasarkan oleh masyarakat secara mandiri (Bidayani, Soemarno, Harahab & Rudianto). Hal ini sejalan dengan pendapat Mangkay, Harahab, Polii & Soemarno (2013) yang menegaskan bahwa potensi ekosistem hutan mangrove mencerminkan peran mangrove.

Berbagai masalah dihadapi oleh masyarakat pesisir Sidoarjo sangat komplek. Wujud permasalahan terdapat di semua sektor perikanan. Pada sektor penangkapan; permasalahan mendasar yang sudah terjadi bertahun-tahun adalah kelebihan tangkap (*over fishing*) di Selat Madura sisi Barat. Selain itu, efek perubahan iklim (*climate change*) berpengaruh terhadap klimatologi harian dan bulanan di perairan laut Sidoarjo menyebabkan ketersediaan sumber daya ikan tidak dapat diprediksi. Hal ini menyebabkan usaha penangkapan ikan menghadapi kesenjangan kemungkinan yang besar (*gambling*).

Permasalahan perikanan budi daya berupa ancaman terhadap usaha pertambakan ikan dan udang di kawasan pesisir juga dibayangi oleh pencemaran, penyakit, dan benur atau bibit ikan yang tidak berkualitas. Air untuk budi daya adalah air payau yang merupakan pencampuran air laut (pasang surut) dengan air tawar dari sungai jelas membawa cemaran yang tidak bisa dihindari. Meskipun demikian, para petambak udang di Sidoarjo mampu membuktikan bahwa budi daya udang masih memungkinkan dilakukan dan produk hasil panennya bernilai ekspor, karena adanya pengakuan internasional terhadap budi daya menuju ke sistem organik ISO 65 IFOAM.

Pada sektor pengolahan hasil perikanan, produk turunan hasil pengolahan dibayangi oleh regulasi ekspor yang ketat (Pabrik krupuk udang diwajibkan menerapkan ISO 22000, OHSAS dan bahkan spesifik memiliki sertifikat BRC untuk bisa ekspor sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh '*Buyers*' di Uni Eropa, Jepang dan Amerika sebagai pembeli utama krupuk udang Sidoarjo). Shofa dan Navastara, (2015) menyimpulkan adanya 3 (tiga) permasalahan utama dalam pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu: penggunaan teknologi yang sederhana, kemitraan usaha yang kurang, dan *market share* terbatas.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa potensi keberlanjutan usaha multi sub sektor perikanan skala kecil - menengah yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Tempat penelitian di sentra kegiatan perikanan tangkap desa Banjarkemuning (kecamatan Sedati) dan desa Bluru Kidul (kecamatan Sidoarjo Kota), sentra perikanan budi daya di desa Sawohan (kecamatan Buduran) dan desa Tanjungsari (kecamatan Jabon), serta sentra olahan pemasaran hasil perikanan di desa Balongdowo (kecamatan Candi)dan desa Penatarsewu (kecamatan Tanggulangin). Penelitian dilaksanakan selama 3 tahun mulai April 2015 s/d April 2018.

Penelitian bersifat deskriptif data diperoleh melalui survey terestris. Jenis data yang digali selama penelitian adalah data kualitatif berupa pernyataan Responden yang di-kuantitatif-kan dengan pembobotan. Rekam data dilakukan dengan cara jajak pendapat yang digali secara diam-diam melalui percakapan sehari-hari yang terarah sesuai dengan kuesioner penelitian.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.
Figure 1. Map of the Research Location.

Responden dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) dengan kriteria tertentu untuk memastikan tingkat kepercayaan atas jawaban dan pernyataan yang disampaikan jujur dan bermakna. Standar kompetensi masing-masing responden ditentukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan survey dengan bantuan informan. Kriteria kompetensi dasar adalah pengalaman responden dalam bidang usaha per sub sektor perikanan yang ditekuni oleh masing-masing sebanyak 100 orang responden terpilih minimal berpengalaman lebih dari 5 tahun berturut-turut.

Analisa data diawali dengan sortasi data ke dalam matriks *shift share* dan selanjutnya diberikan pembobotan. Teknik pembobotan diawali dengan merumuskan asumsi dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan jawaban terbaik (skore 10) dan deskripsi jawaban terburuk (skore 1). Keterlibatan dan pengalaman Peneliti sebagai bagian dari komunitas masyarakat pesisir di Kabupaten Sidoarjo menentukan uraian asumsi dan kelaikan nilai pembobotan. Nilai bobot masing-masing yang diperoleh dari jawaban masing-masing responden dianalisis secara statistik menggunakan perangkat SPSS seri 2.3, untuk mengetahui makna hubungan hasil analisis masing-masing sub sektor perikanan terhadap potensi keberlanjutannya.

KEBERLANJUTAN MULTI SUB SEKTOR PERIKANAN

Keberlanjutan usaha multi sub sektor perikanan merupakan keniscayaan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, mengingat potensi unggulan wilayah di sektor ini sangat besar. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029 menempatkan kebijakan penetapan fungsi kawasan pesisir sebagai salah satu bagian yang penting. Hal tersebut memberikan ruang usaha yang cukup bagi masyarakat multi sub sektor perikanan untuk mengembangkan usahanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan multi sub sektor perikanan di Kabupaten Sidoarjo berbeda-beda antar sub sektor. Sub sektor perikanan tangkap dan sub sektor perikanan budi daya menghasilkan nilai rendah yang merepresentasikan potensi keberlanjutannya rendah apabila dibandingkan dengan sub sektor olahan dan pemasaran hasil perikanan. Sub sektor olahan dan pemasaran hasil perikanan memberikan peluang sangat besar untuk dikembangkan dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan eksistensi Kabupaten Sidoarjo yang tumbuh pesat sebagai kawasan industri; memungkinkan ketersediaan bahan baku ikan untuk pengolahan dan pemasaran dapat 'didatangkan' dari sentra perikanan lain di Indonesia maupun impor; apabila hasil perikanan tangkap dan hasil produksi perikanan budi daya di Kabupaten Sidoarjo sendiri tidak mencukupi.

Sub Sektor Perikanan Tangkap

Militansi nelayan Sidoarjo dalam bekerja melakukan kegiatan penangkapan ikan sangat tinggi. Operasional kegiatan menangkap ikan dilakukan setiap hari sepanjang tahun, kecuali pada hari raya Keagamaan dan hari Jum'at. Libur tidak menangkap ikan umumnya tidak lebih dari 2 atau 3 hari saja; dan itu pun dilakukan secara bergantian

di kalangan kelompok nelayan. Pergantian libur tersebut ditujukan untuk tetap memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat Sidoarjo sendiri maupun kebutuhan para pengepul ikan untuk industri.

Kebiasaan nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Selat Madura pada umumnya melakukan kegiatan *one day fishing*, yaitu nelayan pergi dan pulang melaut dalam satu hari yang sama. Nelayan di perairan ini biasanya melaut saat sore hari sekitar pukul 15.00 – 17.00 WIB dan pulang pada pagi hari sekitar jam antara 03.00 - 06.00 WIB; atau berangkat pagi hari sekitar pukul 04.00 - 05.00 WIB dan pulang sore hari pukul 15.00 – 17.00 WIB (Soedrijanto. 2012). Lebih lanjut dijelaskan bahwa seluruh armada perahu penangkap ikan milik nelayan Sidoarjo adalah perahu kayu berkapasitas 5 GT kebawah. Terdapat usaha penangkapan ikan berkelompok untuk menangkap kerang-kerangan, ikan, dan udang-udangan. Selain itu, terdapat perahu berkapasitas < 1 GT yang melakukan penangkapan ikan secara mandiri di pantai dan alur sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Perairan sisi Barat Selat Madura merupakan kawasan yang subur bagi kehidupan ikan sepanjang tahun (Muhsonim & Nuraini, 2006). Jenis-jenis ikan merupakan jenis ikan ekonomis penting meskipun nilai jualnya di pasar tidak begitu tinggi akan tetapi ketersediaan nya dilaut seringkali berubah ubah (Rostin, 2016). Hasil usaha penangkapan ikan yang terbesar di Kabupaten Sidoarjo adalah jenis kupang dan kekerangan. Ketersediaan sumber daya kupang dan kekerangan ini selalu tersedia sepanjang tahun, akibat cekaman pencemaran perairan laut di sisi Barat selat Madura yang menjadi muara sungai-sungai. Eksplorasi kekerangan berjalan seimbang dengan tingginya peningkatan sedimentasi di muara-muara sungai. Atmodjo (2011) menyatakan bahwa air sungai Porong membawa angkutan sedimen yang terus menerus terakumulasi di muara.

Keberlanjutan usaha sub sektor perikanan tangkap (kode 01.T) memberikan nilai 2,3529 merupakan nilai terendah dengan gap 6,0 dari nilai tertinggi 8,3529. Nilai regresi usaha penangkapan ikan Y = 0,005 + 0,961 X menunjukkan keterkaitan satu usaha penangkapan ikan belum mampu memberdayakan sektor lain yang terkait dengan tingkat signifikansi uji T pada taraf tidak nyata 22,2%. Nilai R *Square* 0,005 dan *Adjusted* R *Square* -0,061 (negatif) merepresentasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk melakukan / melanjutkan usaha di sektor penangkapan ikan sangat rendah.

Primyastanto, Efani, Soemarno & Muhammad (2013) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pengeluaran rumah tangga nelayan adalah pendapatan melaut, pendapatan non melaut, jumlah anggota keluarga dan tingkat pendidikan.

Sub Sektor Perikanan Budi Daya

Luas wilayah pesisir yang diidentikkan dengan mayoritas berupa areal pertambakan adalah 15,541,50 Hektar pada tahun 2010 atau 33,79% dari total luas wilayah Kabupaten Sidoarjo seluas 45,991,83 Hektar. Sebaran tambak terdapat pada 8 (delapan) Kecamatan masing-masing.

Fakta menunjukkan bahwa seluruh percabangan sungai menjadi anak sungai dan saluran-saluran air untuk pertambakan seluruhnya menanggung cemaran sampah maupun polutan pada aliran airnya. Padahal, air ini hampir merupakan satu-satunya sumber bahan baku air selain air sumur bor untuk kegiatan perikanan budidaya di kawasan pesisir yang menopang sumber kehidupan masyarakat pesisir.

Tabel 1. Sebaran Mangrove dan Tambak.
Table 1. Distribution of Mangrove and Ponds.

No	Kecamatan/ *Sub district*	Mangrove/ *Mangroves*	Tambak/ *Ponds*	Luas Total/ *Total Area*	% Mangrove/ *% Mangroves*	% Tambak/ *% Ponds*
1	Waru	148,44	438,00	2.424,00	6,12	18,07
2	Sedati	381,59	4.100,00	7.313,00	5,22	56,07
3	Buduran	92,48	1.662,00	3.240,00	2,85	51,96
4	Sidoarjo Kota	140,54	3.088,20	5.856,83	2,40	52,72
5	Candi	138,74	1.031,00	3.103,00	4,47	33,23
6	Tanggulangin	18,12	496,00	1.695,00	1,07	29,26
7	Porong	13,81	496,30	1.698,14	0,81	29,22
8	Jabon	302,70	4.230,00	6.688,00	4,53	63,25
	Jumlah/*Total*	**1.236,42**	**15.541,50**			

Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Sidoarjo terletak diantara kali Porong dan Kali Mas yang menjadi muara sungai Brantas. Terdapat banyak anak sungai kali Porong yang mengalir ke laut melalui wilayah perkotaan hingga pesisir Kabupaten Sidoarjo. Aliran anak sungai melintasi kawasan permukiman padat penduduk dan pertumbuhan industri yang terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa potensi pencemaran yang harus 'ditanggung' oleh pesisir Kabupaten Sidoarjo sangat tinggi. Pencemaran disebabkan oleh akumulasi sampah dan buangan rumah tangga lainnya, limbah industri serta yang tidak kalah pentingnya adalah polutan an-organik dan lapisan minyak yang dibawa oleh air limpasan permukaan (*run off*) akibat presipitasi dan perkolasi air hujan.

Keberlanjutan usaha perikanan budidaya di tambak (simbol 02.Y) ditunjukkan oleh skor hasil analisis *shift share* 2,9783 merupakan skor terendah dalam komponen pendukung aktivitas usaha budidaya. Nilai regresi linier sebesar Y = 0,980 + 3,375 X menunjukkan bahwa usaha budidaya masih memberikan dampak keberdayaan bagi 3 sektor lain yang terkait dengan tingkat signifikansi uji T pada taraf nyata 97,8%*. Nilai R *Square* 0,225 *Adjusted* R *Square* 0,188 merepresentasikan bahwa keberlanjutan usaha budidaya dianggap tidak menjanjikan oleh masyarakat para pelaku usahanya.

Fakta empiris menunjukkan bahwa umur budidaya udang yang menjadi acuan keberhasilan perikanan budidaya bagi para petambak; umumnya hanya mampu bertahan selama 60 – 70 hari di tambak. Petambak seringkali terpaksa memanen udang pada umur tersebut agar terhindar dari resiko kematian massal udang di tambak, yang berakibat merugikan para petambak. Guna mendorong keberlanjutan budidaya tambak, maka petambak secara pribadi maupun kelompok telah mencoba berbagai cara seperti: penanaman mangrove, pengerukan dasar tambak dan pengerukan alur sungai, mencoba berbagai probiotik, merekayasa proses budidaya, hingga mencoba membudidayakan berbagai jenis udang dan ikan lainnya dengan harapan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Soedrijanto dan Istiqomah (2016) melaporkan bahwa budidaya udang windu di Sidoarjo pernah mencatat prestasi dunia dengan keberhasilan memperoleh sertifikat budidaya udang windu sistem organik ISP 65 IFOAM yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi ternama Natruland-Jerman tahun 2002 lalu, namun telah dicabut oleh Naturland akibat terjadinya bencana lumpur Lapindo tahun 2006.

Sub Sektor Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Hasil-hasil olahan perikanan yang sudah terkenal di pasaran, diproduksi secara turun temurun dan kemudian dikembangkan menjadi produk-produk olahan baru berbasis hasil perikanan oleh masyarakat pesisir di Kabupaten Sidoarjo antara lain disajikan pada Tabel 2. Penelitian Istiqomah, 2018b melaporkan bahwa produk olahan faktual yang ada di Kabupaten Sidoarjo sekaligus menjadi produk unggulan daerah, banyak digemari oleh masyarakat akan tetapi masih bersifat olahan tradisional sehingga perlu terus dikembangkan. Beberapa jenis produk telah mencapai pasar ekspor dengan regulasi yang sangat ketat ke manca negara.

Tabel 2. Produk Olahan dan Jangkauan Pemasarannya.
Table 2. Processing Products and Markets.

No	Hasil Perikanan/ *Fishery Products*	Nama Produk Olahan/ *Name of Processed Products*	Jangkauan Pemasaran/ *Marketing Range*
1	Ikan bandeng/*Milkfish*	Bandeng asap/*Smoked milkfish*	Lokal, Nasional/*Local, National*
		Bandeng tanpa duri/*Boneless milkfish*	Lokal/*Local*
		Bandeng presto/*Pressed milkfish*	Lokal/*Local*
		Bandeng umpan beku/*Milkfish for tuna bait*	Ekspor/*Export*
2	Udang windu/*Black tiger shrimp*	Udang beku/*Frozen shrimp*	Ekspor/*Export*
		Udang segar/*Fresh shrimp*	Ekspor, Nasional/*Export, National*
		Terasi/*Fish paste*	Lokal, Nasional, Ekspor/*Local, National, Export*
		Petis/*Petis*	Lokal, Nasional, Ekspor/*Local, National, Export*
		Kerupuk/*Crackers*	Lokal, Ekspor/*Local, Export*
3	Udang vannamei/ *Vannamei shrimp*	Udang beku/*Frozen shrimp*	Ekspor/*Export*
		Udang segar/*Fresh shrimp*	Lokal, Nasional/*Local, National*
		Kerupuk/*Crackers*	Lokal, Ekspor/*Local, Export*

Lanjutan Tabel 2/*Continue Table 2*

No	Hasil Perikanan/ *Fishery Products*	Nama Produk Olahan/ *Name of Processed Products*	Jangkauan Pemasaran/ *Marketing Range*
4	Udang jerbung/*Jerbung shrimp*	Terasi/*Fish paste*	Lokal, Ekspor/*Local, Export*
		Petis/*Petis*	Lokal, Ekspor/*Local, Export*
		Ebi/*Dried ebi*	Lokal, Ekspor/*Local, Export*
		Kerupuk/*Crackers*	Lokal, Ekspor/*Local, Export*
5	Ikan cucut/*Shark fish*	Sirip ikan/*Fin fish*	Ekspor/*Export*
		Daging ikan diasap/*Smoked meat fish*	Lokal/*Local*
		Daging ikan dibekukan/*Frozen meat fish*	Ekspor/*Export*
6	Ikan pari/*Stingray*	Daging ikan panggang/*Grilled meat fish*	Lokal/*Local*
7	Ikan belanak/*Mullet fish*	Dikeringkan/*Dried fish*	Lokal, Nasional/*Local, National*
		Ikan segar/*Fresh fish*	Lokal/*Local*
		Dipedakan/*Marinated fish*	Lokal, Nasional/*Local, National*
8	Ikan kakap/*Red snapper fish*	Ikan segar (beku)/*Fresh or frozen fish*	Lokal, Ekspor/*Local, Export*
		Ikan kering/*Dried fish*	Lokal, Nasional/*Local, National*
9	Ikan dorang/*Dorang fish*	Ikan segar (beku)/*Fresh or frozen fish*	Lokal, Ekspor / *Local, Export*
10	Ikan gulamah/*Croaker fish*	Ikan segar/*Fresh fish*	Lokal (pabrik surimi)*
		Kerupuk/*Crackers*	Lokal, Nasional/*Local, National*
11	Ikan bawal/*Pomfret fish*	Ikan segar (beku)/*Fresh or frozen fish*	Bawal putih dan bawal bulan diekspor/ *White pomfret and Moon pomfret for exports*
			Bawal hitam pasaran lokal/*Black pomfret for local market*
		Kerupuk/*Crackers*	Lokal, Nasional/*Local, National*
12	Peperek/*Peperek*	Ikan kering (asin)/*Dried fish (salted)*	Lokal/*Local*
13	Kerang/*Mud clams*	Rebus (kupas)/*Steam (without shell)*	Lokal/*Local*
		Segar/*Fresh*	Lokal/*Local*
		Hidup/*Life clams*	Regional (bibit kerang)/*Regional (for seedlings)*
		Petis/*Petis*	Lokal, Ekspor/*Local, export*
14	Kupang/*Mud shells*	Rebus (kupas)/*Steam (without shell)*	Lokal/*Local*
		Kerupuk/*Crackers*	Lokal, Nasional, Ekspor/*Local, National, Export*
15	Rumput laut/*Seaweed*	Segar/*Seaweed*	Lokal/*Local*
		Kering/*Dried seaweed*	Lokal/*Local*

Keberlanjutan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (kode 03.U) memperoleh nilai 7,2600 dengan *shift share gap* positif 0,2600. Nilai regresi linier Y = 6,031 + 3,235 X dengan signifikansi uji T pada taraf sangat nyata 100% pada dasarnya menunjukkan bahwa usaha pengolahan dan pemasaran berpengaruh terhadap usaha lainnya yang dalam sub sektor terkait. Nilai R *Square* 0,651 dan nilai *Adjusted* R *Square* 0,636 menunjukkan bahwa berbagai macam jenis usaha olahan dan pemasaran hasil perikanan menjanjikan. Fakta empiris yang ditemukan di kalangan pengusaha olahan menyatakan bahwa bahan baku utama: 'ikan dan udang' maupun bahan pembantu selalu tersedia, dan mudah akses untuk memperolehnya meskipun dari luar pulau Jawa sekalipun. Pemasaran hasil perikanan produk olahan Sidoarjo dianggap mudah karena telah memiliki image yang kuat dibenak konsumen bahwa Sidoarjo merupakan sentra penghasil berbagai olahan hasil perikanan yang memiliki cita rasa tinggi.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Multi Sub Sektor Usaha Perikanan di Kabupaten Sidoarjo

Pada Tabel 3 menjelaskan hasil analisis potensi keberlanjutan multi sub sektor usaha perikanan berdasarkan kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha sub sektor perikanan tangkap, sub sektor perikanan budidaya dan sub sektor olahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Sidoarjo yang dirinci secara spesifik menyangkut kendala pada sumber daya alam, sumber daya manusia, beserta kebijakan-kebijakan di setiap kendala, berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3. Kendala Masing-Masing Sub Sektor Perikanan.
Table 3. Constraints of Each Fisheries Sub-Sector.

Permasalahan/ ***Problems***	**Sub Sektor Perikanan Tangkap/** ***Capture Fisheries Sub-Sector***	**Sub Sektor Perikanan Budi Daya/** ***Aquaculture Fisheries Sub-Sector***	**Sub Sektor Olahan dan Pemasaran/*Processing and Marketing Sub-Sector***
Sumber Daya Alam/*Natural resource*	1. Ancaman *overfishing / Threat of overfishing* 2. *Fishing base* seluruhnya berada di aliran sungai (tidak langsung menghadap kelaut lepas), berpengaruh terhadap kecepatan dan efisiensi kinerja penangkapan ikan; / *The fishing base is enttirely in the river flow (not directly facing the open sea), affecting the speed and efficiency of fishing performance*	1. Pencemaran / *Pollution* 2. Perubahan kualitas tanah dan air yang semakin menurun / *Changes in the quality of land and water that are decreasing* 3. Belum termanfaatkannya sumberdaya mangrove sebagai sumber industri pangan alternatif yang baru dengan baik / *The use of mangrove resources is not yet utilized as a new alternative food industry source*	Sumber bahan baku lokal bagi prosesor olahan produk perikanan hingga aspek pemasarannya belum tercukupi dari hasil penangkapan dan perikanan budidaya di Kabupaten Sidoarjo sendiri / *Sources of local raw materials for processors of processed fishery products until the marketing aspects have not been fulfilled from the results of fishing and aquaculture in Sidoarjo Regency itself*
Sumber Daya Manusia / *human resources*	Banyak nelayan adalah pendatang dari luar Sidoarjo, termasuk kehadiran nelayan andon / *Many fishermen are migrants from outside Sidoarjo, including the presence of Andon fishremen* Profesi melaut sebagai nelayan kurang diminati dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lain yang tersedia di: / *The fishing profession as a fisherman is less desirable compared to other jobs available at:* 1. Sektor industri / *Industrial sector* 2. Sektor perdagangan / *Trade sector* 3. Sektor konstruksi / *Construction sector* 4. Sektor transportasi, dan sebagainya / *Transportation sector, and so on* Luas area laut untuk penangkapan ikan yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo terbatas. Walaupun sifat pemanfaatan laut sebagai area terbuka bagi siapa saja (*Open acces*); akan tetapi secara empiris para nelayan dari masing-masing fishing base 'merasa memiliki area tertentu di laut' sebagai haknya; / *The area of sea for fishing in the Sidoarjo Regency is limited. Although the nature of the use of the sea as an area is open to anyone (open access); however, empirically the fishermen from each fishing base 'feel the have a certain area in the sea' as their right;*	1. Tenaga kerja di tambak sangat terbatas, ongkos tenaga kerja mahal, serta kurang didukung oleh pengetahuan dan keahlian berbudidaya yang benar; / *Labor in ponds is very limited, labor costs are expensive, and are not supported by the right knowledge and expertise in cultivation;* 2. Sifat fisik tanah aluvial kelabu sangat labil, mudah terjadi kebocoran dan pergeseran tanah sehingga biaya perawatan konstruksi penunjang kegiatan budidaya di tambak sangat tinggi dan terus menerus; / *The physical properties of gray alluvial soil are very unstable, easy to leak and shift land so that the costs of maintaining construction support fot aquaculture;* 3. Kesuburan tanah dan perairan terganggu; / *Soil and water fertility is disturbed;* 4. Tergantung pada pasang surut air laut; / *Depends on the tides;* 5. Tanaman mangrove sebagai hiperakumulator alami semakin berkurang; / *Mangrove plants as hyperaccumulators naturally diminish* 6. Dibayangi oleh ancaman alih fungsi lahan. Dalih bahwa 'kawasan hijau' dapat beralih-fungsi sebagai kawasan permukiman dan pergudangan pada akhirnya banyak disalah gunakan pemanfaatan ruang tersebut oleh masyarakat sendiri untuk industri kecil hingga menengah sehingga tumbuh pencemaran dalam skala yang 'mungkin dianggap' sangat kecil namun 'banyak dan merata', pada akhirnya mencemari saluran air dan merusak ekosistem; / *Shadowed by the threat of land conversion. The pretext that 'green areas' can function as settlements and warehouses in the end is a lot of misuse of the use of space by the people themselves for small to medium industries so that pollution on a scale that 'might be considered' is very small but 'much and evenly distributed' ultimately polluting the waterways and damaging the ecosystem;* 7. "ditinggalkannya komoditi udang windu oleh sebagian besar petambak dan beralih membudidayakan udang vannamei berakibat fatal terhadap: a) tingkat potensi cemaran dan kerusakan lahan tidak terekam secara medis dengan baik sehingga nyaris tidak ada penanganan apapun, b) menghilang dan/atau berkurangnya populasi udang werus dan udang putih yang menjadi 'bagian dan mata pencaharian buruh tambak' akibat dominansi udang vannamei, serta c) menurunnya populasi ikan 'resek an' sebagai hasil samping akibat terputusnya rantai perkembangan biologi oleh dominansi udang vannamei (yang rakus dan kanibalisme tinggi) memakan telur dan bibit alami ikan-ikan di dalam petakan tambak*". / The abandonment of black tiger shrimp commodities by most farmers and switching to cultivating vannamei shrimp has a fatal effect on: a) the level of potential contamination and damage to the land is not medically recorded so that there is almost no handling, b) disappearing and / or reduced population of shrimp and shrimp white which is 'part and livelihood of pond workers' due to the dominance of vannamei shrimp and c) declining population of 'recess' fish as a by-product due a breakdown in the chain of biological development by the dominance of vannamei shrimp (greedy and high cannibalism) eating natural eggs and seeds fish in a pond.*	Belum ada pola pendampingan oleh praktisi atau pendamping profesional secara tuntas, sehingga mayoritas masyarakat pesisir hanya mampu mengolah hasil perikanan akan tetapi belum menguasai: / *There is has not been a complete pattern of assistance by practitioners of professional assistants, so that the majority of coastal communities are only able to process fisheries products but have not yet mastered them:* 1. Aspek manajemen lingkungan yang berkaitan dengan kebersihan dan sanitasi produk; / *Environmental management aspects related to product hygiene and sanitation;* 2. Aspek sistem manajemen mutu dan keamanan pangan; / *Aspects of quality management and food safety systems;* 3. Aspek manajemen bisnis yang lebih profesional bagi keberlanjutan usahanya; / *A more professional aspects of business* 4. Aspek manajemen pemasaran dan promosi; / *Marketing and promotion management aspects*

Lanjutan Tabel 3/*Continue Table 3*

Permasalahan/ *Problems*	Sub Sektor Perikanan Tangkap/ *Capture Fisheries Sub-Sector*	Sub Sektor Perikanan Budi Daya/ *Aquaculture Fisheries Sub-Sector*	Sub Sektor Olahan dan Pemasaran/*Processing and Marketing Sub-Sector*
Kebijakan / *Policy*	Dibutuhkan payung hukum yang lebih konkret untuk mewujudkan daya saing nelayan Kabupaten Sidoarjo berupa landasan kebijakan untuk: / *A more concrete legal umbrella is needed to realize the competitiveness of fishermen in Sidoarjo Regency in the form of a policy foundation for:* 1. Mengembangkan area penangkapan ikan ke perairan yang lebih jauh (lebih dari one day trip) bagi sebagian nelayan Sidoarjo; / *Develop fishing areas to further waters (more than one day trip) for some Sidoarjo fishermen;* 2. Meningkatkan kapasitas dan daya tangkap armada penangkapan ikan; / *Increasing the capacity and capture capacity of fishing fleets*; 3. Membekali nelayan dengan basic safety training; / *Equip fishermen with basic safety training;* 4. Membekali nelayan dengan peralatan bantu untuk penangkapan ikan seperti fish finder, GPS dan sebagainya; / *Equip fishermen with assistive equaipment for fishing such as fish finders, GPS and so on;*	Perlu keterpaduan konkret dari eksekutif yang didukung oleh legislatif dan yudikatif dalam rangka merumuskan serta menerap-kembangkan: / *It needs concrete integration from the executive supported by the legislature and the judiciary in order to formulate and develop:* 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang lebih konkret pro lingkungan, dengan didukung Peraturan Daerah yang relevan agar kawasan 'hijau' tetap dapat dipertahankan dan tidak beralih fungsi; / *The Sidoarjo Regency Government's is policy is more concrete, pro-environment, with the support of relevant Regional Regulations so that the 'green' area can still be maintained and not switch functions;* 2. Membuat Peraturan Daerah tentang sistem monitoring dan evaluasi terhadap ijin-ijin usaha yang lebih bermanfaat, tepat sasaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan; / *Making Regional Regulations concerning the monitoring evaluation system of business licenses that are more useful, right on target that is in accordance with conditions in the field;* 3. Memperketat sistem manajemen supervisi penerapan ijin tentang lingkungan mulai dari skala UKL-UPL hingga Amdal; agar dipatuhi dengan sungguh-sungguh oleh para pengusaha/investor; / *Tightening the management system to supersive the application of permits on the environment starting from the UKL-UPL scale to Amdal; to be obeyed seriously by entepreneurs / investors;* 4. Memperketat pengawasan terhadap penerapan ijin usaha yang sudah beroperasi. Hal ini didasari maraknya pemanfaatan kawasan permukiman dan pergudangan yang justru digunakan sebagai tempat industri skala kecil hingga menengah yang menghasilkan limbah dan pencemaran lingkungan. Pengawasan terhadap aspek teknis usaha di kawasan permukiman dan pergudangan merupakan hal yang belum terlaksanakan; / *Tightening supervision on the implementation of business licenses that are already operating. This is based on the widespread use of residential and warehousing areas which are actually used as a place for small to medium scale industries that produce waste and environmental pollution. Supervision of technical aspects of business in residential and warehousing areas is something that has not been impemented;*	Dibutuhkan aturan teknis berbasis payung hukum yang ada untuk melaksanakan lebih konkret program: / *Legal umbrella-based technical rules are needed to implement more concrete programs:* 1. Pendampingan dari profesional dan/atau praktisi usaha yang dilakukan secara tuntas, intensif dan konsisten, hingga tercapai indikator keberhasilan usaha olahan dan pemasaran hasil perikanan; / *Assistance from professional and / or business practitioners that is carried out thoroughly, intensively and consistently, until indicators of success of processed business and marketing of fishery products are achieved;* 2. Mempermudah perijinan dan/atau program bantuan untuk kelengkapan sertifikasi mutu pangan (ISO, GMP, HACCP) hingga pemenuhan syarat dokumen mutu yang lebih spesifik seperti: traceability, ISO 8402, DS101 dan BRC agar produk terstandarisasi; sebagai tindak lanjut kebijakan sebelumnya berupa kemudahan memperoleh SIUPI; / *Facilitate licensing and / or assistance programs for completing food quality certification (ISO, GMP, HACCP) to fulfill more specific quality document requirements such as traceability, ISO 8402, DS101 and BRC for standardized products; as a follow up to the previous policy in the form of the ease of obtaining SIUPI;* 3. Menggandeng atau bekerja sama dengan para pelaku industri besar untuk turut mengembangkan akses pasar produk hasil UMKM olahan hasil perikanan khas Sidoarjo. / *Cooperating with or cooperating with large industry players to participate in developing market access for products produced by MSMEs processed by fisheries typical of Sidoarjo.*

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa potensi keberlanjutan usaha skala kecil-menengah pada sub sektor olahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sub sektor perikanan tangkap dan sub sektor perikanan budidaya.

Nilai analisis shift share keberlanjutan usaha sub sektor perikanan tangkap 2,3529 dengan regresi usaha penangkapan ikan Y = 0,005 + 0,961 X lebih rendah dibandingkan nilai analisis *shift share* sub sektor perikanan budi daya sebesar 2,9783 dengan regresi Y = 0,980 + 3,375 X; serta nilai analisis *shift share* sub sektor olahan dan pemasaran hasil

perikanan sebesar 7,2600 dengan regresi Y = 6,031 + 3,235 X.

Kebijakan implementasi yang perlu dlakukan adalah:

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu merancang stimulus pengembangan produk, standarisasi mutu, serta pengembangan jaringan pemasaran bagi usaha pengolahan hasil perikanan khas Sidoarjo agar semakin kuat bersaing dalam lingkup pasar yang lebih luas. Implementasi beberapa rekomendasi kebijakan dapat diwujudkan dalam bentuk:

a. Rancangan stimulus pengembangan produk; berupa pelatihan membuat produk baru disertai pembiayaan, uji organoleptik dan promosi selama 6 bulan hingga produk dikenal dan disukai masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan;
b. Standarisasi mutu; berupa bantuan insentif untuk sertifikasi produk, insentif melengkapi perijinan produk hingga produk dapat diterima sebagai produk komersial dengan perangkat hukum yang legal;
c. Pengembangan jaringan pemasaran; berupa fasilitasi dana dan program untuk pameran dan akses ke pemasaran berbasis internet selama beberapa bulan hingga produk telah benar-benar dikenal oleh khalayak luas sebagai produk baru;

Hal ini juga perlu diimbangi oleh sikap pro aktif eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam implementasi Undang-Undang hingga peraturan teknis di masyarakat dan sektor usaha lainnya agar sumber daya alam tetap terjaga kelestariannya. Implementasi peraturan teknis yang perlu dibuat sebagai payung hukum usaha olahan dan pemasaran hasil perikanan antara lain: Peraturan Daerah penetapan kawasan konservasi yang terintegrasi sebagai kawasan usaha berkelanjutan antara sub sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan hasil perikanan; melalui kajian ilmiah dari SKPD terkait.

UMKM olahan dan pemasaran hasil perikanan juga masih membutuhkan dukungan bahan baku dari sub sektor penangkapan ikan dan sub sektor perikanan budidaya; oleh karena itu kedua sub sektor pendukung tersebut perlu fasilitasi Pemerintah untuk perbaikan manajemen sumber daya pada masing-masing sub sektor; agar aktivitas usaha dapat tetap bertahan dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Iwan Hamzah, SE.; tokoh masyarakat petambak Sidoarjo dan Agus Triono, S.Pi., penyuluh perikanan Kabupaten Sidoarjo; atas peran membantu Peneliti bertemu dengan tokoh-tokoh kunci masyarakat pesisir Kabupaten Sidoarjo di berbagai sub sektor perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmodjo, W. (2011). Studi Penyebaran Sedimen Tersuspensi di Muara Sungai Porong Kabupaten Pasuruan. *Buletin Oseanografi Marina*. Edisi Oktober 2011.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Badan Pusat Statistik Kota Sidoarjo.

Bidayani, E., Soemarno, Harahab, N. & Rudianto. (2016). Implementation of Blue Economy Concept as The Efforts of Mangrove Resource Conservation in Sidoarjo Coastal Area, East Java, Indonesia. *International Journal of Ecosystem*, 6(2): 25-34. DOI: 10.5923/j.ije.20160602.01.

Hikmah, Z. (2008). *Analisis Konflik Nelayan Dalam Pengelolaan Sumber daya Perikanan Selat Madura Dalam Perspektif Sosiologis Hukum (Studi Kasus Nelayan Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur)*. Program Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan Kelautan. IPB. Bogor.

Istiqomah, T. (2016). *Ishikawa Effect Rancang Bangun Biodiversitas Pesisir. Seminar Nasional Biodiversitas* VI, Surabaya 3 September 2016. F-MIPA Universitas Airlangga. Surabaya.

Istiqomah, T. (2018a). Karakterisasi Ekonomi Pesisir Kabupaten Sidoarjo Berbasis Pengkayaan Keragaman Mangrove. Agrikan. Jurnal Universitas Muhammadiyah Ternate. *IOSR Journal Of Environmental Science*, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT). E-ISSN: 2319-2402.

Istiqomah, T. (2018b). Analisis Gender Peran Wanita Sebagai Stimulator Ekonomi Keluarga Nelayan di Pesisir Kabupaten Sidoarjo. Fish Scientiae. *Jurnal Ilmu-ilmu Perikanan dan Kelautan*, Vol. 8 No. 1 Juni 2018. ISSN: 1693-3710.

Mangkay, S. D., Harahab, N., Polii, B. & Soemarno. (2013). Economic Valuation of Mangrove Forest Ecosystem in Tatapaan, South Minahasa Indonesia. *IOSR Journal Of Environmental Science*, Toxicology And Food Technology (IOSR-JESTFT) e-ISSN: 2319-2402,p- ISSN: 2319-2399. Volume 5, Issue 6 (Sep. - Oct. 2013), PP 51-57.

Muhsonim, F.F., & Nuraini, C. (2006). Kajian Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Perairan Selat Madura Dengan Menggunakan Metode Holistik Serta Analisis Ekonominya. *Jurnal Protein,* Vol. 13 No. 1. Tahun 2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029.

Primyastanto, M., Efani A., Soemarno & Muhammad, S. (2013). Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan dan Pengeluaran Nelayan Payang Jurung di Selat Madura. *Wacana,* Vol. 16, No. 1 (2013). ISSN: 1411-0199 E-ISSN: 2338-1884.

Rostin. (2016). The Effect of Economic Empowerment of the Coastal Communities and Social Capital on Coastal Community Welfare. T*he International Journal Of Engineering And Science (IJES)*. Volume 5 Issue 2 Pages PP 12-16. ISSN (e): 2319 – 1813 ISSN (p): 2319 – 1805.

Soedrijanto, A., & Istiqomah, T. (2016). Organic Black Tiger Shrimp Farming System (ISO 65 IFOAM): Strategy Through Open Spirit Reap Back to Nature. *Journal of Aquaculture & Marine Biology*, DOI: 10.15406/jamb.2016.04.00069

Shofa, S.U. & Navastara, A.M. (2015). Faktor Penentu Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Di Kabupaten Sidoarjo melalui Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Teknik,* ITS Vol. 4, No. 2, (2015) ISSN:2337-3539 (2301-9271 Print). Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS Surabaya.

Soedrijanto, A. (2012). *Analisis Kawasan Konservasi Pesisir di Kabupaten Sidoarjo*. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo.

MENCAPAI KEBERLANJUTAN EKOSISTEM LAUT MELALUI *MARINE SPATIAL PLANNING* (MSP): MUNGKINKAH?

Achieving Marine Ecosystem Sustainability Through Marine Spatial Planning (MSP): Is it possible?

***Andrian Ramadhan[1] dan Wilmar A. Salim[2]**

[1]Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

[2]Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha No.10, Lb. Siliwangi, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, Indonesia

Diterima tanggal: 3 Januari 2019 Diterima setelah perbaikan: 18 Maret 2019
Disetujui terbit: 26 Juni 2019

ABSTRAK

Pesisir dan laut telah sejak kala mengalami tekanan aktivitas manusia sehingga mengancam keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem di dalamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, perhatian terhadap masalah ini menjadi semakin besar dan melahirkan konsep-konsep keberlanjutan pada wilayah pesisir dan laut seperti *Marine Spatial Planning* (MSP). Tulisan berikut mengeksplorasi konsepsi MSP dan hambatan yang dihadapi dalam tinjauan prosedur perencanaan. Metode yang digunakan adalah *systematic review* dalam rangka mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi berbagai literatur atau hasil kajian terkait. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya problematika empiris untuk diimplementasikan dalam tataran praktis. Idealisme MSP yang menggabungkan pendekatan komprehensif dan partisipatif akan menghadapi berbagai rintangan mulai dari ketiadaan data dan informasi, terbatasnya pengetahuan, keterikatan terhadap nilai dan budaya, sampai dengan isu dominasi kekuasaan atas suatu perencanaan yang bersifat kolaboratif. Penulis berargumentasi bahwa perencana perlu memberikan perhatian terhadap kekuasaan dan mampu mengontrol kekuasaan tersebut. Hal ini diperlukan agar kelemahan konsep MSP dapat tertutup dengan keberpihakan kekuasaan terhadap isu-isu keberlanjutan.

Kata Kunci: ***Marine Spasial Planning* (MSP); keberlanjutan; ekosistem laut; problematika; kolaboratif**

ABSTRACT

Since a long time ago, the coast and the sea have undergone hard pressure from human activities that threaten the sustainability of the ecosystem functions. As time goes by, the attention to this problem becomes greater and creates sustainability concepts in coastal and marine areas such as MSP. The following article explores MSP conceptions and its theoretical problems by reviewing the planning procedures. The method used in this study is a systematic review in order to identify, evaluate and interpret various literatures or results of related studies. The results indicate a theoretical weakness to be implemented. The idealism of MSP which combines a comprehensive and participatory approach will face various obstacles starting from the absence of data and information, limited knowledge, attachment to value and culture, to the issue of domination of power over a collaborative plan. I argues that planners need to pay attention to power and take control of it. This is necessary so that the weakness of the MSP concept can be covered by the alignment of power towards sustainability issues.

Keywords: Marine Spasial Planning (MSP); sustainability; marine ecosystem; problematic; collaborative

PENDAHULUAN

Laut dan pesisir memainkan peran penting bagi kesejahteraan manusia berkat jasa-jasa ekosistem yang didapatkan secara langsung maupun tidak langsung. Jasa secara langsung merupakan aktivitas eksploitasi manusia terhadap sumber daya yang memberikan keuntungan ekonomi, termasuk sebagai sumber makanan, energi dan kenyamanan. Tipe manfaat secara langsung umumnya dapat dengan mudah dimonetisasi. Pada sisi lain, manfaat tidak langsung

**Korespodensi Penulis:*
email: iansosek30@yahoo.com
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia

diperoleh manusia dari keberadaan ekosistem sebagai penyedia siklus nutrien, rantai makanan, dan berbagai fungsi ekologis lainnya (Nunes, van den Bergh & Nijkamp, 2000)

Pemanfaatan jasa ekosistem laut dan pesisir oleh beragam pihak untuk kepentingan yang berbeda-beda mengakibatkan situasi yang rawan konflik. Misalnya hasil penelitian Mujio, Adrianto, Soewardi & Wardiatno (2016) yang menemukan konflik kepentingan antara industri migas dengan aktivitas perikanan dan pariwisata bahari di pesisir Kota Bontang. Mahmud, Satria & Kinseng (2015) mengungkapkan adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang laut menjadi dasar perjuangan kelompok-kelompok dalam melakukan perubahan zonasi. Menurut Thomas (1979) eksploitasi sumber daya alam merupakan bentuk kontrol manusia atas dunia melalui kekuasaan yang dimilikinya. Pada konteks sumber daya laut dan pesisir sayangnya kontrol manusia atas sumber daya alam juga dibatasi oleh sifat sumber daya alam yang bersifat barang publik. Oleh karenanya upaya kontrol yang dilakukan seseorang dapat menimbulkan konflik dengan orang lainnya. Sebagai contoh, aktivitas perikanan dan wisata bahari yang menimbulkan konflik aksesibilitas. Nelayan kesulitan mengakses perairan di sekitar pulau-pulau wisata karena telah diklaim sepihak untuk aktivitas wisata. Konflik juga muncul antara kegiatan konservasi ekosistem dengan konversi lahan pesisir sebagai bentuk naiknya permintaan lahan akibat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Akibatnya, ekosistem menjadi terdegradasi sehingga mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya manfaat yang diterima oleh manusia (Douvere, 2008). Fenomena ini melahirkan tuntutan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada lingkungan laut melalui suatu perencanaan secara spasial.

Laut pada sisi lain merupakan salah satu objek perencanaan spasial yang belum banyak dieksplorasi secara keilmuan. Perhatian terhadap perencanaan spasial ruang pesisir dan laut baru muncul kurang dari dua dekade yang ditandai dengan pertemuan para ahli di bawah UNESCO pada tahun 2006 (Ehler & Douvere, 2009). UNESCO pada pertemuan pertamanya tersebut mengungkapkan bahwa pendekatan perencanaan spasial laut atau umum disebut *Marine Spatial Planning (MSP)* secara konsepsi masih miskin. Untuk itu diperlukan upaya yang besar untuk mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan karakteristik yang melekat padanya.

Esensi dari perencanaan adalah rasionalitas yang dengannya manusia mencoba untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan (Thomas, 1979). Pendapat ini diamini oleh banyak pihak sehingga pendekatan rasionalitas dianut di dalam berbagai arena perencanaan. Salah satunya adalah perencanaan yang berbasis pada lingkungan khususnya pendekatan rasional komprehensif karena bermuara pada penataan ruang dan regulasi (Daniel, 2014). Begitu pula halnya di dalam MSP yang bertujuan untuk menata dan mengatur ruang laut agar tercipta kompatibilitas antar berbagai jenis pemanfaatan.

MSP pada saat yang sama juga mengedepankan proses perencanaan komunikatif untuk meningkatkan efektivitas perencanaan. Proses ini diwujudkan dengan mencantumkan kebutuhan partisipasi dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam hampir semua tahapan perencanaan. Partisipasi pada satu sisi merupakan aspek penting dalam perencanaan untuk memediasi konflik kepentingan pada berbagai skala (Healy, 2003), namun pada sisi lain menggabungkannya di dalam kerangka perencanaan rasional komprehensif secara teoritis menimbulkan permasalahan. Bagaimana rasional komprehensif yang mengandalkan sains dengan parameter-parameter yang terukur bertemu dalam satu ruang yang komunikatif di mana dalam prosesnya kental dengan negosiasi?

Tulisan berikut bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep MSP yang mencoba mempertemukan dua konsep perencanaan di dalam satu arena. Metode yang digunakan adalah *systematic review* yang merupakan metode untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasi berbagai literatur atau hasil kajian yang memiliki relevansi dengan tema tertentu (Kitchenham, 2004). Menurut Liberati *et al.* (2009) metode ini digunakan sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari hasil penelitian sebelumnya yang digunakan untuk meminimalkan bias serta menyediakan kesimpulan yang jelas. Metode ini dimulai dengan pernyataan tujuan yang jelas, penilaian yang kritis, dan menyintesis berbagai penelitian yang sesuai (Livinski, Joubert & Terry, 2015).

Penulis berargumentasi bahwa konsep MSP hanya akan berhasil bila pemilik kekuasaan dominan berpihak pada tujuan-tujuan konservasi. Dalam konteks ini, pertimbangan rasional

komprehensif akan mampu menyebarkan "virus" keberlanjutan terhadap pemangku kepentingan lain sehingga partisipasi publik akan sejalan dengan tujuan MSP. Sebaliknya bila pemilik kekuasaan dominan cenderung berpihak kepada ekonomi, maka MSP akan menjadi sarana legitimasi aktivitas ekonomi yang tengah berjalan. Isu keberlanjutan mungkin hanya menjadi penghias agar label keseimbangan antara isu lingkungan dan ekonomi dapat disematkan. Pada situasi di mana tidak ada kekuasaan dominan, MSP akan menemui jalan buntu di dalam proses pengambilan keputusan sehingga akan menghasilkan konsensus dangkal yang multi interpretatif.

Isu Keberlanjutan Lingkungan dalam Ilmu Perencanaan

Manusia pada hakikatnya memiliki kebebasan di dalam berpikir dan bertindak sebagaimana diyakini oleh para kaum libertarian. Namun demikian kebebasan tersebut menemui kendala manakala kebebasan tersebut memberikan gangguan terhadap pihak lain. Masalah ini banyak ditemui khususnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang bersifat kepemilikan bersama. Prinsip *joint ownership* mengatakan bahwa setiap orang memiliki kepentingan yang setara terhadap semua sumberdaya alam oleh karena itu setiap orang memiliki hak veto atas tindakan ekonomi berlebih yang dilakukan oleh orang lain (Hendler, 1995).

Isu lingkungan mula-mula muncul di dalam tulisan pada akhir abad ke 18 yang mengkhawatirkan aktivitas deforestasi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan manusia (Wheeler, 2004). Pandangan ini masih bersifat antroposentris dimana manusia merupakan titik sentral yang harus diutamakan sehingga lingkungan dipandang sebagai pelayan kebutuhan manusia. Perkembangan isu lingkungan mulai beralih menjadi lebih ekologis ketika Aldo (1949) mengungkapkan tentang pentingnya *"land ethic"* dimana manusia secara instrinsik memiliki tanggung jawab secara etika untuk melindungi ekosistem alam.

Isu keberlanjutan semakin besar pada tahun 1970 an seiring arus kuat *deep ecology* yang mengubah pola pandang atas hubungan manusia dengan alam. Manusia tidak lagi dianggap sebagai pusat, akan tetapi sebagai bagian kecil dari sistem ekologi kehidupan yang lebih besar (ekosentris). Kondisi ini sejalan dengan pendapat Stein (2001) yang menyatakan pengetahuan modern mengantarkan manusia pada pemahaman bahwa interaksi antara manusia dan lingkungan penting di dalam kerangka yang lebih luas yaitu sebagai satu kesatuan ekologis. Konsep keberlanjutan kemudian masuk ke dalam terminologi pembangunan yang di definisikan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (WCED, 1987).

Praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan secara prinsip membatasi ruang kebebasan orang lain termasuk kebebasan dalam mengakuisisi sumber daya. Dalam pandangan liberalisme kontemporer, kebebasan seseorang menjadi terbatas mana kala ia berhadapan dengan sumber daya yang menghadapi kelangkaan (Hendler, 1995). Lebih jauh, klaim seseorang atasnya bahkan dapat gugur dan sifat kepemilikannya menjadi seperti barang umum. Oleh karenanya prinsip pembangunan berkelanjutan membawa implikasi pada semakin terbatasnya aktivitas manusia yang dapat dilakukan. Hal ini dilakukan atas nama keadilan itu lingkungan, antar generasi, ekonomi bahkan sosial.

Berkembangnya isu berkelanjutan secara langsung dan tidak langsung turut mempengaruhi pola pikir dan argumentasi para perencana sehingga berdampak pada evolusi teori perencanaan. Pada prinsipnya, teori perencanaan dapat dilihat dari tugasnya yang filosofis, adaptif dan translatif (Friedmann, 2008). Tugas filosofis berkaitan dengan pandangan dan respons teori perencanaan terhadap filosofi humanis yang dalam kasus keberlanjutan isu humanis berkaitan dengan keadilan antar generasi sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk sejahtera. Tugas adaptasi berkaitan dengan semakin kompleksnya arena perencanaan yang harus mampu diadaptasi. Kompleksitas arena perencanaan terus tumbuh mengingat aktivitas manusia semakin kompleks serta faktor *uncertainty* yang membuat lingkungan semakin rentan. Sementara tugas translasi adalah menerjemahkan apa yang dihadapi ke dalam konsep dan pengetahuan perencanaan.

American Institute of Certified Planners (AICP) pada tahun 1978 mengadopsi isu keberlanjutan ke dalam kode etik profesional perencana yang mengharuskan perencana berjuang untuk melindungi lingkungan alami (Wheeler, 2004). Tidak hanya di Amerika, perencana di negara-negara maju lain seperti Perancis, Belanda, Norwegia juga mengadopsi etika yang serupa.

Kondisi ini membawa dampak besar bagi berbagai agenda perencanaan. Bila sebelumnya slogan "*think globally and act locally*" sebagai bagian dari kampanye isu keberlanjutan, sekarang berubah tensinya menjadi lebih kuat yaitu "*think at many scales and act wherever possible*". Perubahan ini membawa isu keberlanjutan menjadi isu global dimana semua negara didorong secara kuat untuk masuk kedalam isu ini tanpa terkecuali. Kesadaran ini didorong dengan pemahaman bahwa lingkungan saling terhubung, sehingga tidak lagi bisa diatasi secara parsial. Hanya tindakan bersama yang diyakini mampu mengatasi isu ini. Oleh karenanya khazanah perencanaan pun semakin kental dengan nuansa keberlanjutan.

Beberapa komitmen internasional tentang komitmen terhadap perencanaan berkelanjutan dapat dilihat dari kesepakatan Brundtland tahun 1987 yang diikuti kemudian dengan konferensi PBB tahun 1992 tentang lingkungan dan pembangunan (Owens & Cowell, 2011). Beberapa hal yang menjadi komponen kunci adalah perencanaan fisik yang berorientasi pada lingkungan di mana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya lahan dilakukan secara terpadu. Kemudian pada tahun 2000 muncul istilah *Land Use Planning for Sustainable Development* yang dilatarbelakangi oleh isu ketidakadilan ekonomi dan kebencanaan yang menimpa Amerika Serikat dan pentingnya memperhatikan kehidupan yang harmoni dengan alam (Silberstein & Masser, 2014).

Marine Spatial Planning: Perencanaan Laut Berorientasi pada Keberlanjutan

Wilayah laut dan pesisir menghadapi ancaman besar dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia baik di darat maupun di laut. Ancaman dari daratan datang dari berbagai jenis limbah yang mengalir masuk ke daerah pesisir seperti limbah industri, rumah tangga, pertanian, wisata dan lain-lain. Berbagai jenis limbah ini membuat perairan tercemar dan beracun sehingga mengancam tidak hanya ekosistem pesisir, tetapi semua organisme hidup yang ada. Lebih parah, rantai makanan yang ada di laut akan membawa dampak lanjutan yang sangat luas seperti terinfeksinya ikan-ikan yang umum dikonsumsi manusia. Alih fungsi lahan yang mengubah tata guna lahan pesisir dan hilangnya ekosistem alami seperti *mangrove*, terumbu karang untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman, pelabuhan, dan masih banyak lagi lainnya (Caitlin, Benjamin, Mike & Carrie, 2009). Lotze *et al.* (2006) mengungkap dalam 150 tahun terakhir telah hilang sebesar 67% lahan basah (termasuk *mangrove*), 65% Lamun dan 48 % vegetasi dasar laut lainnya.

Mencermati permasalahan di laut dan pesisir bermunculan berbagai upaya di mana salah satu titik tolak terpentingnya terjadi tahun 1958 dengan dikeluarkannya kesepakatan UNCLOS. Salah satu butir kesepakatan yang diatur adalah tentang perikanan dan konservasi sumberdaya alam hayati di laut. Negara diperbolehkan untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan dan sumber daya alam lain di laut dengan batasan bahwa negara harus menghormati hak-hak kepentingan negara lain yang berbatasan dengan laut bebas, dan harus pula memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pelestarian dan perlindungan laut.

Perencanaan laut yang lebih mementingkan kepentingan ekologis semakin kuat pada tahun 1960-1970 an yang melahirkan gerakan untuk lebih memperhatikan konservasi lingkungan melalui UNEP's Regional Seas Programmes (Jones, 2014). Pada era ini mulai muncul konsep *coastal zone management* di Amerika (Kay & Alder, 1999). Tidak lama setelah itu muncul program perlindungan laut *Great Barrief Reef* di Australia yang menjadi contoh sukses pengelolaan kawasan konservasi dan kemudian banyak ditiru oleh negara lain. Perkembangan selanjutnya mengarah pada *Integrated coastal zone management* (*ICZM*) sebagaimana diakui oleh World Bank pada tahun 1993. Prinsip utama *ICZM* adalah penguatan manajemen sektoral, penyediaan dan perlindungan produktivitas dan biodiversitas ekologi dari ekosistem pesisir dan mempromosikan pembangunan yang rasional dan berkelanjutan (Kay & Alder, 1999). Pada tahun 2000-an lahir konsep MSP sebagai evolusi prinsip integrasi tetapi lebih mengedepankan aspek *Ecological Based Management* sebagai bentuk perhatian lebih terhadap lingkungan yang seringkali terkalahkan dalam kontestasi kepentingan dalam pemanfataan ruang pesisir dan laut. Pada banyak aspek ia memiliki kesamaaan dengan *ICZM* hanya saja *MSP* menambahkan pentingnya keterkaitan biofisik antara perairan laut yang satu dengan lainnya, antara perairan lepas dan perairan pesisir. Pada konteks kawasan perlindungan laut atau *marine protected area* (*MPA*), *MSP* menekankan pula pentingya jejaring antar satu kawasan *MPA* dengan *MPA* lainnya.

Teori ini berkembang cepat dan sudah telah diadopsi sebagai bagian dari perencanaan di lebih dari 70 negara dengan status bervariasi mulai dari

tahap awal (pembentukan otoritas dan pembiayaan awal) sampai dengan tahap revisi dan adaptasi seperti di Belgia, Belanda, Norway, China dan Australia (UNESCO, 2018). Respon positif dari berbagai negara tersebut menunjukkan adanya permasalahan bersama tentang keberlanjutan ekosistem dilaut yang semakin terancam oleh beragam aktivitas dan gerakan politik ekologi yang semakin diterima secara global. Penerimaan dunia atas perencanaan spasial laut pada satu sisi di dorong oleh konsepsinya yang relatif ideal untuk merekonsiliasi kepentingan aktivitas manusia dan dampaknya terhadap lingkungan laut.

Perencanaan spasial laut dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan yang mempengaruhi di mana dan kapan aktivitas manusia terjadi pada wilayah laut dengan tujuan mencari titik keseimbangan antara tujuan lingkungan, ekonomi dan sosial (Douvere, 2008). Ehler & Douvere (2009) menekankan pada pentingnya perlindungan ekosistem di tengah kegiatan pembangunan yang memberi tekanan kepada lingkungan. Pembangunan dimaksud tidak hanya yang secara langsung dilakukan pada wilayah laut tetapi juga pembangunan pada wilayah darat khususnya pesisir yang memberikan eksternalitas pada wilayah laut. Sejalan dengan Smith, Maes, Stojanovic & Ballinger (2011) menegaskan pentingnya memberikan perhatian pada interaksi daratan dan lautan dalam perencanaan spasial laut.

Konsepsi MSP menyatakan terdapat 5 prinsip yang melekat (Douvere, 2008) yaitu: (1) Ecosystem Based; (2) Integrated; (3) Area Based; (4) Adaptive dan; (5) Partisipatif. Prinsip utama Ecosystem based adalah melindungi biodiversitas dan keberlanjutan ekosistem sehingga menghindari aktivitas yang dapat memberi tekanan berat terhadap ekosistem (Foley *et al.,* 2010). Integrasi menekankan pada relasi saling ketergantungan antara satu aktivitas dengan aktivitas lain, antara satu ruang dengan ruang lainnya, serta antara daratan dan lautan. Smith *et al.* (2011) menggambarkannya sebagai suatu aliran mulai dari air, nutrien, polusi, sedimen, energi, migrasi spesies, yang menghubungkan antara wilayah satu dengan lainnya. Area based, menekankan aspek pengaturan secara spasial sebagai dasar mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam satu area tertentu. Adaptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara efektif dimana diterapkan pada proses perencanaan, implementasi dan monitoring dan evaluasi. Terakhir partisipasi memiliki tujuan utama untuk mereduksi konflik antar pemanfaat.

Pendekatan Perencanaan dalam MSP

Berdasarkan prinsip yang melekat pada MSP, maka secara tidak langsung menyiratkan setidaknya dua pendekatan perencanaan dalam satu konsep sekaligus yaitu perencanaan komprehensif (*comprehensive planning)* dan perencanaan kolaboratif (*collaborative planning)*. Perencanaan secara komprehensif mewakili *konsep manajemen berbasis ekosistem (ecosystem based management)* dan terintegrasi (*integrated)*. Sementara *perencanaan kolaboratif* mewakili konsep partisipatif (*partipative)* dan adaptif (*adaptive)*.

Makna rationalitas perencanaan komprehensif secara umum adalah perencanaan yang membutuhkan objektivitas melalui serangkaian metode dan kemudian melahirkan berbagai alternatif untuk memunculkan skenario yang optimal (Lindblom and Braybrooke 1963). Definisi ini sejalan dengan prinsip *manajemen berbasis ekosistem* dimana menekankan pentingnya basis ilmu yang dapat memastikan pengaturan secara spasial yang menjamin perilaku dan aktivitas manusia kompatibel dengan tujuan memelihara spesies kunci, biodiversitas, serta konektivitas spesies dan habitat (Foley *et al.,* 2010). Aspek integrasi memiliki keterkaitan dengan wilayah laut sebagai wilayah publik di mana berbagai kepentingan ada di dalamnya. Kondisi ini menyebabkan adanya kontestasi kepentingan dalam memanfaatkan laut sehingga perlu pengaturan secara utuh agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Pengaturan ini sesuai dengan ciri *perencanaan komprehensif* yang harus memperhatikan pertumbuhan aktivitas manusia yang berdampak pada perubahan fisik wilayah serta dampaknya terhadap lingkungan (Kent, 1964).

Altshuler (1965) mengatakan *perencanaan komrehensif* ditujukan untuk mengatasi permasalahan publik yang luas secara objektif dengan menggunakan metode yang seoptimal mungkin. Oleh karena itu pendekatan ini menggunakan sejumlah aturan atau kriteria penilaian terhadap alternatif yang tersedia. Landasan objektif di sini bermaksud bebas nilai berdasarkan standar ilmu tertentu sehingga dapat menjadi pembenaran atas nama kepentingan publik ketika suatu rencana ditetapkan. Hal ini senada dengan Kent (1964) yang menyatakan bahwa

hanya dengan perencanaan yang bersifat komprehensif kepentingan publik dapat ditegakkan. Perencanaan komprehensif sering kali juga dihubungkan dengan proses pembuatan aturan yang lebih adil dan tidak menimbulkan kesalahan yang berdampak pada hadirnya kerugian pada pihak-pihak tertentu (Sullivan, 2008).

Perencanaan kolaboratif pada intinya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Healy (1997) berpendapat bahwa pelibatan stakeholder dalam perencanaan memegang peranan penting, ketimbang perencanaan dilakukan sepihak oleh pemerintah. Pengalaman membuktikan bahwa ketiadaan partisipasi publik menyebabkan sulitnya mencari solusi atas masalah yang komplek yang bila dipaksakan berujung pada konflik (baik yang tersembunyi atau terang-terangan) atau minimnya kepatuhan masyarakat. Untuk itu collaborative planning menawarkan alternatif agar konsensus dan jaringan dapat terbangun dalam rangka mengubah masalah menjadi solusi Margerum (2002). Mengenai konsensus ini, Innes (1996) menilainya sebagai metode musyawarah kelompok yang menyatukan perbedaan pihak dan kepentingan sehingga menyerupai teori rasional komunikatif yang digagas oleh Habermas.

Pada tulisan ini penulis juga memasukkan konsep adaptive sebagai pendekatan collaborative. Hal ini didasarkan oleh pengertian adaptif di dalam MSP sebagai kemampuan untuk belajar dari pengalaman termasuk menggali pengalaman dari partisipan yang telah berubah menjadi nilai dan norma (Ehler, 2011). Adaptif juga diartikan sebagai kemampuan untuk terus berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang erat kaitannya dengan problematik yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan.

Pertarungan Isu Keberlanjutan dan Ekonomi di Bawah Payung MSP

Tak bisa dipungkiri bahwa isu keberlanjutan telah menjadi agenda yang mendunia. Tak bisa dihindari pula oleh berbagai negara untuk masuk ke dalam pusaran isu ini. Meski demikian, isu keberlanjutan tampaknya masih harus bersaing keras dengan isu ekonomi yang telah melatarbelakangi berbagai tindakan manusia (Becker, 1976). Bahkan kata sumber daya, yang belakangan menjadi subjek yang erat dengan isu keberlanjutan, berasal dari terminologi ekonomi. Sesuatu dikatakan sumber daya bila telah diketahui manfaatnya serta bagaimana mengekstraknya untuk kepentingan manusia. Perkembangan isu keberlanjutan sendiri merupakan respon dari aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan dimana sebagian besar dipicu oleh motif ekonomi. Isu ekonomi pada ranah perencanaan telah muncul lebih dahulu dengan mengangkat topik kemiskinan, pemukiman, ketimpangan akses kapital dan lain-lain. Hal ini menyiratkan bahwa isu ekonomi adalah isu dasar yang paling menarik perhatian manusia dan oleh karenanya menjadi perhatian negara atau para pengambil kebijakan.

Latar belakang kemunculan isu keberlanjutan dan MSP dilihat dari kemunculannya berawal dari negara-negara yang relatif telah “selesai” dengan permasalahan ekonomi seperti Belgia, Belanda, German, Inggris, Australia Canada, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut adalah negara yang berhasil menjadi negara sejahtera dan maju setelah melewati problem sosial ekonomi pelik dimasa lalu. Uniknya negara-negara ini maju melalui tahap yang sangat merusak lingkungan dengan melakukan deforestasi besar-besaran. Melalui perusakan itu kemudian negara-negara tersebut tumbuh pesat secara ekonomi yang ditopang kemudian dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak sampai disitu, pengembangan pengetahuan ternyata juga menjadi malapetaka isu lingkungan baru dengan kelahiran mesin-mesin uap, alat transportasi, moda-moda produksi yang memberi eksternalitas negatif pada lingkungan. Pada saat itu negara-negara di atas juga masih memiliki ketergantungan kuat terhadap eksploitasi sumber daya alam. Sekarang mungkin mereka mulai beralih, akan tetapi mereka sudah mengakumulasi keuntungan tersebut yang memungkinkan mereka mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya alam. Lalu bagaimana nasib dengan negara-negara berkembang atau di bawahnya?.

Negara-negara berkembang atau di bawahnya sebagian besar masih dihadapkan pada permasalahan ekonomi sebagaimana awal negara-negara di atas membangun negara mereka. Tuntutan memperbaiki kehidupan ekonomi masih sangat kuat sehingga mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan juga aparatur negara. Sebagaimana pendapat Becker (1976) bahwa rumah tangga, perusahaan dan negara akan selalu berupaya memaksimumkan fungsi kesejahteraan (dalam hal ini diukur dalam standar ekonomi). Lebih lagi pejabat negara harus membuktikan dirinya mampu memberikan pengaruh nyata terhadap ekonomi

masyarakat bila ingin mempertahankan status kepemimpinan dalam suatu tatanan pemerintahan berbasis demokrasi. Pilihan untuk meningkatkan ekonomi juga tidak sebesar negara maju yang dapat menyubstitusinya dengan menjual teknologi yang dihasilkan dari keuntungan akumulasi pengetahuan, sehingga eksploitasi sumber daya alam sering masih menjadi pilihan.

Perbedaan kondisi ekonomi umum yang dialami tiap-tiap negara berimplikasi pada perilaku secara umum termasuk juga *MSP*. Rhode Island sebagai contoh mampu menerjemahkan prinsip perencanaan yang komprehensif dan kolaboratif pada saat yang bersamaan. Faktor utama yang mendorongnya adalah keberpihakan politik ekologi oleh pemegang otoritas yang berwenang serta kemauannya melepas sebagian wewenang dengan memberikan tanggungjawab proyek kepada pihak universitas Rhode Island (URI). URI kemudian melakukan penyusunan dokumen perencanaan dengan menggali kebutuhan riset dari para pakar dan peneliti untuk menghasilkan rekomendasi yang berbasis sains (McCann, Schumann, Fugate, Kennedy & Young 2013. Meskipun demikian pengetahuan diakui masih perlu dikembangkan untuk menjustifikasi alternatif perencanaan secara ilmiah secara lebih baik mengingat kompleksnya dinamika sistem pada lingkungan laut.Secara bersamaan proses kolaboratif dikembangkan oleh URI dengan membuka komunikasi dengan semua pihak-pihak yang berkepentingan terhadap produk perencanaan seperti masyarakat umum, industri, penyedia energi alternatif, dan nelayan. Untuk meningkatkan kualitas partisipasi pihak URI menyediakan data dan informasi yang bisa diakses, serta menyediakan media transfer pengetahuan baik secara online maupun dialog-dialog yang digelar untuk publik. Secara singkat, Rhode Island telah menyediakan basis model yang sangat baik bagi aplikasi MSP pada dunia nyata.

Negara berkembang seperti Indonesia punya cerita berbeda ketika mencoba mengadopsi konsepsi ini. Indonesia mengintegrasikan MSP ke dalam sistem legislasi nasional dengan lahirnya sejumlah undang-undang seperti UU No. 1. Tahun 2014 yang merupakan revisi atas UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU. No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Secara ringkas peraturan tersebut mensyaratkan perencanaan tata ruang dan zonasi pada wilayah laut dan pesisir yang harus dilakukan secara terintegrasi serta melibatkankan masyarakat didalam prosesnya. Hal ini sesuai dengan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh MSP. Permasalahan yang muncul terkait regulasi adalah adanya inkompatibilitas dengan regulasi lainnya. Seperti penelitian Yurista dan Wicaksono (2017) yang menemukan inkompatibilitas antara regulasi mengenai RZWP3K dan RTRW yaitu RZWP3K hanya dapat dibentuk pada level provinsi berdasarkan UU. No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sedangkan RTRW dapat dibentuk pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Produk hukum RZWP3K oleh karenanya berupa perda provinsi, sementara RTRW dapat dituangkan dalam perda yang lebih rendah atau pada level kabupaten. Hal ini menimbulkan kerumitan ketika dokumen disusun dimana sangat memungkinkan adanya arah kebijakan yang berbeda antara perda RTRW di kabupaten dan perda RZWP3K di provinsi karena masing-masing merasa memiliki landasan hukum. Yurista dan Wicaksono (2017) juga berpendapat bahwa dinas kelautan dan perikanan tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun RZWP3K maupun rencana tata ruang laut karena baik dalam UU. No. 32 tahun 2014 atau UU. No. 1 tahun 2014 hanya memberikan mandat terhadap pengelolaan ruang ruang bukan penataan ruang laut yang harus diintegrasikan dengan RTRW baik provinsi maupun kabupaten/ kota sebagaimana disebutkan dalam UU. No. 26 tahun 2007.

Ketidaksesuaian regulasi lainnya terjadi antara aturan zonasi pada kawasan taman nasional laut dengan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Taman nasional laut yang diperuntukkan untuk konservasi masuk dalam pengelolaan kehutanan berdasarkan UU. No. 41 tahun 1999 yang diturunkan dalam PP No. 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam serta Permen kehutanan No. P.56/menhut-II/2006 tentang pedoman zonasi taman nasional. Berdasarkan kerangka regulasi yang bersifat sektoral diatas, pengaturan hanya terbatas pada wilayah perairan dan ekosistem yang ada seperti terumbu karang, mangrove, lamun, hutan pantai dan hutan daratan tetapi tidak atas pulau-pulau kecil yang menjadi domain pemerintah daerah. Padahal pengaturan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan membutuhkan pengaturan yang utuh sebagai satu kesatuan sistem dengan pulau-pulau kecil yang tersebar disekitarnya. Hal ini rawan menumbulkan konflik pengaturan dan pemanfaatan wilayah yang berdampak

pada bentuk-bentuk yang inkompatibel dan tidak berkelanjutan.

Presiden RI pada tahun 2015 memerintahkan untuk memaksimalkan potensi yang ada salah satunya di Taman Nasional Laut Kepulauan Togean dengan meningkatkan aksesibilitas, infrastruktur, fasilitas pariwisata, dan sumber daya manusia lokal agar lebih memudahkan wisatawan menuju lokasi wisata ataupun bersosialisasi dengan masyarakat sekitar (Anonim, 2015). Hal yang sama juga terjadi pada Taman Nasional Laut Karimunjawa di Jawa Tengah yang didorong untuk mendapatkan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sebesar-besarnya dari pengembangan aktivitas pariwisata bahari.Mendatangkan sebanyak-banyaknya orang ke dalam lokasi taman nasional jelas mengganggu tercapainya tujuan pelestarian lingkungan. Sebagaimana hasil penelitian Suryanti (2010), aktivitas wisata pada lokasi taman nasional laut Karimunjawa membawa tekanan terhadap ekosistem karena terkena injakan kaki wisatawan alam ketika sedang melakukan snorkeling.

Pada proses perencanaannya, otoritas yang diberi mandat memiliki tugas berat yaitu pada satu sisi diwajibkan menyusun segala sesuatunya secara komprehensif agar terjadi kompatibilitas antar aktivitas, pada sisi lain sumber daya yang dialokasikan untuk melakukan hal tersebut sangat terbatas khususnya sumber daya manusia dan finansial. Data umumnya ditemukan tidak secara periodik dilakukan dengan area sampel yang kurang memadai sehingga dapat dikatakan zonasi dilakukan dengan data yang relatif sangat terbatas. Mereka hanya menggunakan indikator yang sifatnya umum seperti tutupan terumbu karang, luasan mangrove, kecerahan dan yang semisal tetapi belum memasukkan faktor aliran nutien, sedimen, migrasi spesies, keterhubungan habitat dan lain-lain. Situasi ini sejalan dengan pendapat Tafon (2018) yang mengatakan praktik MSP mempertontonkan kekurangan sains untuk menyediakan informasi yang tepat dan akurat tentang fungsi dan layanan ekosistem sehingga banyak dibuat berdasar *best available scientific knowledge*.

Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain pada sisi lain tidak berjalan ideal. Pertemuan seringkali hanya menjadi ajang formalitas yang pada hakikatnya sudah diputuskan. Pihak otoritas juga tampaknya tidak mampu berdiri netral, akan tetapi tunduk pada kepentingan-kepentingan tertentu seperti kekuatan pemilik modal yang berkolaborasi dengan penguasa. Contohnya pada kasus penetapan zonasi Taman Nasional Bali Barat di mana mengutamakan kepentingan tiga perusahaan besar yang mendapatkan Izin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) dengan luasan masing-masing 251 ha, 284 ha, dan 40 ha (Mahmud *et al.,* 2015). Dampaknya dari zonasi tersebut adalah hilangnya jalur-jalur penangkapan tradisional nelayan yang biasa digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan hilangnya lokasi budidaya rumput laut yang menjadi sumber mata pencaharian alternatif nelayan. Kasus ini menunjukkan bahwa perencanaan spasial laut melalui sistem zonasi sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan yang berkolaborasi dengan sistem kapitalisme. Situasi ini seakan membenarkan argumentasi Swyngedouw (2007) yang melihat MSP dapat menjadi alat legitimasi bagi proses berlangsungnya eksploitasi sumberdaya laut berbasis pasar karena proses perencanaan dapat dimanipulasi oleh kekuasaan atas nama pembangunan dan lingkungan.

MSP sebagai sebuah pendekatan yang memperjuangkan isu keberlanjutan masih memerlukan waktu untuk membuktikan dirinya sebagai pendekatan yang efektif. Secara teoritis, MSP mencoba menggabungkan berbagai pendekatan sebagai upaya menghadirkan idealisme perencanaan. Menggabungkan ide komprehensif, berbasis sains namun sekaligus melibatkan banyak pihak untuk merekonsiliasi konflik antar pemangku kepentingan. Pada realitasnya, idealisme tersebut akan menghadapi berbagai rintangan mulai dari ketiadaan data dan informasi, terbatasnya pengetahuan, keterikatan terhadap nilai dan budaya, sampai dengan isu dominasi kekuasaan atas suatu perencanaan yang bersifat kolaboratif.

Keberhasilan MSP tampaknya akan lebih ditentukan oleh adanya keberpihakan terhadap isu keberlanjutan dibandingkan sekedar proses perencanaan yang dijalankan. Mengandalkan pendekatan yang komprehensif sebagai basis pengambilan keputusan, dengan berbagai kelemahan yang dimiliki saat ini, jelas bukan pilihan yang bijaksana. Keputusan yang mengedepankan asas keberhati-hatian menjadi lebih penting, meski belum ditopang oleh sepenuhnya oleh data dan pengetahuan yang mumpuni. Mengurangi aktivitas manusia menjadi lebih disukai pada kondisi tidak diketahuinya dampak dari aktivitas tersebut terhadap lingkungan. Begitu pula tidak dapat dilakukan dengan menyerahkannya pada

mekanisme partisipasi yang masih kental dengan dominasi kepentingan dari para pemilik modal. Bekerja dengan keyakinan tinggi dengan mencari dukungan kekuasaan menjadi lebih prioritas bagi para perencana.

Peneliti memiliki keyakinan bahwa perencan tidak akan pernah mampu melepaskan dirinya dari pengaruh kekuasaan di dalam melakukan perencanaan. Namun perencana memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, memobilisasi, dan memfokuskan perhatian para pemilik kekuasaan. Perencana bisa menjadi bagian dari kekuasaan tetapi tidak dikontrol olehnya. Untuk itu ia harus memiliki daya tawar yang kuat, yang peneliti yakini berkorelasi dengan kemampuan menjelaskan relasi antara tindakan manusia dan dampaknya terhadap lingkungan melalui pembuktian secara empirik.

Pada konteks Indonesia, MSP akan berhasil bila para perencana berpikir pragmatis yaitu dengan memasukkan ide-ide keberlanjutan kepada pemegang kekuasaan khususnya pada tingkat daerah. Pendekatan dapat dilakukan dengan interaksi yang intensif bahkan sejak calon pemegang kekuasaan saling bersaing baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Ketika pejabat baru terpilih perencana dapat menyajikan sejumlah opsi yang argumentatif mengapa MSP perlu diperjuangkan. Bahkan perencana harus mampu menunjukkan keuntungan yang sifatnya terukur seperti manfaat ekonomi, manfaat sosial, sampai dengan meningkatnya popularitas dan tingkat keterpilihan bagi segmentasi masyarakat tertentu. Peneliti berkeyakinan bahwa struktur kekuasaan masih memegang kunci bagi penentuan perencanaan ruang laut dibandingkan dengan faktor lain seperti tersedianya data dan informasi. Meski demikian, diperlukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan bukti empirik yang mendukung tesis ini.

PENUTUP

Penulis mengakui keterbatasan dalam artikel ini yang sebatas mengangkat fenomena umum dan masih relatif dangkal serta minim bukti-bukti empirik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap fenomena yang terjadi di dalam proses perencanaan dengan prinsip MSP. Beberapa tema yang dapat digali lebih dalam di antaranya adalah bagaimana pemangku kepentingan mengatasi keterbatasan rasionalitas di dalam menerapkan prinsip perencanaan yang komprehensif. Apakah pemangku kepentingan mana saja yang memiliki pengaruh serta sejauh mana kekuasaan memainkan peran di dalam mengarahkan proses perencanaan. Bagaimanakah sifat konsensus yang terbangun dan apakah ia mampu mengikat perilaku pemangku kepentingan atau sangat longgar yang dapat diinterpretasikan sesuai kepentingan masing-masing pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini di selesaikan atas dukungan dan berbagai masukan berbagai pihak. Untuk itu diucapkan terimakasih kepada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam studi sehingga menjadi jalan bagi pembuatan artikel ini. Terimakasih juga diberikan kepada Prof. Haryo Winarso, Ph.D, Hastu Prabatmodjo, Ph.D dan Heru Purboyo Hidayat P., Ph.D yang telah memberikan ilmunya sehingga membantu penulis di dalam penulisan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

Aldo L. (1949). A Sand County Almanac, Ballantine Books. New York.

Altshuler, A. (1965). THE GOALS OF COMPREHENSIVE PLANNING, Journal of the American Institute of Planners, 31:3, 186-195.

Anonim. (2015). *Sail Tomini Perlu Sosialisasi Lebih Gencar, Agar Wisatawan Dalam Dan Luar Negeri Mengetahui Tentang Teluk Tomini – yang Merupakan Bagian Dari Segitiga Terumbu Karang Dunia Taman Nasional Laut Kepulauan Togean atau Dikenal Sebagai The Heart Of Coral Triangle*. http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/maksimalkan-potensi-wisata-bahari-indonesia.html. Diakses tanggal 11 November 2018.

Becker G.S. (1976). *The Economic Approach for Human Behaviour*. The University of Chicago PressChicago and London.

Caitlin M.C., S.H. Benjamin, W. Mike & V.K. Carrie. (2009). The Year in Ecology and Conservation Biology: Ann. N.Y. *Acad. Sci*. 1162: 39–62 (2009). doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.04496.

Daniels, T. (2014). *Environmental Planning Handbook*. New York: Routledge.

Douvere, F. (2008). The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-

based sea use management. *Marine Policy*, 32 (2008) 762–771. doi:10.1016/j.marpol.2008.03.021.

Douvere, F. & Ehler, C.N. (2009). New perspectives on sea use management: Initial findings from European experience with marine spatial planning. *Journal of Environmental Management,* 90 (2009) 77–88. doi:10.1016/j.jenvman.2008.07.004.

Ehler, C. (2011). *Marine Spatial Planning: An Introduction*. MSP Generic Briefing 30 May-1 Juni 2011. Inter-governmental Oceanographic Commission. UNESCO. Paris, France.

Friedmann, J. (2008). 'The Uses of Planning Theory: A Bibliographic Essay', *Journal of Planning Education and Research*, 28(2), pp. 247–257. doi: 10.1177/0739456X08325220.

Foley M.M, S.H. Benjamin, F. Micheli, M.H. Armsby, M.R. Caldwell, C.M. Crain, E. Prahler, Ni. Rohr, D. Sivas, M.W. Beck, M.H. Carr, L.B. Crowder, J.E. Duffy, S.D. Hacker & K.L. McLeo. (2010). Guiding ecological principles for marine spatial planning. *Marine Policy*, 34(5), 955–966. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2010.02.001.

Healy, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Macmillan Education UK.

Healy, P. (2003). Collaborative planning in perspective. *Journal of Planning Theory*, Vol 2(2): 101–123. Sage Publication.

Hendler, S .(1995). Planning Ethics a Reader in Planning Theory, Practice, and Education.

Innes J.E. (1996). Planning Through Consensus Building: A New View of the Comprehensive Planning Ideal. *Journal of the American Planning Association*, 62:4, 460-472, DOI: 10.1080/01944369608975712.

Jones. P.J.S. (2014). *Governing Marine Protected Areas*. Resilience Through Diversity. Routledge. New York.

Kay, R. & J. Alder. (1999). *Coastal Planning and Management*. Routledge. USA p. 345.

Kent, T.J. (1964). The Urban General Plan. San Francisco: Chandler Publishing Company. 1991.2nd Edition. Chicago, IL: Planners Press, American Planning Association.

Kitchenham, B. (2004). *Procedures for Performing Systematic Reviews*. Eversleigh: Keele University.

Liberati A, G.A. Douglas, J. Tetzlaff, C. Mulrow, P.C. Gøtzsche, J.P.A. Ioannidis, M. Clarke, P.J. Devereaux, J. Kleijnen & D. Moher. 2009. The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration. *Journal of Clinical Epidemiology,* 62. 31-e34. doi: 10.1016/j.jclinepi.2009.06.00.

Lindblom, C.E., & D. Braybrooke. (1963). *A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Social Process*. New York: The Free Press, Macmillan.

Livinski, A., D. Joubert & N. Terry. (2015). *Undertaking a Systematic Review: What You Need to Know [presentation].* Office of Research Services. National Institutes of Health. US Departement of Health and Human Services. USA.

Lotze, H.K., H.S. Lenihan, B.J. Bourque, R.H. Bradbury, R.G. Cooke, M.C. Kay, S.M. Kidwell , M.X. Kirby, C.H. Peterson & J.B. Jackson. (2006). *Depletion, degradation, and recovery potential of estuaries and coastal seas.* Science 312: 1806– 1809.

Mahmud A, A. Satria & R.A. Kinseng. (2015). Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 18 No.3 Maret 2015. Hal. 237-251. ISSN 1410-4946.

Margerum, R.D. (2002). Collaborative Planning: Building Consensus and Building a Distinct Model for Practice. *Journal of Planning Education and Research*, 21(3), 237–253. https://doi.org/10.1177/0739456X0202100302.

McCann, J., S. Schumann, G. Fugate, S. Kennedy & C. Young. (2013). *The Rhode Island Ocean Special Area Management Plan: Managing Ocean Resources Through Coastal and Marine Spatial Planning*. University of Rhode Island Coastal Resources Center/Rhode Island Sea Grant College Program, Narragansett, R.I.

Mujio, L. Adrianto, K. Soewardi & Y. Wardiatno. (2016). Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang Darat Dan Perairan Pesisir. *Jurnal Sosiologi Pedesaan* | Agustus 2016, hal 139-144.

Nunes, P.A.L.D., J.C.J.M. van den Bergh & P. Nijkamp. (2000). *Ecological Economic Analysis.* Economic Analysis and Valuation of Biodiversity and Valuation of Biodiversity. Edward Elgar Publishing Ltd. UK.

Owens, S. & Cowell, R. (2011). *Land and Limits*. London: Routledge.

Smith H.D., F. Maes, T.A. Stojanovic & R.C. Ballinger. (2011). The Integration of Land and Marine Spatial Planning. *J Coast Conservation*, 15: 291-303. DOI: 10.1007/s11852-010-0098-z.

Silberstein, C.M. & C. Masser. (2014). *Planning For Sustainable Development (Second edition)*. CRC Press. Taylor & Francis Group.

Stein J.M. (2001). *Classic Reading in Urban Planning: An Introduction*. Island Press, 1718 Connecticut Avenue, N.W., Suite 300, Washington, DC.

Sullivan E.J. (2008). *Recent Developments in Comprehensive Planning Law Edward J. Sullivan*. The Urban Lawyer, Vol. 40, No. 3 (Summer 2008), pp. 549-559.

Suryanti. (2010). Degradasi Pantai Berbasis Ekosistem di Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara [Disertasi]. Universitas Diponegoro.

Swyngedouw, E. (2007). *Impossible "sustainability" and the postpolitical condition*. The sustainable development paradox: urban political economy in the United States and Europe, 13–40.

Tafon, R. V. (2018). Taking power to sea: Towards a post-structuralist discourse theoretical critique of marine spatial planning. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 36(2), 258–273. https://doi.org/10.1177/2399654417707527.

Thomas M. J. (1979*). The procedural planning theory of A*. Faludi, Planning Outlook, 22:2, 72-76, DOI: 10.1080/00320717908711582.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun (2007) Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang. No. 1 Tahun (2014) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2014) Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun (2014) Tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

UNESCO. (2018). *MSP World Application: Overview*. http://msp.ioc-unesco.org/world-applications/overview/. Diakses tanggal 1 November 2018.

Yurista A.P. & D.A. Wicaksono. (2017). Kompatibilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Rzwp3k) Sebagai Rencana Tata Ruang Yang Integratif. *Rechts Vinding*, Vo. 6 No. 2. ISSN: 2089-9009.

WCED. (1987). *Our Common Future*. United Nation

Wheeler, S. (2004). *Planning for Sustainability: Creating Livable, Equitable, and Ecological Communities*. Routledge. London.

ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Stakeholders Analysis of Sustainable Coastal Zone Management in the Gunungkidul Regency

***Riesti Triyanti[1] dan Indah Susilowati[2]**

[1]Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia

Diterima tanggal: 28 Nopember 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 April 2019
Disetujui terbit: 26 Juni 2019

ABSTRAK

Pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan memerlukan peran dan dukungan seluruh *stakeholders.* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kepentingan, dan pengaruh *stakeholders* dalam pengelolaan kawasan pesisir Gunungkidul, serta merumuskan strategi untuk pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan alat bantu kuesioner dan wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April-Juli 2018; sedangkan pengolahan data menggunakan *software Mactor* dan dianalisis menggunakan analisis *stakeholders*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul melibatkan tiga pemangku kepentingan kunci, enam pemangku kepentingan utama, dan tiga pemangku kepentingan pendukung, yang bertindak sebagai koordinator, fasilitator, dan pelaksana. Pemetaan *stakeholders* menunjukkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir sebagai subyek, pemain, aktor, dan penonton. Strategi untuk mengoptimalkan pengaturan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan diperlukan melalui peningkatan kolaborasi dan kerja sama antara subyek dan pemain yang memiliki tingkat kekuasaan dan kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Hal ini dapat terwujud melalui peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam perwujudan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan. Strategi pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat melindungi sumber daya alam dan jasa lingkungan, memperhatikan kualitas lingkungan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: pemangku kepentingan; pengelolaan pesisir berkelanjutan; Gunungkidul

ABSTRACT

Sustainable management of coastal area requires a role and support from all stakeholders. The aims of this study are to analyze the role, interest, and influence of stakeholders in the coastal zone management of Gunungkidul, as well as to formulate sustainable coastal management strategies. The research used quantitative and qualitative methods with questionnaires and in-depth interview. Data were collected from April to July 2018; processed by Mactor software and analysed using stakeholder analysis. The results showed that coastal management of Gunungkidul Regency involved three key stakeholders, six primary stakeholders, and three supporting stakeholders as a coordinator, facilitator, and implementer. Mapping stakeholders shows the categories of stakeholders involved in the management of coastal zones as subjects, players, actors, and spectator. Therefore, strategies are necessary to optimize stakeholder arrangements in realizing sustainable coastal area management through increasing collaboration and cooperation between subjects and players who have a level high of power and interest in coastal management policies. The sustainable coastal area management policies can be realized through effective collaboration and cooperation between government and community. The strategies must also involve all related parties to protect natural resources and environment, to concern with environment quality, and it increase the income of coastal communities.

Keywords: stakeholders; management; coastal; berkelanjutan; Gunungkidul

**Korespodensi Penulis:*
email: triyanti.riesti@gmail.com
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam dan jasa wilayah pesisir dan laut diperkirakan akan semakin meningkat di masa-masa mendatang dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Ada dua alasan pokok yang mendukung kecenderungan di atas. Pertama, pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun (BPS, 2017), maka pada tahun 2020 penduduk Indonesia akan rnencapai 271 juta jiwa dan tahun 2035 akan menembus 300 juta jiwa (Bappenas, 2013), menyebabkan meningkatnya perrnintaan terhadap kebutuhan sumber daya alam dan jasa lingkungan pesisir dan laut. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam di darat semakin berkurang dan tidak lagi mencukupi.

Kedua,Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*archipelagic state*), dengan luas laut 6,4 juta km^2, jumlah pulau yang mencapai kurang lebih 17.504 pulau, dan garis pantaisepanjang 108.000 km; memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat besar (BIG, 2018). Besarnya potensi fisik ekosistem pesisir, menyimpan fungsi pokok bagi kehidupan manusia, diantaranya sebagai penyedia sumber daya alam hayati dan non hayati (perikanan, terumbu karang, rumput laut, mineral, bahan tambang, dan gas alam), penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan (air bersih, dan ruang) dan penyedia jasa-jasa kenyamanan (pariwisata bahari) (Marcos, Torres, López-Capel & Pérez-Ruzafa, 2015).

Perikanan sebagai penyedia sumber daya hayati ekosistem pesisir, memberikan kontribusi dalam perekonomian bangsa. Menurut laporan FAO (2014) dalam *The State of Wold Fisheries and Aquaculture,* produksi perikanan tangkap dan budidaya di Indonesia pada tahun 2012 sebagai peringkat kedua di dunia. Tingkat produksi perikanan tangkap selama tahun 2011-2012 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,7%, sedangkan persentase sumbangan terhadap produksi perikanan budidaya di dunia sebesar 27,40%. Kondisi ini memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar di dunia. Kenaikan rata-rata PDB perikanan tahun 2012-2016 yaitu 5,83% lebih tinggi dari rata-rata kenaikan PDB nasional tahun 2012-2016 yang hanya 4,83%. Keadaan ini menunjukkan terjadi peningkatan yang baik pada sektor perikanan, sehingga dapat diperhitungkan sebagai salah satu prioritas oleh para pembuat kebijakan.

Selain potensi hayati dari sektor perikanan, jasa kenyamanan dan keindahan ekosistem pesisir dari sektor pariwisata juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Secara makro, kondisi kepariwisataan nasional mengalami peningkatan dari tahun 2010-2016. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 8,4% dibandingkan tahun 2015, peningkatan kontribusi sekitar 91,6%, dan peningkatan devisa mencapai Rp176 -184 Triliun. Namun, kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap persentase dari total PDB menunjukkan angka relatif stabil dikisaran angka 4 persen (KEMENPAR, 2017).

Kontribusi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyumbang produksi perikanan tangkap Indonesia masih sangat rendah, sebesar 0,06% (KKP, 2016). Kecilnya kontribusi ini dikarenakan dominasi nelayan skala kecil dengan karakteristik wilayah pesisir pantai selatan Jawa yang merupakan perairan terbuka (*open sea*) dengan *horizon* pantainya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia (Mustafa & Yudhicara, 2015), sehingga hanya nelayan yang mempunyai *skill* kuat yang mampu melaut. Namun, sebanyak 1.980 rumah tangga perikanan di Provinsi DIY menggantungkan hidupnya sebagai nelayan sehingga memerlukan perhatian yang serius. Produksi perikanan tangkap di perairan pantai selatan Provinsi D.I. Yogyakarta didominasi oleh Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2015 produksi ikan laut di Kabupaten Gunungkidul sebesar 3.103,40 ton dan nilai produksi sebesar Rp44.762.568.000 (BPS, 2016).

Wilayah pesisir DIY sebagian besar telah dikembangkan dan diperuntukkan bagi pengembangan wisata pantai (Yuliadi, 2013). Perkembangan sektor pariwisata di wilayah pesisir DIY tercermin dalam kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara). Pada lima tahun terakhir 2012-2016 tercatat rata-rata wisatawan yang berkunjung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 18%. Pada tahun 2016, kunjungan wisatawan di kabupaten pesisir DIY secara berurutan didominasi oleh Kabupaten Bantul (52%), Kabupaten Gunungkidul (35%), dan Kabupaten Kulon Progo (13%) (Dinas Pariwisata Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017).

Pemanfaatan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul untuk kegiatan pariwisata tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016-2021. Berdasarkan RPJMD tersebut, maka pemanfaatan kawasan pesisir untuk pariwisata berorientasi pada kepentingan ekonomi (peningkatan PAD). Peningkatan jumlah wisatawan di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul memberikan dampak negatif bagi lingkungan, yaitu meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas yang ada di kawasan pesisir. Belum adanya penataan ruang yang baik dalam hal sarana prasarana dan zonasi antara kegiatan wisata dan perikanan juga menjadi permasalahan di Kawasan Pesisir Gunungkidul. Permasalahan ini pada akhirnya menimbulkan konflik antara pengelola kawasan wisata dan nelayan. Konflik di pesisir terjadi pada aspek sosial dan ekonomi (Brown & Raymond, 2013).

Untuk itu perlu dilakukan analisis pemangku kepentingan sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi individu, kelompok dan organisasi yang dipengaruhi atau dapat memengaruhi lingkungan dan generasi yang akan datang serta memprioritaskan individu-individu dan kelompokuntuk terlibat dalam proses pengambilankeputusan (Reed *et al.,* 2009). Analisis terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders analysis*) menjadi suatu hal pentingsebagai metodologi untuk memperoleh pemahaman atas sebuah sistem dan untuk menilai dampak perubahan pada sistem tersebut, juga sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan pemangku kepentingan kunci tersebut (Kivits, 2011). Penggunaan *software mactor* digunakan untuk mengukur keseimbangan kekuasaan antara aktor dan mempelajari konvergensi dan divergensi mereka ketika dihadapkan dengan sejumlah taruhan dan tujuan terkait. Melalui analisis *stakeholders*, *software Mactor* dapat membantu dalam membuat keputusan sehingga para aktor dapat menerapkan kebijakan aliansi dan konflik mereka (Godet, 2006). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran, kepentingan, pengaruh, dan harapandari para pemangku kepentingan sebagai bahan untuk merumuskan strategi pengaturan kepentingan dalam pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan di Kabupaten Gunungkiduluntuk mewujudkan kebijakan ekonomi hijau.

Pengumpulan data primer dan sekunder untuk penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juli 2018. Lokasi penelitian berada di enam kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di pesisir Baron, Drini, Gesing, Ngrenehan, Siung dan Ngandong. Lokasi penelitian merupakan pusat pengembangan kegiatan ekonomi (perikanan dan pariwisata) di kawasan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul. Urutan lokasi penelitian berdasarkan tingkat pemanfaatan kawasan pesisir pantai dari yang tinggi hingga yang rendah yang diacu dari RT/ RW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030. Pemanfaatan kawasan pesisir Baron, Drini, Gesing, dan Ngrenehan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata, kawasan pesisir Siung untuk kegiatan perikanan dan wisata minat khusus (panjat tebing), dan kawasan pesisir Ngandong hanya untuk kegiatan perikanan (Bappeda, 2011s).

Penelitian ini juga menggunakan 30 orang responden kunci (*key-persons*) untuk analisis *stakeholders* dan *indepth interview,* dengan teknik sampling menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kepakaran, ketokohan, pengetahuan, dan penguasaan terhadap aktivitas kelompoknya (Tabel 1). Wawancara mendalam dilakukan secara semi terbuka/semi terstruktur kepada *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul, meliputi isu,

Tabel 1. Sampel dan Teknik Sampling Penelitian.
Table 1. Sample and Research Sampling Technique.

Uraian/*Description*	Sampel (orang)/ *Sample* (*person*)	Teknik *sampling*/ *Sampling technique*
Bappeda/ *Agency of Regional Development Planning*	1	
Dinas Kelautan dan Perikanan/*Agency of Marine and Fisheries*	3	
Dinas Pariwisata/*Agency of Tourism*	3	
Dinas Lingkungan Hidup/*Agency of Environmental*	1	
Ketua Kelompok Usaha Bersama/KUB Nelayan/*Head of Fishers Group*	6	
Ketua Kelompok Sadar Wisata/*Head of Tourism Conscious Group*	6	
Sekretaris Desa/*Village Secretary* (Purwodadi, Sidoharjo, Banjarrejo, Kemadang, Kanigoro, Girikarto)	6	*Purposive sampling*
Pegawai Kecamatan/*Sub district employee* (Tepus,Tanjungsari, Saptosari, Panggang)	4	
Tokoh masyarakat/*Community leader*	2	
Total/*Amount*	**30**	

permasalahan, harapan, peran, kepentingan dan pengaruh *stakeholders.*

Ruang lingkup analisis *stakeholders* yaitu analisis pemangku kepentingan terhadap para aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir saat ini dan masa depan. Analisis pemangku kepentingan dilakukan mengikuti rangkaian analisis yang dilakukan oleh Reed *et al.* (2009) yang meliputi:

1) Identifikasi pemangku kepentingan.

Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya digunakan opini para ahli(*expert opinion*), *Focus Group Discussion* (FGD), *snowball sampling* dan seleksi berdasarkan data sekunder.Pemangku kepentingan yang teridentifikasi di kabupaten hingga masyarakat denganmengambil contoh di Kabupaten Gunungkidul dapat dikelompokkan menjadi: pemangku kepentingan utama, pemangku kepentingan kunci, dan pemangku kepentingan pendukung yang dikelompokkan berdasarkan pada konsep identifikasi pemangku kepentingan dari Kivits (2011) yang telah dimodifikasi dan telah digunakan oleh Nurfatriani *et al.* (2015) dalam analisis pemangku kepentingan.

2) Membuat pengelompokan dan pengategorian pemangku kepentingan,

Untuk mengklasifikasi dan mengategorikan pemangku kepentingan digunakan analisis kategorisasi yang mengklasifikasikan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh (Reed *et al.,* 2009). Metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan pemangku kepentingan adalah menggunakan matriks kepentingan pengaruh (*interest influence matrix*) berdasarkan kepentingan atau ketertarikan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Penilaian besarnya kepentingan dan pengaruh stakeholders menggunakan skala linkert, yaitu :

- Sangat tinggi (nilai 4)
- Kurang (nilai 1)
- Cukup (nilai 2)
- Tinggi (nilai 3)
- Rendah (nilai 0)

Jumlah nilai yang diperoleh oleh masing-masing *stakeholders* adalah poin untuk besarnya kepentingan dan pengaruh, setelah diketahui besarnya nilai kepentingan dan pengaruh, masing-masing *stakeholders* dipetakan ke dalam matriks kepentingan dan pengaruh dengan menggunakan *software mactor*.

3) Menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingan.

Untuk menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan digunakan metode *actor linkages matrices* yang menggunakan matriks berisi para pemangku kepentingan dalam tiap kolom dan barisnya dan hubungan antar pemangku kepentingan hasil identifikasi berupa konflik, pelengkap atau kerjasama.

Identifikasi *Stakeholders* dan Perannya dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul terdiri dari stakeholder kunci, utama (primer), dan pendukung (sekunder). Pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh peran *stakeholder* internal yaitu *stakeholder* primer dan kunci yang memiliki peran sebagai pelaksana, koordinator, implementator, pendamping dan fasilitator; sedangkan *stakeholders* eksternal mencakup *stakeholders* sekunder atau pendukung yang berperan sebagai fasilitator (Tabel 2).

Harapan *Stakeholders* dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir

Pemanfaatan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik yang khas dan tidak bisa di*generalisir* (Tabel 3). Pesisir pantai dengan pemanfaatan dari kegiatan perikanan lebih menonjol dari kegiatan pariwisata (Pantai Ngrenehan, Pantai Gesing, dan Pantai Siung) mempunyai *landing place* dan tambatan perahu, dan fasilitas ini tidak tersedia di semua pesisir pantai yang lain. Pengembangan pantai tipe ini sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang memasukkan dalam kelompok KSPI, pengelolaan untuk perikanan harus memperhatikan penataan tambatan perahu, peletakan alat tangkap, dan penanganan limbah ikan. Permasalahan di kawasan pesisir terjadi ketika pemanfaatan kegiatan perikanan dan pariwisata sama-sama tinggi (Pantai Baron dan Pantai Drini). Kedua pantai ini termasuk dalam kelompok KSP II. Namun, konflik ego sektoral, konflik antara masyarakat dan instansi dalam penguasaan lahan, konflik kepentingan antar instansi (Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Pariwisata), dan konflik sosial antar masyarakat yang pro dan kontra terhadap kegiatan pariwisata muncul di kawasan pesisir pantai ini.

Tabel 2. Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kabupaten Gunungkidul, 2018.
Table 2.Stakeholders of Coastal Area Management in Gunungkidul Regency, 2018.

No.	Pemangku kepentingan/ *Stakeholders*	Peranan/*Role*	Kategori Pemangku Kepentingan/ *Stakeholders Category*	Posisi/ *Position*
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan/ *Agency of Marine and Fisheries* (Kabupaten dan Provinsi/*Regency and Province*)	Otoritas daerah yang melindungi keutuhan wilayahnya, mengelola kelautan, sumberdaya ikan, dan wilayah pesisir, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan pemberdayaan kelompok nelayandalam penangkapan ikan/*Regional authorities that protect the integrity of their territory, managing maritime, fisheries, and coastal area, to improve the welfare of the local community and fishers group empowerment capture fisheries.*	Kunci/*Key*	Koordinator/ *coordinator*, implementator/ *implementator,* fasilitator/ f*acilitator*.
2.	Dinas Pariwisata/ *Agency of tourism* (Kabupaten/ *Regency)*	Otoritas daerah yang melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata, sarana pendukung wisata, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai- nilai budaya di wilayahnya, dan pemberdayaan pokdarwis dalam pengembangan pariwisata/Regional/*Regional authorities that provide guidance, management, and tourist objects and attractions development, tourism support facilities, fostering, preservation, and development of cultural values in their region, and empowering Pokdarwis in tourism / Regional development.*	Kunci/*Key*	Koordinator/ *coordinator*, implementator/ *implementator,* fasilitator/ f*acilitator*.
3.	Dinas Lingkungan Hidup/*Agencyof Environmental* (Kabupaten/ *Regency*)	Otoritas daerah yang melakukan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan, untuk melindungi keutuhan wilayahnya/ *Regional authorities that conduct environmental management, pollution control and environmental damage, restore environmental quality, environmental conservation, to protect the integrity of their territory.*	Kunci/*Key*	Fasilitator/ *facilitator*
4.	HNSI Gunungkidul/ *Association of Indonesian Fishers of Gunungkidul*	Lembaga yangmemfasilitasi antara kepentingan nelayan secara keseluruhan dengan stakeholder dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan/ *Institutions that facilitate the interests of fishers as a whole with stakeholders in an effort to improve the welfare of fishers.*	Pendukung/ *Support* (Sekunder/ *Secondary*)	Fasilitator/ *facilitator*
5.	Kelompok Usaha Bersama Nelayan/ *Fishers group*	Kelompok nelayan yang memiliki fungsi untuk membantu anggota nelayan dalam beraktivitas pada kegiatan perikanan tangkap bertujuan mensejahterakan anggota/*Groups of fishermen have a function to help fishermen members in their activities in fishing activities aimed at the welfare of members*.	Utama/*Main* (Primer/ *Primary*)	Fasilitator/ *facilitator*
6.	Kelompok Sadar W i s a t a / *T o u r i s m Conscious Group*	Lembaga masyarakat sebagaisalah satu "unsur penggerak"dalam mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif, serta memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya/*Community institutions as one of the "driving elements" in supporting the creation of a conducive environment and atmosphere, and having concern in developing tourism in the region.*	Utama/*Main* (Primer/ *Primary*)	Fasilitator/ *facilitator*

Lanjutan Tabel 2/*Continue Table 2*

No.	Pemangku kepentingan/ *Stakeholders*	Peranan/*Role*	Kategori Pemangku Kepentingan/ *Stakeholders Category*	Posisi/ *Position*
7.	Pemerintah Desa/ *Village Government*	Otoritas yang berwenang mengatur, melayani, dan mengelola hak dan kewajiban warga masyarakat di wilayah administrasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pesisir/*Authorities that are authorized to regulate, serve, and manage the rights and obligations of citizens in their administrative areas to improve the welfare of coastal village communities.*	Pendukung/ *Support* (Sekunder/ *Secondary*)	Fasilitator/ *facilitator*
8.	Tokoh Masyarakat/ *Community Elders*	Kelompok aktifitas masyarakat yang mengontrol ketaatan aturan dan kearifan lokal di lingkungan setempat/*Community activity groups that control the compliance of rules and local wisdom in the local environment.*	Pendukung/ *Support* (Sekunder/ *Secondary*)	Fasilitator/ *facilitator*
9.	Nelayan/*Fishers*	Orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan, serta pengetahuan untuk menjalankan operasional penangkapan ikan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya/*People who have the ability and skills, as well as knowledge to run fishing operations, to fulfill their daily needs.*	Utama/*Main* (Primer/ *Primary*)	Pelaksana/ *manager*
10.	Pedagang/*Traders*	Kelompok yang menjual segala sesuatu di kawasan pesisir pantai (*seafood*, ikan segar, *snack* dan minuman, *souvenir*/oleh-oleh)/*A group that sells everything in the coastal area (seafood, fresh fish, snacks and drinks, souvenirs).*	Utama/*Main* (Primer/ *Primary*)	Pelaksana/ *manager*
11.	Pelaku wisata/*Tourist actors*	Kelompok yang memiliki usaha jasa wisata seperti penyewaan tikar, payung, alat snorkeling, pelampung, kano, perahu, dan juru potret di pantai/*Groups that have tourism services businesses such as renting mats, umbrellas, snorkeling equipment, buoys, canoes, boats and photographers on the beach.*	Utama/*Main* (Primer/ *Primary*)	Pelaksana/ *manager*
12.	Masyarakat pesisir lokal/*Local coastal community*	Kelompok masyarakat pada berbagai golongan (usia belum produktif, usia produktif, dan usia tidak produktif) yang memiliki mata pencaharian diluar kegiatan di pesisir (petani, peternak, wiraswasta, pegawai swasta, buruh bangunan)/ *Community groups in various groups (non-productive age, productive age, and unproductive age) who have livelihoods outside activities on the coast (farmers, ranchers, entrepreneurs, private employees, construction workers).*	Utama/*Main* (Primer/ *Primary*)	Pelaksana/ *manager*

Tabel 3. Matriks Pemanfaatan Ekonomi Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul, 2018.
Table 3. Matrix of Economic Utilization of Coastal Area of Gunungkidul Regency, 2018.

Kegiatan Ekonomi/ *Economic activity*	Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul/ *Coastal Area of Gunungkidul Regency*					
	Baron	Drini	Ngrenehan	Gesing	Siung	Ngandong
Perikanan/*Fisheries*	+++	+++	+++	+++	++	+
Pariwisata/*Tourism*	+++	+++	+	+	+	++

Keterangan/*Remarks*: (pemanfaatan ekonomi/*economic utilization* +: sedikit/*little*, ++: cukup besar/*big enough*, +++: sangat besar/ *very big*)

Stakeholders yang posisinya sebagai pelaksana dalam pengelolaan kawasan pesisir dan mengalami ketergantungan terhadap sumber daya pesisir dikelompokkan menjadi nelayan, pelaku wisata, pedagang, dan masyarakat pesisir yang menjadi petani, peternak, maupun yang berprofesi non kelautan dan perikanan. Di pesisir Pantai Baron, pelaku pariwisata merupakan pekerjaan sambilan selain menjadi nelayan. Saat waktu luang (tidak melaut), selain memperbaiki alat tangkap maupun perahu, nelayan merangkap sebagai pelaku pariwisata dengan menyewakan perahu untuk menyeberang dari pantai berpasir ke teluk Baron. Sedimen di teluk Baron dihasilkan dari pengendapan di muara sungai bawah tanah. Usaha pariwisata khususnya ojek perahu, dirangkap oleh beberapa nelayan, sedangkan penyewaan tikar, payung, alat snorkeling, pelampung, dan juru potret di pantai dilakukan oleh masyarakat pesisir lainnya. Hasil wawancara dengan masing-masing *stakeholder* terlihat bahwa harapan *stakeholders* antara perikanan dan pariwisata diharapkan berjalan beriringan, pemerintah diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir dengan cara sosialisasi rencana/program pengelolaan pesisir ke depan, menjalin komunikasi yang *intens* dengan masyarakat pesisir, dan penyadaran masyarakat agar bersama-sama dengan pemerintah untuk mengelola kawasan pesisir. Pada akhir tahun 2014 hingga tahun 2015 terjadi demo oleh nelayan dan pedagang ikan di Pantai Baron terhadap Ketua Forum Komunikasi Pokdarwis se-Kabupaten Gunungkidul. Konflik tersebut terkait dengan revitalisasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Samodra di Pesisir Pantai Baron.

Di Pesisir Pantai Baron terjadi limitasi kawasan yang hanya dapat menampung maksimal 60 unit perahu untuk ditambatkan dan terjadi abrasi pantai. Jika tempat labuh dan TPI dipindah ke lokasi lain (Pantai Ngluwen), karakteristik pantai tidak sama dengan di pesisir pantai Baron (perahu dapat hancur terkena ombak), selain itu pedagang ikan yang menjual hasil tangkapan nelayan tidak dapat menjual ikan yang segar dan memerlukan tambahan biaya transportasi untuk mengambil ikan, sehingga keuntungan yang mereka peroleh berkurang. Inti dari konflik tersebut adalah penataan ulang kawasan pesisir berdasarkan tata ruang yang ideal. Namun koordinasi dan sinkronisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Pariwisata masih sangat minim dan kurang melibatkan masyarakat pelaku usaha di pesisir.

Problem dan konflik yang cenderung terjadi akibat adanya *multiple management entities* adalah fragmentasi di dalam pengambilan keputusan, duplikasi/*overlapping* kewenangan (yuridiksi) adalah tidak efektif dan tidak efisien (Kumar, 2012). Adanya kontestasi sektoral sumber daya alam dan jasa lingkungan di kawasan pesisir dan laut ditandai dengan tumpang tindihnya regulasi, lemahnya sinergi, dan koordinasi masing-masing sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring (Mujio, Adrianto, Soewardi & Wardiatno, 2016). Campbell, Hoey, Maynard, Kartawijaya, Cinner, & Graham (2012) mengemukakan efektivitas pengelolaan kawasan pesisir sangat bergantung pada setiap *stakeholders* terkait untuk tunduk dan mematuhi aturan yang telah ada. Konflik kewenangan dan kepentingan yang berkepanjangan akan menghambat pencapaian tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan wilayah dan ekosistem pesisir (Irnawati, Simbolon, Wiryaman, Murdiyanto & Nurani, 2013; Tampubolon & Satria, 2013; Sukardjo & Pratiwi, 2015).

Wawancara mendalam dengan *stakeholders* terkait seperti dari Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Kelompok Nelayan, dan Kelompok Sadar Wisata, menunjukkan bahwa revitalisasi pesisir dilakukan dengan penataan kembali kawasan pantai salah satunya dengan menciptakan TPI higienis yang melibatkan seluruh masyarakat pesisir, sehingga keberadaan TPI tetap dipertahankan karena sudah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan dan RZWP3K Provinsi D.I. Yogyakarta. Daya tarik Pantai Baron dan Drini terhadap kunjungan wisatawan terkait kuliner *seafood* dengan ikannya yang segar, yang tidak dijumpai di pantai lain. Jadi pengembangan sektor pariwisata harus sejalan dengan pengembangan sektor perikanan. Koordinasi Dinas Pariwisata sdan Dinas Kelautan dan Perikanan dari awal penyusunan konsep program hingga saat pelaksanaan program sangat diperlukan, juga pendekatan secara kontinu kepada masyarakat. Penataan kembali kawasan pesisir harus diimbangi dengan edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur perikanan, dan pembagian zona yang jelas antara perikanan dan pariwisata.

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul (2016) menunjukkan perkembangan jumlah nelayan di Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuatif periode tahun 2008-2015 (Gambar 1). Jumlah nelayan di

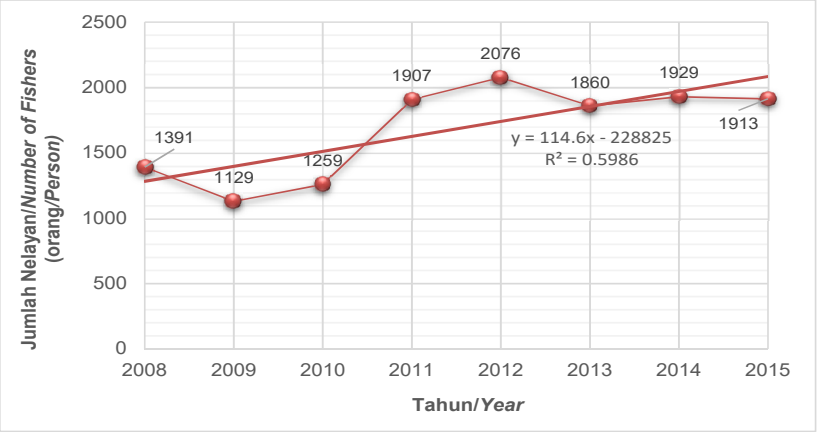

Gambar 1. Jumlah Nelayan di Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul, 2008-2015.
Figure 1. Number of Fishers in The Coastal Area of Gunungkidul Regency, 2008-2015.

Kabupaten Gunungkidul tertinggi pada tahun 2012 sebesar 2.076 orang, didominasi oleh nelayan yang menangkap lobster, dengan produksi mencapai 88,27 ton (DKP Kabupaten Gunungkidul, 2012).

Untuk sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, terjadi peningkatan usaha dan sarana pendukung pariwisata periode 2010-2017 (Dinas Pariwisata Provinsi D.I. Yogyakarta, 2011-2017), seperti pada Gambar 2. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 1.010 unit, karena semakin bertambah daya tarik wisata yang disajikan. Jenis usaha pariwisata yang ada seperti usaha perjalanan wisata, jumlah restaurant, dan jumlah rumah makan yang dibina, sedangkan untuk sarana pendukung pariwisata, meliputi: pramuwisata, gedung pertemuan, industri kerajinan, atraksi budaya/kesenian, dan desa wisata.Jumlah anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 sebesar 1.938 orang dengan daya tarik wisata meliputi wisata pesisir maupun desa wisata, sedangkan 63% diantaranya merupakan anggota Pokdarwis dari wisata pesisir (Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2017).

Pemetaan *Stakeholders* Berdasarkan Kepentingan dan Pengaruh dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir

Kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) dari setiap *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul yang beragam perlu dipetakan dengan jelas. Pemetaan *stakeholder* akan membantu pengelola bagaimana melibatkan *stakeholder* tersebut dalam pencapaian tujuan (Reed *et al.,* 2009). Matriks kepentingan dan pengaruh merupakan bentuk visualisasi dari penilaian *interest* dan *power* yang telah dilakukan sebelumnya. Matriks kepentingan dan pengaruh

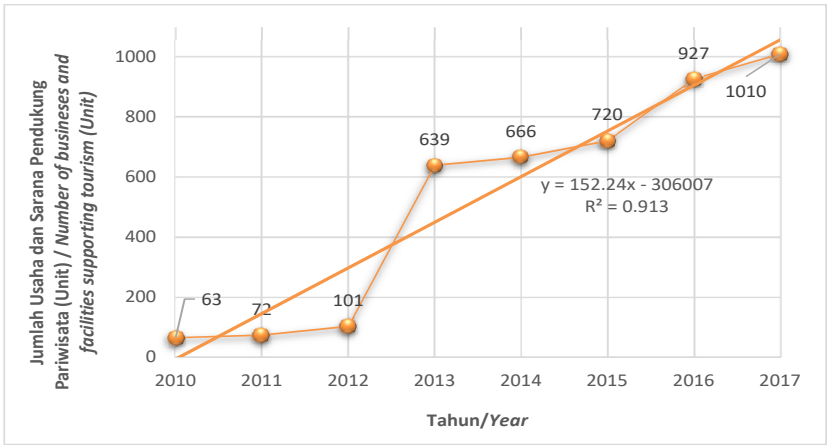

Gambar 2. Jumlah Usaha dan Sarana Pendukung Pariwisata di Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul, 2010-2017.
Figure 2. Number of Business and Supporting Facilities of Tourism in The Coastal Area of Gunungkidul Regency, 2010-2017.

dibagi menjadi 4 (empat) kuadran, yaitu: subyek, pemain kunci, pengikut lain, dan pendukung/ penonton, posisi dari masing-masing stakeholder akan dipetakan sesuai dengan hasil penilaian (Gambar 3).

Hasil pengelompokkan didapatkan kesimpulan masing-masing kuadran sebagai berikut:

a. Subyek (*Subjects*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Kelompok ini sebaiknya mendapatkan informasi terkait program supaya mereka tetap merasa puas (*satisfied*). Stakeholder pada kelompok ini harusdikelola sebagaimana mungkin supaya mereka tidak menghambat jalannya proyek.

b. Pemain Kunci (*Key Players*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Kelompok ini merupakan *stakeholder* yang biasanya terlibat di dalam aktivitas yang membutuhkan keputusan penting.

c. Pengikut Lain (*Actor*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Kelompok *stakeholders* yang selalu memberikan informasi mengenai perkembangan program atau kegiatan.

d. Pendukung/Penonton. *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi, namun memiliki dedikasi yang rendah dibandingkan kelompok yang lainnya.

Ada dua stakeholders yang mempunyai peran ganda atau pengaruh dan kepentingan yang tidak jelas (*multicollinearity*), yaitu KUB dan Pokdarwis. Kedua *stakeholders* ini berfungsi sebagai wadah/kumpulan para masyarakat pesisir yang memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan laut yaitu nelayan/pelaku wisata/ pedagang, jadi selain menjadi wadah, *stakeholders* ini terdiri dari masyarakat pesisir itu sendiri, yang mempunyai kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan kawasan pesisir.

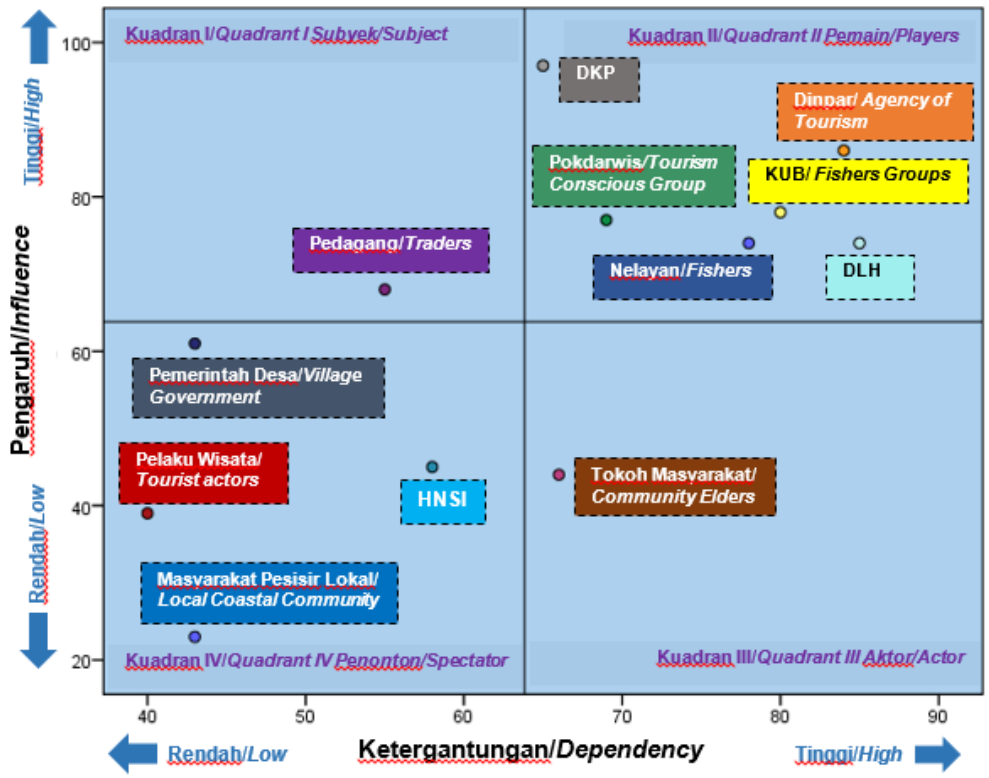

Gambar 3. Peta Prioritas Stakeholders Berdasarkan Tingkat Ketergantungan dan Pengaruh Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul.

Figure 3. Map of Stakeholders' Priorities Based on Level of Dependence and Influence in The Management of The Coastal Area of Gunungkidul Regency, 2018.

Keterangan/ *Remarks*: DKP: Dinas Kelautan dan Perikanan/ *Agency of Marine and Fisheries*; Dinpar: Dinas Pariwisata/ *Agency of tourism*; DLH: Dinas Lingkungan Hidup/ *Agency of Environmental*; HNSI: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia/ *Association of Indonesian Fishers of Gunungkidul.*

Hasil analisis pada Gambar 3, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, KUB, Nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Pokdarwis pada posisi sebagai pemain kunci (*key players*) yang memiliki kekuasaan dan kepentingan yang tinggi. DKP Kabupaten Gunungkidul dan DKP Provinsi D.I. Yogyakarta mendapatkan mandat untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan yang dikomando oleh KKP. Pada kondisi operasionalnya, pengelolaan perikanan di Kabupaten Gunungkidul juga melibatkan KUB dan nelayan untuk berbagi peran menjalankan kegiatannya. Selain itu, Dinas Pariwisata juga diberikan mandat untuk mengelola jasa lingkungan pesisir secara berkelanjutan, yang dikomando oleh Kepala Daerah (Bupati). Pada kondisi operasionalnya, pengelolaan jasa lingkungan pesisir dibantu oleh Pokdarwis. Untuk menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem yang baik, maka Dinas LH diberikan mandat untuk pengelolaan lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan.

Tokoh masyarakat berada pada posisi sebagai aktor (*actor*), yang memiliki tingkat kepentingan/ketergantungan tinggi dan pengaruh yang rendah terhadap pengelolaan kawasan pesisir agar kawasan pesisir dapat dinikmati oleh anak cucu mereka kelak. Pada posisi yang paling rendah (penonton/*spectator*) karena lebih bersifat pelaksana, bukan pengambil kebijakan memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. *Stakeholders* yang terlibat yaitu: HNSI, pelaku wisata, dan masyarakat pesisir lokal. Pada posisi subyek (*subject*) yang memiliki ketergantungan rendah dan pengaruh yang tinggi, pedagang dan pemerintah desa adalah pihak yang mendukung pengelolaan kawasan pesisir, dan menduduki posisi ini. Pelaksanaan pengelolaan kawasan pesisir terlihat dari peran beberapa *stakeholders* belum optimal dalam pengelolaan. Bryson (2003) mengatakan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam diakibatkan oleh tidak optimalnya peran *stakeholders* dalam menentukan kebijakan.

Strategi Pengelolaan *Stakeholders* yang berperan di Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul

Strategi pengelolaan disusun dalam rangka pencapaian tujuan pengelolaan. Strategi pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul harus dapat melindungi sumber daya alam dan jasa lingkungan, memperhatikan kualitas lingkungan pesisir, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Bellido, Anfuso, Plomaritis & Rangel-Buitrago. (2011) menjelaskan bahwa rencana strategis kebijakan memuat instrumen aturan main dan perangkat pengelolaan input, output, dan kontrol yang disusun berdasarkan analisis risiko terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Strategi pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Strategi *Stakeholders* dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.
Table 4. Strategy of Stakeholders in Coastal Area Management of Gunungkidul Regency, 2018.

Posisi/ *Position*	Pemangku Kepentingan/ *Stakeholders*	Strategi/ *Strategy*
Koordinator dan Implementor/ *Coordinator and Implementor*	• Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul/ *Agency of Marine and Fisheries fo Gunungkidul Regency* • Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul/ *Agency of tourism of Gunungkidul Regency*	• Penentuan kebijakan pengelolaan pesisir yang terintegrasi antar sektor/ *Determination of integrated coastal management policies between sectors*; • Sosialisasi program dan kegiatan pemanfaatan pesisir kepada masyarakat/ *Socialization of coastal utilization programs and activities to the community;* • Evaluasi anggaran dengan mempertimbangkan kepentingan ekologi, bukan hanya ekonomi/ *Budget evaluation taking into account ecological interests, not just economics;* • Mengintensifkan kegiatan pembinaan usaha produksi perikanan yg kompetitif/ *Intensifying activities to foster competitive fisheries production businesses;* • Penataan ruang dan pengadaan sarana prasana pesisir untuk dermaga/ tempat tambat perahu, pasar ikan higienis, warung makan, gazebo, toko souvenir, jasa wisata bahari, dan tempat parkir/*Spatial planning and procurement of coastal infrastructure for docks / boat moorings, hygienic fish markets, food stalls, gazebos, souvenir shops, marine tourism services, and parking lots*; • Pemberian pinjaman lunak untuk nelayan dan pelaku wisata/*Giving soft loans to fishers and tourism actors;* • Pengembangan ekowisata pesisir/*Development of coastal ecotourism.*

Lanjutan Tabel 3/*Continue Table 3*

Posisi/ *Position*	**Pemangku Kepentingan/ *Stakeholders***	**Strategi/ *Strategy***
Fasilitator/ *Facilitator*	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul/ *Agency of Environmental* • HNSI Gunungkidul/ *Association of Indonesian Fishers of Gunungkidul* • Kelompok Usaha Bersama Nelayan/ *Fishers Group* • Kelompok Sadar Wisata/ *Tourism Conscious Group* • Pemerintah Desa/ *Village Government* • Tokoh Masyarakat/ *Community Elders*	• Menyusun standar emisi buangan ke laut/*Arrange emissions standards into the sea;* • Mengadakan program kampanye kebersihan lingkungan pantai /*Conduct a campaign program on coastal environment cleanliness;* • Mengembangkan bank sampah untuk pemilahan dan pengolahan sampah maupun limbah pesisir/*Developing waste banks for sorting and processing waste and coastal waste;* • Mengembangkan program penanggulangan erosi pantai secara terpadu/ *Develop integrated coastal erosion prevention programs*; • Meningkatkan *skill* nelayan melalui pelatihan atau magang di kapal/ *Improve fishers skills through training or on-board internships*; • Melestarikan kearifan lokal di kawasan pesisir/*Preserving local wisdom in the coastal area*;; • Memberdayakan masyarakat pesisir lokal untuk turut serta menjaga kawasan pesisir/*Empower local coastal communities to participate in maintaining the coastal area;*
Pelaksana/ *Manager*	• Nelayan/*Fishers* • Pedagang/*Traders* • Pelaku Wisata/ *Tourist actors* • Masyarakat pesisir lokal/*Local coastal community*	• Meningkatkan *skill* menangkap ikan lewat nelayan andon/*Improve the skill of catching fish through andon fishers;* • Mengajarkan keahlian dan keterampilan melaut kepada anak cucunya (regenerasi)/*Teaching expertise and skills to go to sea to his children and grandchildren (regeneration);* • Menjaga standar harga barang yang dijual untuk seluruh kawasan/ *Maintain the standard price of goods sold for the entire region;* • Menjaga mutu ikan dan barang yang dijual lainnya/*Maintain the quality of fish and other goods sold;* • Mengembangkan diversifikasi barang yang dijual di kawasan pesisir/ *Develop diversification of goods sold in coastal areas;* • Mengembangkan wahana ekowisata yang ditawarkan untuk pengunjung pesisir/*Develop a vehicle for ecotourism offered to coastal visitors;* • Menjaga kebersihan dan keindahan kawasan pesisir/*Maintain the cleanliness and beauty of the coastal area.*

PENUTUP

Identifikasi para pihak menunjukkan terdapat 12 pihak yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul. Kedua belas *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 6 *stakeholders* primer, 3 *stakeholders* kunci, dan 3 *stakeholders* sekunder. Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul merupakan *stakeholders* kunci yang memiliki peran penting dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul yang mengintegrasikan sektor perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan. Ketiga *stakeholders* kunci memiliki peran sebagai *motor* untuk menekan konflik yang terjadi di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul.

Kepentingan dan pengaruh *stakeholders* berdasarkan pemetaan prioritas menunjukkan nilai hak, tanggungjawab, dan manfaat *stakeholders* menurun sejalan dengan semakin rendahnya tin gkat kepentingan dan pengaruh. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki ordinat tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh yang sedang (97:65) melaksanakan peran dan tanggungjawab untuk mengelola kawasan pesisir yang lestari dengan menitikberatkan pada keberlanjutan sumber daya alam, sedangkan Dinas Pariwisata yang memiliki ordinat tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh yang tinggi (86:84) seharusnya melaksanakan peran dan tanggungjawab yang seimbang antara kepentingan ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan kawasan pesisir Strategi pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan harus melibatkan seluruh *stakeholders* yang terlibat yang dapat melindungi sumber daya alam dan jasa lingkungan, memperhatikan kualitas lingkungan pesisir, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir

Kebijakan pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul secara berkelanjutan memerlukan partisipasi dan peran aktif masyarakat pesisir sebagai pemanfaat langsung sumberdaya alam di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan partisipasif dapat dipergunakan untuk mendorong masyarakat untuk sampai pada tahap bersedia terlibat dan bersedia mencoba lalu memelihara hasilnya. Pemerintah sebagai *stakeholders* kunci harus melakukan sosialisasi rencana program dan kegiatan yang dilakukan untuk pemanfaatan kawasan pesisir. Analisis daya dukung lingkungan, penyusunan AMDAL, dan penataan wilayah dengan pengalokasian lahan pesisir untuk berbagai peruntukan secara proporsional, sesuai dengan tingkat kesesuaiannya diperlukan dengan mengintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul dengan mempertimbangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi D.I. Yogyakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan yang tinggi kami sampaikan pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, BRSDMKP atas dukungan sumber dana sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara berkesinambungan. Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada responden dan narasumber yang dengan sukarela *sharing* informasi terkait pengelolaan kawasan pesisir dengan sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2016). Provinsi D.I. *Yogyakarta dalam angka 2015*. BPS D.I.Y. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. (2017). *Kabupaten Gunungkidul dalam angka 2016*. BPS Kabupaten Gunungkidul. Wonosari.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030. Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Wonosari.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). *Proyeksi penduduk Indonesia 2020-2035*. Bappenas-BPS-UNFPA. Jakarta.

Badan Informasi Geospasial. (2018). *Rujukan nasional data kewilayahan Indonesia.* BIG. Bogor.

Bellido, C., Anfuso, G., Plomaritis, T.A. & Rangel-Buitrago, N. (2011). Morphodynamic behaviour, disturbance depth and longshore transport at Camposoto Beach (Cadiz, SW Spain). *Journal of Costal Research*, SI 64: 35-39.

Bryson, J.M. (2003). *What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. A paper presented at the National Public Management Research Conference, 9-11 October 2003, The Georgetown University Public Policy Institute, Washington, D.C.

Brown, G & Raymond, C.M. (2013). *Methods for identifying land use conflict potential using participatory mapping*. *Landscape dan Urban Planning. 2455: 13-26.*

Campbell, S.J., Hoey, A.S., Maynard, J. Kartawijaya, T., Cinner, J. & Graham, N.A.J. (2012). Weak compliance undermines the success of no-take zones in a large government-controlled marine protected area. PLoS ONE 7(11).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. (2016). *Statistik Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2015*. DKP Kabupaten Gunungkidul. Wonosari.

Dinas Pariwisata Provinsi D.I. Yogyakarta. (2017). *Statistik Kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2017*. Dinas Pariwisata Provinsi D.I.Y. Yogyakarta.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. (2017). Data Kelompok Sadar Wisata Tahun 2017. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Wonosari.

Food and Agriculture Organization. (2014). *The state of world fisheries and aquaculture*. FAO. Rome. pp 223.

Godet, M., (2006). *Creating Futures Scenario Planning as a Strategic Management Tool, Preface* by J. F. Coates, Economica, Paris.

Hermans, L.M. & W.A.H Thissen. 2009. Actor analysis methods and their use for public policy analysts. *European Journal of Operational Research, 196: 808-818.*

Irnawati, R., Simbolon, D., Wiryaman, B., Murdiyanto, & Nurani, T.W. (2013). Teknik interpretative structural modeling untuk strategi implementasi model pengelolaan perikanan tangkap di taman nasional Karimunjawa. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*. Vol. 2(1): 75-86.

Kementerian Pariwisata. (2017). *Statistik pariwisata tahun 2017*. Kemenpar. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). *Kelautan dan Perikanan dalam angka 2016*. DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Kivits, R.A. (2011). Three component stakeholder analysis. *International Journal of Multiple Research Approaches*. Vol. 5 (3): 318-333.

Kumar, P. (Ed.). (2012). *The economics of ecosystems and biodiversity: ecological and economic foundations*. London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Marcos, C., Torres, I., López-Capel, A. & Pérez-Ruzafa, A. (2015). Long term evolution of fisheries in a coastal lagoon related to changes in lagoon ecology and human pressures. *Reviews in Fish Biology and Fisheries, 25(4), 689–713*.

Mujio, Adrianto, L. Soewardi, K. & Wardiatno, Y. (2016). Analisis potensi konflik pemanfaatan ruang kawasan pesisir: integrasi rencana tata ruang darat dan perairan pesisir. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan.* Vol. 4(2): 139-144.

Mustafa, M.A., & Yudhicara. (2015). Karakteristik pantai dan resiko tsunami di kawasan pantai selatan Yogyakarta. *Jurnal Geologi Kelautan*. Vol. 5 (3): 159-167.

Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D.R. & Yustika, A.E. (2015). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Trasnformasi Kebijakan Fiskal Hijau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan.* Vol. 12 (2): 105-124.

Reed, M.S., Graves, C.M. Dandy, N., Posthumus, H. Hubacek, K. Morris, J., Prelle, C. Quinn, C.H. & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environment Management. Vol. 90 (5): 1943-1949*.

Sukardjo, S. & Pratiwi, R. (2015). Coastal zone space in indonesia: prelude to conflict?. *International Journal of Development Research.* Vol. 5, Issue. 01: 2992-3012.

Tampubolon, F.L. & Satria, A. (2013). Relationship between Fishers in Jepara and Karimunjawa to Use Fisheries Resource in Karimunjawa Nasional Park. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 1 (3),200-205.*

Thompson, M.C., Baruah, M. & Edward, R.C. (2011). Seeing REDD+ as a project of environmental governance. *Environmental Science & Policy*. Vol. 14 (2): 100-110.

Triyanti, R & Susilowati, I. 2018. Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir Menuju Ekonomi Hijau di Kabupaten Gunungkidul, Indonesia. Thesis. Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang.

Yuliadi, I. (2013). Pembangunan masyarakat pesisir selatan: masalah dan tantangannya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan.* Vol. 14 (2), Desember 2013: 172-179.

EVALUASI HASIL PELATIHAN *GOOD MANUFACTURING PRACTICES* (GMP) UNTUK PEREMPUAN PESISIR: ANALISIS KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF

Training Results Evaluation on Good Manufacturing Practices (GMP) for the Coastal Women: A Subjective Well-being Analysis

***Zuzy Anna[1], Rahmahwati Rosidah[1], Armida S. Alisjahbana[2] dan Robi Andoyo[3]**

[1]Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
[3]Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran

Diterima tanggal: 7 Nopember 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 April 2019
Disetujui terbit: 26 Juni 2019

ABSTRAK

Sektor perikanan tangkap adalah sektor yang memberikan kontibusi yang cukup besar bagi perikanan Indonesia. Sektor ini diharapkan bisa menjadi peranan strategis bagi pembangunan perikanan Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah peningkatan hasil perikanan tangkap. Indramayu merupakan daerah dengan hasil perikanan tangkap yang memberikan kontribusi sebesar 60% dari perikananan tangkap Jawa Barat, menjadikan Indramayu sebagai daerah dengan tingkat kontribusi produksi perikanan terbesar diantara daerah-daerah lainnya. Produksi dari aktivitas perikanan ini didapatkan rata-rata sebesar 2500 ton dengan nilai rata-rata 30 miliar perbulan. Nilai ini akan lebih meningkat dengan adanya aktivitas pengolahan menjadi suatu produk. Untuk mendapatkan hasil produk perikanan yang bernilai tinggi, diperlukan suatu upaya salah satunya adalah dengan praktik manufaktur yang baik atau *good manufacturing practice (GMP)*. Universitas Padjadjaran melalui program pelatihan *GMP* Eretan telah melakukan pelatihan *GMP* dari tahun 2013-2015. Sebagai evaluasi, analisis kesejahteraan dilakukan. Sejauh ini kesejahteraan dinilai secara objektif. Pada penelitian ini, kesejahteraan secara subjektif dianalisis untuk memberikan gambaran dari perspektiv individu responden dengan analisis kesejahteraan subjektif dan regresi logistik untuk mengetahui faktor lain yang berpengaruh. Hasilnya kesejahteraan subjektif di pesisir Indramayu bisa meningkat dengan adanya pelatihan *GMP* dimana responden yang mendapatkan pelatihan *GMP* meningkat kesejahteraan subjektifnya dibandingkan dengan sebelum adanya pelatihan.

Kata Kunci: kesejahteraan subjektif; perempuan pesisir; GMP; non-GMP; evaluasi

ABSTRACT

Capture fisheries give significant contribution to Indonesian fisheries. This sector is expected to be a strategic role in Indonesia fisheries development. One of the strategies is increasing capture fisheries products. Indramayu is an area with capture fisheries products which contributes 60% of West Java capture fisheries, therefore, Indramayu has the most significant contribution to fisheries production among other regions. Average production of this sector is 2500 tons with average value of 30 billion per month. This value will increase with the fisheries processing product actitivites. Good Manufacturing Practice (GMP) is one of effort to obtain high-value fishery products. Padjadjaran University has conducted GMP Eretan training from 2013 to 2015. There is an evaluation to analyzed the welfare of the community. So far, welfare has been assessed objectively. In this study, subjective welfare was analyzed to provide an overview of individual respondents' perspectives with subjective welfare analysis and logistic regression to determine other influential factors. As a result, subjective welfare on the coastal area of Indramayu can be increased with GMP training. It means that respondents with GMP training have increased subjective welfare compared with before training.

Keywords: subjective well-being; coastal women; GMP; non-GMP

**Korespodensi Penulis:*
email: suzyanna18@gmail.com
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan potensi kekayaan laut yang cukup besar. Hal ini menjadikan sektor perikanan Indonesia dinilai memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Sektor perikanan ini diharapkan dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi banyak orang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, sektor perikanan harus menjadi perhatian banyak pihak.

Salah satu sektor perikanan yang potensial adalah perikanan tangkap. Di Kabupaten Indramayu, hasil perikanan tangkap dapat memberikan kontribusi sebesar 60% dari perikananan tangkap Jawa Barat yang menjadikan Indramayu sebagai daerah dengan tingkat kontribusi produksi perikanan terbesar diantara daerah-daerah lainnya di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat. Produksi perikanan tangkap tersebut ditopang oleh peran nelayan di dalamnya. Kabupaten Indramayu memiliki mayoritas masyarakat dengan mata pencaharian sebagai nelayan dimana sebagian besar hasil tangkapan didominasi oleh ikan-ikan seperti pepetek, manyung, bawal hitam, selar, tembang, lemuru, kakap merah, kembung, tenggiri, tongkol, dan biota lainnya seperti cumi-cumi, kepiting, dan rajungan.

Aktivitas perikanan tangkap di Indramayu selama ini merupakan tempat bergantungnya kehidupan para nelayan. Produksi dari aktivitas perikanan ini didapatkan rata-rata sebesar 2500 ton dengan nilai rata-rata 30 miliar perbulan. Nilai ini akan lebih meningkat dengan adanya aktivitas pengolahan menjadi suatu produk. Untuk mendapatkan hasil produk perikanan yang bernilai tinggi, diperlukan suatu upaya salah satunya adalah dengan praktik manufaktur yang baik atau *good manufacturing practice* (GMP).

Universitas Padjadjaran melalui program pelatihan GMP Eretan telah melakukan pelatihan GMP dari tahun 2013-2015. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat pesisir dalam berinovasi menciptakan produk perikanan yang berkualitas dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Sebagai bentuk lanjut dari program ini, evaluasi dilakukan dalam bentuk riset untuk mengetahui seberapa besar dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir Indramayu yang dilakukan pada bulan Agustus-September 2018 bertempat di desa Karangsong dan Eretan Wetan. Kedua desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa-desa tersebut merupakan desa dengan kontribusi yang besar terhadap perikanan tangkap di Indramayu. Selain itu, Desa Eretan Wetan merupakan desa yang telah mendapatkan penyuluhan GMP. Sebagai pembanding, Desa Karangsong dipilih sebagai desa yang tidak mendapatkan pelatihan GMP.

Evaluasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan kesejahteraan subjektif. Sejauh ini, kesejahteraan ditentukan secara objektif yaitu berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat pemerintah sementara penilaian secara subjektif jarang dilakukan. Analisis kesejahteraan subjektif atau *subjective well-being (SWB)* dilakukan sebagai metode evaluasi kesejahteraan individual secara subjektif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kesejahteraan subjektif masyarakat pesisir yang mendapatkan pelatihan dan yang tidak serta mengetahui faktor sosial dan ekonomi apakah yang mempengaruhi kesejahteraan tersebut sehingga diharapkan dapat menjadi masukan bagi program-program selanjutnya.

Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala likerts 1-4 dimana skor 4 untuk jawaban sangat puas, skor 3 untuk jawaban puas, skor 2 untuk jawaban tidak puas, dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak puas. Untuk mengetahui hubungan variabel sosial ekonomi dalam kesejahteraan subjektif, regresi logistik digunakan dalam penelitian ini.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil survey, Desa Karangsong merupakan desa yang memilliki produksi perikanan yang paling dominan di Indramayu. Armada penangkapan di PPI Karangsong terdiri dari dua jenis yaitu kapal motor dan motor tempel. Biasanya motor tempel dipakai oleh nelayan arad. Armada penangkapan yang berukuran 29 GT-30 GT biasanya sudah dilengkapi dengan freezer untuk menjaga kesegaran dan kualitas ikan, hal ini dikarenakan lama operasi penangkapan yang berkisar 30-45 hari. Kapal tersebut merupakan kapal dengan alat tangkat jaring insang dan *purse seine*, tetapi jaring insang merupakan alat tangkap yang sering digunakan. Hasil tangkapan dilaporkan ke tempat pelelangan ikan

(TPI) dan kemudian dilelang. Mayoritas ikan di Desa Karangsong dijual pada pedagang besar, sebagian pada pedagang kecil, dan sangat jarang digunakan untuk proses pengolahan.

Berbeda halnya dengan Desa Karangsong, nelayan Desa Eretan Wetan rata-rata memiliki nelayan dengan ukuran kapal <10 GT. Hasil tangkapan dijual ke pedagang atau diproses lebih lanjut untuk pengolahan. Terdapat 8 industri rumah tangga yang memproduksi hasil perikanan seperti bakso ikan, terasi ikan, terasi udang, dan kerupuk. Dua industri rumah tangga menerapkan *GMP* dan beberapa dari sisanya memiliki pegawai yang telah mendapatkan pelatihan *GMP*.

Demografi responden pada kedua desa dianalisis untuk mengetahui gambaran daerah tersebut. Demografi responden disajikan pada Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4.

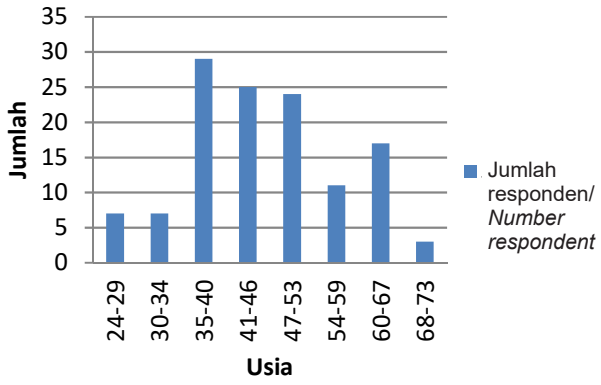

Gambar 1. Demografi Responden Berdasarkan Usia.
Figure 1. Respondents Demographics By Age.

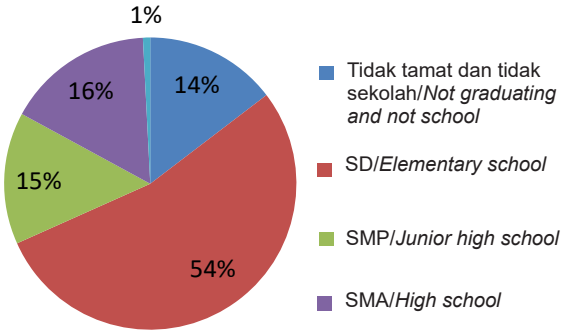

Gambar 2. Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan.
Figure 2. Demographics of Respondents Based on Education.

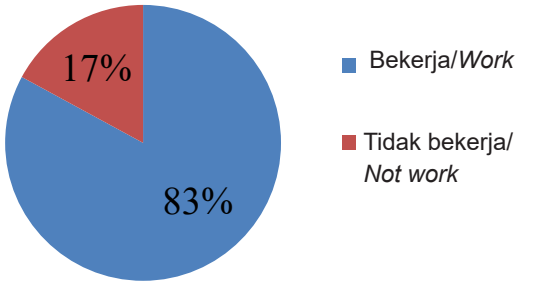

Gambar 3. Demografi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan.
Figure 3. Demographics of Respondents by Job. Status

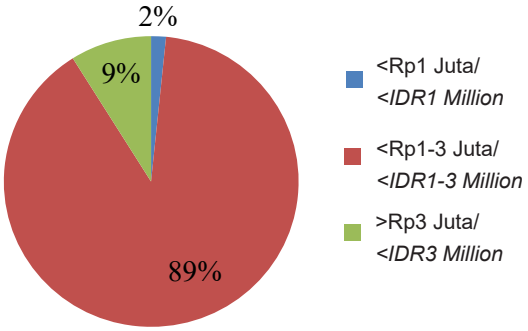

Gambar 4. Demografi Responden Berdasarkan Pendapatan.
Figure 4. Demographics of Respondents Based on Income.

HASIL EVALUASI KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner, nilai rata-rata keseluruhan (μ) didapatkan sebesar 3.25. Nilai ini menjadi patokan penentuan kategori kesejahteraan subjektif baik tinggi atau rendah. Tabel kategori penentuan kesejahteraan subjektif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Penentuan Kesejahteraan Subjektif.
Table 1. Subjective Well-being Determination Category.

Variabel/ *Variable*	Kriteria/ *Criteria*	Kategori/ *Category*
Kesejahteraan Subjektif/ *Subjective Well-being*	$\bar{x} \geq 3.25$	Tinggi *(High)*
	$\bar{x} < 3.25$	Rendah *(Low)*

Agar evaluasi dari program pelatihan *GMP* Eretan lebih terlihat, maka kesejahteraan subjektif sebelum dan setelah dilakukan pelatihan *GMP* di analisis. Kesejahteraan subjektif perempuan pesisir sebelum *GMP* disajikan pada Gambar 5 dan sebagai pembanding, kesejahteraan subjektif perempuan pesisir setelah *GMP* disajikan pada Gambar 6.

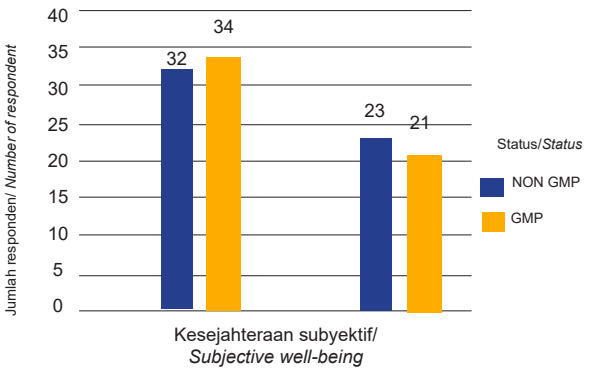

Gambar 5. Grafik Jumlah Perempuan Pesisir Sebelum GMP pada Setiap Kategori.
Figure 5. Graph of The Number of Coastal Women Before GMP in Each Category.

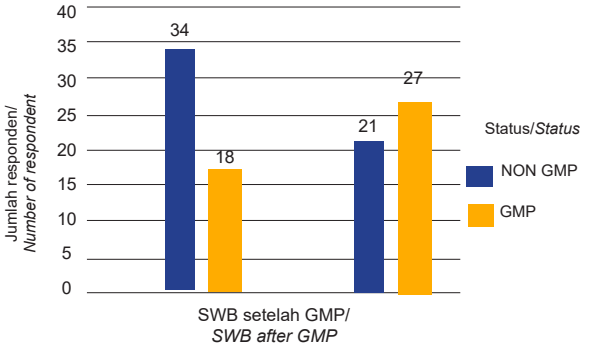

Gambar 6. Grafik Jumlah Perempuan Pesisir Setelah GMP pada setiap Kategori.
Figure 6. Graph of the Number of Coastal Women After GMP in Each Category.

Untuk mengetahui hubungan variabel sosial ekonomi dalam kesejahteraan subjektif, regresi logistik digunakan. Hasil analisis ini disajikan pada Tabel 2.

ANALISIS DEMOGRAFI RESPONDEN

Berdasarkan Gambar 1 responden terbanyak berada pada kelompok umur 35-40 dengan responden termuda berusia 24 tahun. Kelompok umur kedua terbesar berada pada rentang 41-46 tahun dengan jumlah 25 orang. Dilihat dari data tersebut usia pernikahan di kedua desa berdasarkan data responden sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun untuk perempuan. Beberapa responden di Eretan Wetan mengatakan bahwa pernikahan di bawah umur jarang terjadi, tetapi hal tersebut masih terjadi di desa Karangsong. Responden di Eretan Wetan mengatakan bahwa mulai banyak generasi muda yang sadar akan pendidikan mereka. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di desa Karangsong. Menurut responden banyak terjadi pernikahan dibawah umur karena angka kehamilan di luar nikah yang cukup tinggi.

Pendidikan merupakan bagian untuk menunjang pekerjaan seseorang. Variabel ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan di suatu daerah karena variabel ini berkaitan dengan variabel lainnya. Dilihat dari gambar 2, mayoritas responden memiliki pendidikan SD yaitu 54% dari total responden.

Tabel 2. Hasil Regresi Logistik.
Table 2. Logistic Regression Results.

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1[a]	Usia/*Age*	.036	.042	.746	1	.388	1.037
	Pendidikan/*Education*	-.592	.420	1.985	1	.159	.553
	Lama Pendidikan/ *Length of education*	.306	.123	6.236	1	.013	1.358
	Pekerjaan/*Occupation*	-2.869	2.431	1.393	1	.238	.057
	Usia Suami/*Spouse's Age*	-.063	.044	2.030	1	.154	.939
	Pengalaman Bekerja/ *Work Experience*	.023	.022	1.091	1	.296	1.023
	Jumlah Tanggungan/ *Number of Liabilities*	.227	.106	4.573	1	.032	1.255
	Pendapatan/*Income*	.263	.174	2.286	1	.131	1.301
	Pendapatan Suami/ *Spouse's Income*	-.789	.453	3.035	1	.082	.454
	Constant	9.297	6.788	1.876	1	.171	10904.074

a. *Variable (s) entered on step 1*: Usia/*Age*, Pendidikan/*Education*, Lama Pendidikan /*Length of Education*, Pekerjaan/*Occupation*, Usia Suami/*Spouse's age*, Pengalaman Bekerja/*Work Experience*, Jumlah Tanggungan/*Number of Liabilities*, Pendapatan Istri/ *Income Wife*, Pendapatan Suami/*Spouse's Income*.

Kondisi rendahnya pendidikan akan mempengaruhi pekerjaan dari perempuan pesisir. Gambar 3 merupakan demografi responden berdasarkan status pekerjaan. Persentase responden terbesar yaitu 83% memiliki pekerjaan dan sisanya yaitu 17% tidak bekerja. Mayoritas jenis pekerjaan di kedua desa adalah pedagang. Responden mengakatakan bahwa pendidikan mereka tidak bisa mengantarkan mereka untuk bekerja pada sektor formal. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak cukup memiliki *skill* untuk bekerja di pabrik atau perusahaan lainnya.

Pengetahuan mereka dan jenis pekerjaan akan mempengaruhi pendapatan perempuan pesisir. Demografi responden berdasarkan pendapatan (Gambar 4) didapatkan bahwa mayoritas responden memiliki pendapatan terbanyak pada rentang 1-3 juta yaitu 89%. Responden tersebut tidak bekerja pada sektor formal atau terikat dengan perusahaan melainkan bekerja sebagai pedagang. Rendahnya pendidikan mengakibatkan responden kesulitan untuk berkarir dan bekerja di perusahaan maupun institusi pemerintah. Pendapatan tersebut tidak tetap setiap bulannya sehingga dilihat dari penghasilan tersebut keuangan keluarga masyarakat pesisir sangat tidak stabil. Dalam rumah tangga, ekonomi dalam keluarga dipengaruhi oleh penghasilan. Rumah tangga dengan penghasilan ganda cenderung memiliki ekonomi yang stabil.

ANALISIS KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF

Analisis kesejahteraan subjektif diukur melalui dua aspek yaitu kognitif dan afektif. Komponen kognitif merupakan evaluasi individu berdasarkan pengalamannya. Pada komponen ini, individu memberi penilaian atas yang terjadi pada hidupnya dengan menggunakan pemikirannya. Hal tersebut berbeda dengan komponen afektif yang lebih merupakan luapan emosi dalam hidupnya. Komponen afektif menurut (Prawitasari, 2011) adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk menyeimbangkan diri dalam rangka menikmati hidup. Komponen menyenangkan diri dipengaruhi oleh keseimbangan penilaian individu terhadap mood dan emosi yang sering dirasakan dalam hidup. Perasaan *(feeling)* dan emosi *(emotion)* merupakan bagian integral dari pengalaman manusia. Istilah perasaan mengarah pada macam-macam emosi dalam aktivitas keseharian. Afek adalah gabungan dari mood dan emosi.

Berdasarkan Gambar 1, perempuan pesisir dominan berada pada kategori kesejahteraan subjektif rendah. Sebelum adanya *GMP* jumlah responden yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi adalah 40% dari total responden dan sisanya masuk kedalam kategori kesejahteraan rendah. Perbandingan antara responden *GMP* dan non *GMP* pada kategori rendah dan tinggi hampir mencapai 1:1. Hal ini menandakan tidak ada perbedaan antara kedua status responden.

Berdasarkan Gambar 2, SWB perempuan pesisir yang mendapat pelatihan *GMP* meningkat dibandingkan sebelumnya sementara SWB perempuan pesisir yang tidak mendapatkan pelatihan *GMP* relatif sama. Hal ini menandakan pelatihan *GMP* memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan subjektif perempuan pesisir.

Pelatihan *GMP* (*Good Manufacturing Practices*) Eretan yang diadakan oleh Universitas Padjadjaran. Pelatihan tersebut membantu masyarakat pesisir untuk meningkatkan kualitas hasil pengolahan ikan mereka. Adanya pelatihan ini membuat perempuan pesisir Eretan dapat melakukan aktivitas pengolahan antara lain: pembuatan kerupuk ikan, kerupuk kulit ikan, bakso ikan, dan olahan lainnya. Pelatihan ini belum diberikan pada masyarakat pesisir Karangsong dan beberapa responden menyatakan bahwa belum banyak produk olahan di wilayah Karangsong sehingga pelatihan ini sebenarnya sangat mereka butuhkan.

Sebelumnya, perempuan pesisir Eretan tidak mengetahui mengenai pentingnya *GMP*. Mereka tidak memperhatikan sanitasi dan higienitas produk. Setelah adanya *GMP*, mereka mulai sadarakan pentingnya kualitas produk bagi konsumen. Produk yang sebelumnya dikemas secara tradisional mulai berubah menjadi produk yang dikemas lebih modern sehingga daya simpan produk menjadi lebih lama.

Pelatihan *GMP* bisa meningkatkan kualitas hidup perempuan pesisir karena dengan adanya pelatihan ini, diharapkan perempuan pesisir bisa mengisi aktivitas mereka dengan kegiatan ekonomi untuk menopang keluarga. Hal tersebut kedepannya akan membuat perempuan pesisir untuk memiliki makna hidup dan tujuan hidup. Diener & Scollon (2003) menyatakan tujuan hidup atau makna hidup merupakan hal yang penting bagi individu, dan membuat kemajuan terhadap tujuan yang penting untuk kesejahteraan subjektif.

Selain pelatihan *GMP* hal lain yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif adalah perempuan pesisir tidak puas dengan penghasilan mereka dan suami mereka terutama bagi perempuan yang tidak mendapatkan pelatihan. Pendapatan yang berkurang akan meningkatkan kerentanan kehidupan dengan mengurangi konsumsi baik pangan maupun non pangan. Hal tersebut berdampak pada anggota keluarganya terutama sang istri yang terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga dan bertahan serta mengatur kondisi ekonomi disaat – saat krisis (Anna, 2012). DFID (1999) juga menyebutkan bahwa indikator pendapatan dalam aset finansial termasuk arus keuangan dapat berkontribusi pada konsumsi maupun produksi. Kedua pendapat tersebut saling mendukung, pendapatan bagi nelayan merupakan penentu dalam mengoperasikan usahanya karena terkait dengan biaya operasional untuk melaut dan untuk menghidupi keluarganya (konsumsi) baik pangan maupun non pangan.

Pendapatan nelayan seringkali tidak menentu karena tergantung pada alam (musim) sehingga menyebabkan tingginya kerentanan kehidupan nelayan dan memerlukan mata pencaharian alternatif selain menangkap ikan di laut. Pendapatan nelayan tergantung pada jumlah ikan yang ditangkap karena awak dibayar persentase dari nilai tangkapan (Barrat & Edward, 2015). Hal tersebut menyebabkan peran istri dalam penstabil ekonomi sangat penting. Menurut Sihite (2007) pendapatan perempuan dalam rumah tangga merupakan upaya alternatif meningkatkan pendapatan keluarga. Keluarga nelayan di Pantura misalnya memiliki aktivitas pengolahan ikan yang dijalankan oleh para istri nelayan. Hal tersebut membuat peningkatan ekonomi rumah tangga nelayan

Selain itu, nelayan sangat sulit untuk mendapatkan modal. Hal ini sangat berdampak pada hasil penangkapan mereka. Jika hasil tangkapan mereka sedikit, tentu saja penghasilan akan berkurang dan hal ini akan berdampak pada istri nelayan sebagai pengatur keuangan rumah tangga. Menurut Anna (2012) yang dilakukan di Pantai Utara Jawa, menyebutkan bahwa bantuan keuangan dalam bentuk kredit mikro dari koperasi memiliki dampak yang lebih besar terhadap pendapatan istri nelayan jika dibandingkan dengan yang tidak menerima bantuan keuangan dari koperasi. Pendapat lain dari Al-Mamun & Mazumder (2015) mengenai dampak mikrokredit terhadap kemiskinan dengan studi kasus di Malaysia menyatakan bahwa mikrokredit dapat membantu mengurangi kemiskinan. Keluarga pesisir terutama nelayan merupakan segmen yang sangat rentan terhadap kemiskinan. Selain itu, nelayan sering hidup dalam kerawanan fisik dan ekonomi yang tinggi. Banyak nelayan terkena berbagai bahaya lingkungan, ekonomi dan sosial (Bene, 2009). Hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif perempuan pesisir.

Materi merupakan hal yang sensitif dalam keluarga. Biasanya uang atau ekonomi akan mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Keluarga akan memperoleh kebahagiaan apabila mempunyai uang yang cukup (Tati, 2004). Hal ini dapat terjadi karena keluarga membutuhkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Conger, Conger, & Martin (2010) juga menambahkan bahwa kelas sosial atau status sosial ekonomi keluarga akan berkaitan dengan kepuasan dan stabilitas dalam pernikahan.

Hasil regresi logistik dari data kesejahteraan subjektif diperoleh untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu variabel omnibus didapatkan nilai X^2 *goodness of fit test* sebesar 33,072 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5%, nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil sehingga mengindikasikan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Nilai Nagelkerke R^2didapatkan sebesar 0,461 yang berarti variabel Kesejahteraan Subjektif Nelayan saat ini dapat dijelaskan oleh variabilitas dari variabel sebesar 46,1%, sedangkan sisanya sebesar 53,9% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Ketepatan prediksi regresi logistik dalam penelitian ini sebesar 78,2%. Uji *chisquare* dilakukan untuk penelitian ini. Hasil uji *chisquare* menunjukan signifikan (nilai Sig > 0,05) sehingga probabilitas yang diprediksi sesuai dengan probabilitas yang diobservasi.

Hasil regresi logistik disajikan pada Tabel 4 menunjukan nilai negatif pada empat variabel yaitu pendidikan, pekerjaan, usia suami, dan pendapatan dari nilai B yang dihasilkan. Akan tetapi, seluruh variabel tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

Hasil regresi logistik tersebut menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel yang signifikan dan positif yaitu variabel lama pendidikan dan jumlah tanggungan. Berdasarkan hasil ini, usia

dari responden tidak mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Umur dan jenis kelamin berhubungan dengan kesejahteraan subjektif, namun efek tersebut juga kecil, dan tergantung kepada komponen mana dari Subjective Well-being yang diukur (Diener & Suh, 2005).

Nilai *odd ratio* (exp B) pada variabel lama pendidikan menunjukkan nilai sebesar 1,358. Hal tersebut artinya peluang peningkatan kesejahteraan subjektif meningkat 1,358 kali diikuti oleh peningkatan lama pendidikan. Menurut Sukirno (2004) pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Dilihat dari hal tersebut pengaruh pendidikan adalah kepala ekonomi. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh pendidikan. Ekonomi dan pengambilan keputusan merupakan bagian dari dimensi kepuasan hidup dan kemandirian tentunya variabel ini akan mempengaruhi kesejahteraan subjektif.

Variabel lain yaitu jumlah tanggungan memiliki *odd ratio* sebesar 1,255 artinya peluang kesejahteraan subjektif meningkat sebesar 1,255 kali seiring meningkatnya jumlah tanggungan. Pada dasarnya jumlah tanggungan ini berkaitan dengan penghasilan. Apabila pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan tanggungan dalam keluarga, kesejahteraan subjektif akan menurun karena kestabilan ekonomi dapat mempengaruhi kebahagiaan sebuah keluarga. Jumlah tanggungan keluarga yang bertambah membuat kebutuhan keluarga semakin meningkat pula.

Menurut Schramm (2007) pendidikan dan pendapatan yang rendah merupakan faktor yang menyebabkan stres dan kerenggangan dalam suatu hubungan dan Islam & Herbeck (2014), menyebutkan bahwa pendapatan merupakan indikator penting dari kapasitas adaptif. Namun, pada kasus perempuan pesisir ini, pendidikan dan pendapatan rendah memberikan efek negatif. Meskipun demikian, kedua hal tersebut berpengaruh pada lama pendidikan dan jumlah tanggungan dimana apabila jumlah tanggungan tinggi, sedangkan pendapatan rendah, kesejahteraan subjektif seseorang dapat terpengaruh. Ketahanan ekonomi dapat mengisi kesenjangan antara volatilitas ekonomi dan kerentanan ekonomi (Wang 2013) sehingga apabila ekonomi keluarga dapat bertahan, kerentanan ekonomipun tidak akan terjadi.

Diperlukan banyak biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dapat menjadi pendorong seseorang untuk bermigrasi untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang meningkat selanjutnya akan mempengaruhi status sosial dan mutu hidup rumah tangga (Refiani, 2006). Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian ini, pendapatan bukan masalah bagi responden. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa baik pendapatan istri maupun suami tidak memberi pengaruh signifikan pada kesejahteraan subjektif.

Faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif adalah lingkungan. Berdasarkan jawaban responden, perempuan nelayan di kedua desa mengatakan bahwa jarang terjadi konflik dengan tetangga. Saat tetangga memerlukan bantuan mereka misalnya pada saat terjadi pesta pernikahan di salah satu tetangga mereka wajib membantu dalam persiapan. Banyak diantara responden tersebut yaitu sebesar 60% memiliki aktivitas sosial misalnya mengikuti pengajian, aktif di PKK, ataupun posyandu. Persentase aktivitas mereka didapatkan bahwa 35% merupakan aktivitas untuk bekerja, 40% untuk aktivitas domestik, dan 25% untuk aktivitas sosial. Berdasarkan pendapat (Kasebir & Diener, 2008) kesejahteraan subjektif yang tinggi dipengaruhi kondisi kesehatan yang lebih baik, kinerja, hubungan sosial dan perilaku. Dengan demikian hubungan sosial dengan orang lain dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif perempuan pesisir..

PENUTUP

Kesimpulan penelitian yaitu kesejahteraan subjektif di pesisir Indramayu bisa meningkat dengan adanya pelatihan *GMP* dimana responden yang mendapatkan pelatihan *GMP* meningkat kesejahteraan subjektifnya dibandingkan dengan sebelum adanya pelatihan.

Faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif perempuan pesisir adalah variabel lama pendidikan dan jumlah tanggungan dengan nilai yang positif dan signifikan. Peningkatan kesejahteraan subjektif meningkat 1,358 kali diikuti oleh peningkatan lama pendidikan dan 1,255 kali seiring meningkatnya jumlah tanggungan. Jika dilihat dari hasil tersebut, jumlah tanggungan yang erat kaitannya dengan pengeluaran bukan menjadi masalah bagi masyarakat pesisir.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah, organisasi, dan Lembaga-

lembaga untuk memberikan pelatihan terkait dengan pengolahan dan pemberdayaan perempuan nelayan mengingat pendapatan memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan subjektif nelayan.

Pelatihan *GMP* menjadi suatu keniscayaan bagi pengembangan ekonomi perempuan nelayan yang usahanya berbasiskan pada industri pengolahan perikanan. Kemampuan dalam penguasaan *GMP* akan meningkatkan nilai usaha industri pengolahan perempuan nelayan, memberikan jaminan keamanan pangan dan juga lebih jauh lagi meningkatkan kesejahteraan subjektif mereka, terutama karena tingkat kepercayaan diri yang lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim PKM ALG Universitas Padjadjaran tahun 2018 yang telah membantu riset ini serta kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mendanai riset ini dalam bentuk PUPT.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mamun, A. & Mazumder, M.N.H. (2015). Impact of microcredit on income, poverty, and economic vulnerability in Peninsular Malaysia. *Development in Practice,* 25:3, pages 333-346.

Anna, Z. (2012). The Role of Fisherwomen in the Face of Fishing Uncertainties on the North Coast of Java, Indonesia. *Journal of Asian Fisheries Science*, Special Issue Publication Vol 25 S, P. 145-158.

Barrat, C. & Edward H.A. (2015). Vulnerable people, vulnerable resources? Exploring the relationship between people's vulnerability and the sustainability of community-managed natural resources. *Development Studies Research* 1:1, pages 16-27.

Bene, C. (2009). Are Fishers Poor or Vulnerable? Assessing Economic Vulnerability in Small-Scale Fishing Communities, *The Journal of Development Studies*, 45:6, 911-933, DOI: 10.1080/00220380 902807395.

Conger, R.D., K.J. Conger & M.J. Martin. (2010). Socioeconomic Status, Family Processes, and Individual Development. *Journal of Marriage and Family*, 72(3):685-704.

DFID (The Department for International Development). (1999). *Sustainable Livelihoods and Poverty Elimination*. Sustainable Livelihoods Support Office.

Diener, E. & Suh, E.M. (2005). *Culture and Subjective Well Being*. MIT Press.

Diener, E. & Scollon, S. (2003). *Subjective well-being is desireable, but not the summum bonus*. Artikel. http://www.tc.umn.edu. Tanggal akses: 5 Oktober 2018.

Islam, M.M. & J. Herbeck. (2013). Migration and Translocal Livelihoods of Coastal Small-scale Fishers in Bangladesh. *Journal of Development Studies 49:6*, pages 832-845.

Kasebir & *Diener,* E. (2008). Income inequality and happiness. *Journal of Psychological Science.*

Pemerintah Indonesia. (1974). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Prawitasari, J.E. (2011). *Psikologi Klinis Pengantar Terapan Mikro dan Makro*. Jakarta: Erlangga.

Refiani, E. (2006). Faktor Penyebab dan Dampak Migrasi Sirkuler di Daerah Asal (Kasus Desa Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Schramm, D.G. (2007). *Economic hardship, stressors, and marital quality among stepcouples: an examination of direct and indirect effect (Disseratation)*. Alabama: Auburn University.

Tati. (2004). *Pengaruh tekanan ekonomi keluarga, dukungan sosial dan kualitas pernikahan terhadap pengasuhan anak (Tesis)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesejahteraan, dan Keadilan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PT. Salemba.

Wang, C. (2013). *Reconsidering the economic vulnerability index of the United Nations*. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement 34:4, pages 553-568.

.

PENGEMBANGAN KOMODITAS RUMPUT LAUT NUSA TENGGARA BARAT DENGAN MODEL HEXAGON UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL

Development of Seaweed Commodities in West Nusa Tenggara Using the Hexagon Model for Local Economic Development

***Alfian Hidayat dan Purnami Safitri**

Universitas Mataram, Indonesia

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115, Indonesia

Diterima tanggal: 11 Desember 2018 Diterima setelah perbaikan: 28 Maret 2019

Disetujui terbit: 26 Juni 2019

ABSTRAK

Rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah NTB belum secara maksimal dikelola dengan baik. Potensi yang besar serta didukung dengan kultur masyarakat pesisir seharusnya mampu menjadikan komoditas rumput laut NTB berdaya saing tinggi. Kondisi permasalahan mendasar diatas kemudian menarik untuk diteliti dengan model Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai metode dalam melihat permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan PEL model Hexagon dengan melihat dalam 6 dimensi terkait yakni *target group, locational factors, policy focus and synergy, sustainability, governance serta planning*. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah Provinsi NTB sesungguhnya telah memulai program Pembangunan Ekonomi Lokal, namun belum optimal dalam beberapa program yang telah dilakukan mulai dari pemilihan kelompok target yang disesuaikan dengan kapasitas industrial daerah, penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas ekonomi, keberhadiran kebijakan dan regulasi yang bersiat *pro-environment* dan *pro-poor* untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, hingga pada upaya sinergisitas para *stakeholders* serta upaya monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: pembangunan ekonomi lokal (PEL); model hexagon; rumput laut NTB; daya saing

ABSTRACT

Seaweed, one of the competitive commodities in West Nusa Tenggara (NTB), has not been well governed. High potential value and coastal community culture are supposed to improve the competitiveness of the seaweed. Those conditions are the background of this research using Local Economic Development (LED) approach to describe the problems. LED has six dimensions of analysis; targeting group, location factors, policy focus and synergy, sustainability, governance and planning. This study found that NTB government has actually begun to implement LED dimension. However, there should be more optimal efforts to implement this program including selection of targeting group, development of infrastructure, pro-environment and pro-poor policy and regulation to support sustainable development, collaboration among stakeholders and monitoring and evaluation.

Keywords: local economic development; hexagonal model; seaweed; competitveness

PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi Lokal (*PEL*) atau *Local Economic Development* sesungguhnya bukanlah konsep baru dalam studi pembangunan. Namun wacana mengenai pembangunan ekonomi lokal semakin menguat berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap negara berkembang, terutama daerah *(local regions)*. Globalisasi dianggap menantang konsep-konsep lama mengenai pembangunan ekonomi lokal, dimana dampak globalisasi kerap beragam terhadap negara ataupun daerah-daerah lokal. Sayangnya dampak utama dari globalisasi ini adalah semakin menajamnya kesenjangan dan peningkatan kemiskinan.

Persoalan globalisasi dan kemiskinan bukanlah persoalan yang dapat diurai secara sederhana. Pada satu aspek, globalisasi memang dikritik karena dampak yang ditimbulkannya. Dampak negatif globalisasi bahkan menjadi perdebatan tersendiri dalam studi pembangunan maupun globalisasi. Namun disisi yang lain, globalisasi pada kenyataannya bukanlah suatu proses yang *sui generis* dan dampak kesejahteraan merupakan suatu hal yang pasti dan otomatis

*Korespodensi Penulis:
email: alfian.hidayat@unram.ac.id
Program Studi Hubungan Internasional (Konst.Ekonomi Politik), Universitas Mataram
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115, Indonesia

terjadi. Artinya, kemiskinan dan kesenjangan bukanlah suatu dampak yang pasti ditimbulkan oleh globalisasi. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan persoalan yang kompleks, terlebih jika dikaitkan dengan integrasi daerah atau regional dengan ekonomi global. Peningkatan kesenjangan dan kemiskinan di daerah dalam era globalisasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya saja kapasitas daya saing, kapasitas inovasi, kapasitas kebijakan publik, dan lain sebagainya.

Dalam rangka merevitaliasi berbagai potensi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah Provinsi NTB membuat terobosan baru melalui program-program unggulan, dalam rangka menjadikan provinsi NTB sebagai provinsi yang mampu merevitalisasi pertanian dengan baik, hal ini sejalan dengan program pemerintah nasional. Revitalisasi yang gencar dilakukan pemerintah NTB(BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013) adalah pada sektor pertanian dan perternakan dalam artian luas yang mencakup tiga komoditas unggulan yakni sapi, jangung, dan rumput laut atau dikenal dengan program "PIJAR". Program ini dalam (BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013) dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan adanya program PIJAR diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi daerah, serta mampu menurunkan tingkat kemiskinan.Dalam perspektif *LED*, peningkatan daya saing ataupun solusi pembangunan ekonomi harus didasarkan pada partisipasi dan sesuai dengan konteks lokalitas, baik kebutuhan, sumber daya maupun gagasan. Di Nusa Tenggara Barat, program *LED* mulai dikembangkan pada tahun 2012 yang merupakan program kerjasama antara pemerintah Jerman melalui badan kerjasama teknis *(Germany Technical Cooperation*-GTZ). Jalinan kerjasama ini mengarah pada pengembangan ekonomi lokal yang dikemas dalam *Regional Economic Development* (RED) di NTB (Antara, 2012). Basis utama GIZ-RED adalah merangkul mitra lokal dalam upaya pengembangan ekonomi daerah. Adapun tujuan GIZ-RED yakni memberi dukungan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik melalui penerapan standar administrasi dan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait desentralisasi pelayanan publik.

Dalam perspektif *LED*, peningkatan daya saing ataupun solusi pembangunan ekonomi harus didasarkan pada partisipasi dan sesuai dengan konteks lokalitas, baik kebutuhan, sumber daya maupun gagasan. Di Nusa Tenggara Barat, program *LED* mulai dikembangkan pada tahun 2012 yang merupakan program kerjasama antara pemerintah Jerman melalui badan kerjasama teknis *(Germany Technical Cooperation –GTZ*). Jalinan kerjasama ini mengarah pada pengembangan ekonomi lokal yang dikemas dalam *Regional Economic Development* (*RED*) di NTB.Basis utama *GIZ-RED* adalah merangkul mitra lokal dalam upaya pengembangan ekonomi daerah. Adapun tujuan *GIZ-RED* yakni memberi dukungan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik melalui penerapan standar administrasi dan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait desentralisasi pelayanan publik (Mataram AntaraNews, 2012).

Pemerintah NTB telah melakukan upaya *upgrading* guna meningkatkan daya saing komoditas rumput laut NTB. Beberapa bentuk *upgrading* yang dilakukan pemerintah NTB telah cukup baik namun masih belum mampu meningkatkan daya saing dikarenakan kendala kapabilitas kemampuan daerah. Lambannya *upgrading* juga menunjukkan bahwa peran pemerintah dinilai masih kurang dalam merealisasikan kebijakan pengembangan rumput laut. Kebijakan pengolahan rumput laut masih belum mengarah pada sektor indutri menengah, dan hanya sedkit dari persentase produksi yang berhasil ditingkatkanolehpemerintah NTB. Sedikitnya produk *upgrading* rumput laut yang secara kompetetif diluar pasar lokal menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan industri rumput laut masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan tidak meratanya akses pasar yang didapatkan oleh masing-masing pelaku pengolah rumput laut.

Dalam Hidayat & Safitri (2017) permasalahan utama pengembangkan komoditas unggulan rumput laut di NTB adalah masih minimnya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, rendahnya permodalan petani, serta terbatasnya kemitraan dalam pemasaran hasil. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya strategis dalam upaya mendorong peningkatan nilai tambah hasil serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat/petani yaitu dengan membangun sarana pengolahan hasil rumput laut (pasca panen), jalinan kemitraan antara petani dengan investor serta penyediaan pasar fisik komoditas rumput laut guna memperluas peluang pengembangan usaha rumput laut. *Pertama,* petani pembudidaya masih

menjadi aktor yang menerima *cash-flow*paling rendah dalam rantai perdagangan rumput laut. *Cash-flow* yang rendah pada petani tidak saja disebabkan karena kurangnya pemahaman petani mengenai standarisasi rumput laut basah dan teknik untuk memproduksi rumput laut yang baik, namun juga disebabkan oleh rantai perdagangan yang cukup panjang sehingga tidak terbentuk strukturrantai nilai yang bersifat *low-trust chain. Kedua,* daya saing yang rendah mengakibatkan pola relasi yang asimetris antara *buyer* dan produsen. Petani bergantung pada pasar ekspor dan lebih memilih menjual hasil budidaya mereka untuk pasar ekspor. Hal ini dikarenakan harga jual yang dinilai lebih tinggi dibandingkan harga jual di pasar domestik. Ketergantungan pada pasar luar negeri menyebabkan posisi petani yang rentan karena keterbatasan daya saing. *Ketiga,* masih rendahnya sinergisitas para aktor terutama birokrasi. Birokrasi rumput laut masih dapat dikatakan tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan terakhir, penyusunan peta jalan industrialisasi rumput laut masih bersifat sektor atau parsial. Hal ini tidak saja dilihat dari minimnya sinergisitas birokrasi, namun juga para *stakeholder* lainnya, serta sinergisitas kebijakan. Hal ini terlihat dari, misalnya upaya industrialisasi tidak diikuti dengan kebijakan harga, pembentukan *networking* atau jejaring global, dan efektifitas jejaring tingkat lokal yang meliputi pemerintah, petani, dan pedagang serta pelaku industri rumput laut.

Dari pemaparan mengenai rantai nilai rumput laut yang masih rendah dapat dilihat bahwadesentralisasi daerah merupakan suatu respon mengenai perlunya paradigma pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Sehingga persepektif PEL dengan model *HEXAGON* dapat digunakan untuk menganalisis dan menelaah pengembangan industri rumput laut di NTB. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjawab rumusan masalah, *Bagaimana pengembangan komoditas rumput laut NTB dalam model HEXAGON pembangunan ekonomi local (PEL)?.*

Metodologi dan Konsep *LED* (*Local Economic Development*)

Heksagon PEL (pembangunan Ekonomi Lokal) atau *LED*menurut (Mayer & Stamer, 2014) merupakan semacam alat didaktif. Tujuan model ini adalah menyusun dan sebagai pengingat isu-isu penting dalam proses pembangunan ekonomi lokal. Model heksagon terdiri dari enam segitiga dimana masing-masing segitiga berkaitan dengan isu tertentu. Meski demikian, keenam segitiga ini tidak diartikan sebagai suatu runtutan aktifitas, namun hanya bersifat penggolongan isu-isu esensial dalam *LED*. Segitiga pertama dan kedua (*target group* dan *locational factors)* disebut sebagai instrumen inti *LED*. Segitiga ketiga dan keempat *(policy focus and synergy* dan *sustanaibility)* merupakan inovasi dan perluasan cakupan dan perspektif *LED*yang disebut instrumen inovasi. Segitiga kelima dan keenam *(governance* dan *planning M+E)* mengenai isu-isu yang terkait dalam implementasi *LED* dan digolongkan sebagai segitiga koordinasi.

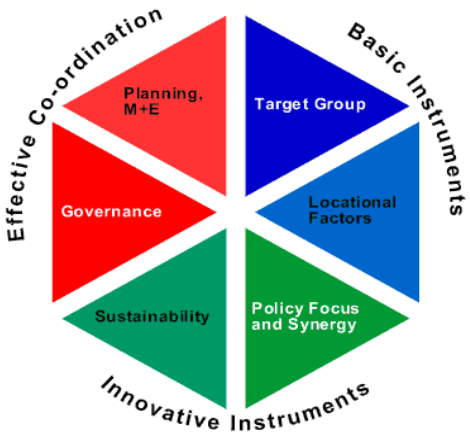

Gambar 1. PEL Model Hexagon.
Figure.1 LED Hexagon Models.

Model pengembangan PEL juga telah menjadi rekomendasi kebijakan di beberapa daerah di Indonesia. Publikasi (Saragih, 2012) yang berjudul "Model Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis Kopi Arabika Spesialti di Kabupaten Simalungun" menguraikan beberapa strategi peningkatan produktifitas kopi melalui rekomendasi model PEL. Argumen (Saragih, 2012) menyatakan bahwa, teori PEL mengungkapkan pentingnya kolaborasi berbagai sektor dalam upaya peningkatan produktifitas kopi.

Adapun tulisan ini merupakan analisa deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tulisan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiahSedangkan untuk memperdalam pada konteks analisis pembangunan ekonomi lokal, digunakan *indepth studi*. Mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga

menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut (Azwar, 2007).

Pengembangan melalui teknik pengumpulan data dan output data yang diperoleh. analisis data menggunakan metode *RALED* (*Rapid Assesment Techniques for Local Economic Development*), dengan *HexagonalPEL* yang dimaksudkan untuk mengidentikasi secara cepat faktor pengungkit dari setiap aspek/dimensi *PEL*/komponen dari Heksagonal *PEL*, yang meliputi 1). Kelompok Sasaran, 2). Faktor Lokasi, 3). Kesinergian dan Fokus Kebijakan, 4). Pembangunan Berkelanjutan, 5). Tata Pemerintahan, dan 6). Proses Manajemen.

Berikut adalah "model interaktif" yang digambarkan oleh Miles dan Huberman, *dalam* (Sugiyono, 2012).

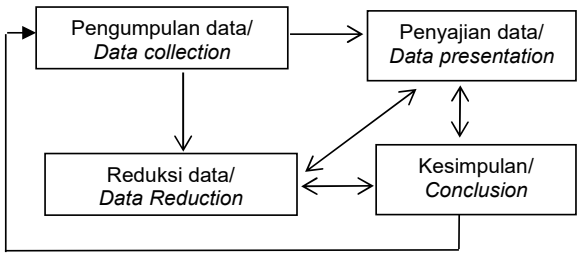

Gambar 2. Kerangka Analisa Data.
Figure.2 Data Analysis Framework.

Pada tulisan ini unit-unit yang dimaksud adalah sinergitas diantara aktor-aktor pemerintah dalam hal ini Pemprov. NTB (dinas terkait), masyarakat petani rumput laut dan masyarakat sekitar wilayah lumbung rumput laut dan swasta yakni industri pengolahan. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan tulisan ini dapat dicapai.

Pengembangan Rumput Laut NTB

Dengan kontur geografisnya, NTB memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selain sektor pertanian, pendapatan daerah wilayah ini juga ditopang oleh sektor pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Namun, pengembangan sektor kelautan dan perikanan untuk menjadi *prime mover* pembangunan ekonomi di NTB dipandang lebih tepat, mengingat potensi kelauatan yang dimiliki NTB juga melimpah. Potensi laut atau ekonomi perairan tidak saja didasarkan pada pertimbangan luasnya wilayah laut dan perairan yang dimiliki wilayah ini, namun juga provinsi NTB diberkahi oleh ekosistem perairan yang lengkap dan potensial bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan, misalnya saja NTB selain memiliki laut pelagis, juga memiliki laut demersal dengan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya akan terumbu karang, pada lamun dan mangrove. Tak kalah pentingnya, wilayah perairan laut NTB dapat dikatakan subur dan relatif bebas dari pencemaran.

Tantangan untuk membangun daerahnya secara mandiri, mendorong pemerintah daerah menciptakan program-program dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi unggulan daerahnya. Salah satu potensi unggulan yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi NTB adalah rumput laut yang dikembangkan melalui Program Pijar (Sapi, Jagung dan Rumput Laut). Ketiga komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan NTB.

Pengembangan rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan NTB tidak saja didasarkan pada aspek keunggulan wilayah namun juga sesuai dengan visi pembangunan nasional Presiden Jokowi tentang kedaulatan laut dan laut sebagai pilar masa depan Indonesia. Visi ini kemudian mendorong lahirnya strategi-strategi pengembangan dan pembangunan *blue economy* atau ekonomi maritim yang memanfaatkan potensi laut dan perairan Indonesia.

Revolusi Biru yang ditetapkan berkontribusi positif terhadap rencana pengembangan komoditas unggulan laut NTB, yakni rumput laut. NTB kemudian ditetapkan menjadi salah satu sentra atau minapolitan pengembangan dan budi daya rumput laut. Hingga pada tahun 2001, ada sekitar 10 minapolitan atau sentra budi daya rumput laut di NTB. Tidak berhenti pada kesepuluh minapolitian tersebut, pemerintah terus gencar melakukan penelitian dan penginderaan untuk memindai daerah-daerah lain yang dianggap potensial sebagai sentra pengembangan budi daya rumput laut. Pada tahun 2012, total potensi areal budi daya rumput laut NTB sekitar 25 ribu hektar, dan pada tahun 2014 bertambah menjadi sekitar 30 ribu hektar, meningkat lagi menjadi 35 ribu hektar pada tahun 2016. Namun, pemanfaatan potensi areal tersebut hanya berkisar 30 hingga 50 persen saja, yang dikonsenterasikan di 10 minapolitan dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini patut disayangkan karena perluasan wilayah potensi budi daya ini ditujukan untuk meningkatkan produktifitas rumput laut NTB.

Tabel 1 Luas Pemanfaatan Lahan Budi Daya Rumput Laut di 10 Minapolitan Tahun 2017.
Table1 Total Area of Seaweed Cultivation in 10 Minipolitan Areas, 2017.

Lokasi/ *Location*	Minapolitan/ *Minapolita area*	Potensi Luas Area (Ha)/*Potential area*	Pemanfaatan Area (Ha)/ *Area used*
Lombok Barat	Desa Pengantab	2.900	600
Lombok Tengah	Teluk Gerupuk	1.200	200
Lombok Timur	Teluk Ekas Teluk Sereweh Teluk Awang	2.000	1.600
Lombok Utara		120	0
Kota Mataram		0	0
Sumbawa	Labuhan Mapin Kec. Terano	14.757	2.300
Dompu	Kuangko	3.972	800
Bima	Wawaronda	3.253	2.000
Kota Bima		250	0
Sumbawa Barat	Desa Kerta Sari	1.550	400
Jumlah/*Total*		**30.002,00**	**7.900,00**

Dikutip dari (Tri Sukmanto, wawancara pribadi, 2012, Agustus 2) dalam pemanfaatan lahan budi daya yang masih jauh dari potensi, produksi rumput laut NTB tetap mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan produksi rumput laut NTB patutnya diapresiasi karena budi daya rumput laut telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kelompok nelayan pembudi daya rumput laut. Harga rumput laut yang stabil dan jumlah permintaan yang terus mengalami peningkatan, membuat komoditas rumput laut yang relatif menguntungkan bagi petani. Selain harga dan permintaan yang stabil, budi daya rumput laut juga tidak membutuhkan teknologi yang rumit, dan membutuhkan perawatan yang sederhana dan murah.

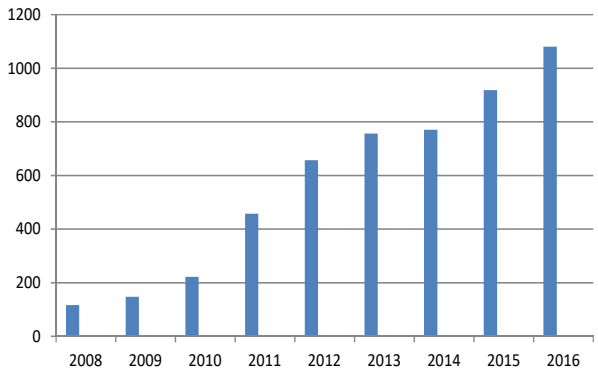

Gambar 3. Produktifitas Rumput Laut NTB 2008-2017.
Figure 3. The Number of NTB Seaweed Productivity in 2008-2017.

Data menunjukkan bahwa produksi rumput laut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan NTB misalnya, sejak tahun 2008 ada tren peningkatan produksi rumput laut NTB. Dari total produksi hanya mencapai 116 ton rumput laut basah menjadi 147 ton basah. Sejak pemerintah menetapkan Program Pijar pada tahun 2010, produksi rumput laut NTB meningkat hampir dua kali lipat, yakni mencapai hingga 221 ton dan sampai pada tahun 2016 peningkatan angka produk mencapai 1.037 ton.

Namun bertumpu hanya pada tingkat produksi dikhawatirkan akan membuat dampak ekonomi komoditas ini kurang berkesinambungan karena hanya terfokus pada kuantitas produksi, bukan diversifikasi atau proses penambahan nilai yang lebih menguntungkan bagi petani. Selama ini, Indonesia lebih menekankan pada aspek ekspor rumput laut mentah yang harganya sangat rendah dibandingkan dengan rumput laut yang telah berbentuk bubuk karaginan ataupun *flakes.* Ketiadaan kapasitas *upgrading* ini menyebabkan Indonesia secara umum dan NTB secara khusus berada pada rantai nilai yang paling rendah dalam struktur rantai nilai perdagangan global komoditas rumput laut. Dalam hemat penulis, keberlanjutan dampak dan manfaat komoditas rumput laut bertumpu pada kapasitas proses penambahan nilai atau *upgrading.* Ini berarti, baik Indonesia dan NTB yang menjadi fokus penelitian ini sepatutnya menginisiasi industrialisasi rumput laut. Namun demikian, industrialisasi rumput laut mensyaratkan banyak hal, misalnya saja akses terhadap kapasitas spesifik *upgrading* dan ketersediaan rente. Selain itu, juga diperlukan sinergi antara aktor yang terkait agar kebijakan sektor rumput laut bersifat integratif dan partisipatif. Ini artinya, pembangunan industrialisasi rumput laut haruslah disandarkan pada visi penguatan ekonomi lokal yang berbasis partisipasi komunitas dan nilai-nilai demokrasi. Pembangunan atau

industrialisasi rumput laut tidak boleh mengorbankan kelompok marjinal dan komunitas petani, dengan demikian industrialisasi yang diidentikkan dengan monopoli dan monokultur pembangunan mesti diganti dengan visi partisipatif, setara dan demokrasi dimana aktor utama pembangunan adalah masyarakat sendiri. Secara sederhana, penulis hendak mengungkapkan bahwa rencana industrialisasi regional rumput laut dapat diperinci melakui analisa Pembangunan Ekonomi Lokal Model Heksagon.

Hexagon Pembangunan Ekonomi Lokal Rumput Laut NTB

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, fokus utama dari perspektif *LED* adalah pembangunan yang bersifat partispatoris, berkelanjutan dan memiliki visi pengentasan kemiskinan. Ketiga aspek ini menuntut perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang memastikan partsipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan, pemanfaatan sumber daya lokal secara maksimal yang juga ditujukan untuk memaksimalkan kemandirian ekonomi masyarakat dan pada akhirnya, proses pembangunan itu melibatkan berbagai sektor terutama lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Dalam diagram heksagonal *LED*, ada enam segitiga yang dapat dijadikan sebagai petunjuk sinergitas pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Analisis penelitian ini akan berusaha mengurai konten-konten setiap segitiga agar didapatkan pemahaman mengenai sejauh mana implementasi *LED* dalam pembangunan sektor rumput laut di NTB.

1. Kelompok Target Pembangunan Ekonomi Lokal Sektor Rumput Laut.

Secara teoritis, kelompok target kebijakan pembangunan ekonomi terdiri dari tiga (3) bentuk kelompok, yakni kelompok investor eksternal, perusahaan lokal, dan perusahaan *start-up.* Target prioritas ini sangat bergantung dari situasi dan kondisi suatu daerah. Penetapan kelompok target dalam *LED* berkaitan dengan proses industrialisasi suatu daerah. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam bagian rantai nilai perdagangan rumput laut NTB, terlihat permasalahan utama dari sektor rumput laut NTB adalah lemahnya industrialisasi rumput laut, baik itu dalam skala nasional maupun regional. Selama ini, NTB hanya mampu melakukan ekspor rumput laut dalam bentuk rumput laut kering mentah. Hal inilah yang menyebabkan ketergantungan sektor rumput laut, baik secara nasional ataupun regional terhadap perdagangan luar negeri. Padahal, pembangunan industri rumput laut dalam negeri dapat memacu serapan lokal terhadap rumput laut dan juga memacu perdagangan rumput laut pada sektor rumput laut olahan yang memiliki rantai nilai lebih tinggi dibandingkan dengan rantai nilai perdagangan rumput laut mentah.

Sektor industri rumput laut di NTB sesungguhnya masih di dominasi oleh kelompok industri kecil dan menengah. Kelompok industri ini memproduksi berbagai varian produk yang berbahan dasar rumput laut, misalnya dodol, manisan, sabun dan produk kosmetik lainnya. Beberapa kelompok industri memproduksi produk kosmetik untuk keperluan industri spa dan perhotelan. Meski memiliki potensi yang cukup baik, namun kelompok industri kecil dan menengah atau UMKM memiliki berbagai keterbatasan. Pada aspek yang bernilai positif, pengembangan UMKM dapat bernilai pada penguatan dan ketahanan ekonomi lokal maupun komunitas. Peran UMKM dalam menyerap tenaga kerja juga dianggap signifikan. Namun keterbatasan modal, pengetahuan, dan teknologi menyebabkan UMKM lamban berkembang dan tidak dapat diandalkan untuk menjadi penyerap pasar rumput laut lokal.

Dalam mendorong industrialisasi sektor rumput laut, pemerintah pun berinisiatif mengundang investor luar untuk mendirikan pabrik di NTB. Saat ini Pemerintah Daerah NTB tengah mengupayakan pembangunan pabrik kosmetik (berbahan dasar rumput laut) di daerah Banyumulek Lombok Barat. Selain itu juga upaya industrialisasi dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam laporan evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun 2015disebutkan beberapa kebijakan yang ditempuh oleh dinas untuk Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yakni 1) Pengembangan kewirausahaan dan UKM berkeunggulan kompetitif; 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Koperasi dan UKM; 3) Meningkatkan akses Koperasi dan UKM pada sumber daya produktif; 4) Dukungan perkuatan bagi Koperasi dan UKM. Selain itu, untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing, pemerintah telah mengupayakan berbagai program yang terkait dengan peningkatan kualitas dan daya saing UMKM, misalnya saja penguatan lembaga kredit (koperasi) UMKM sebagai akses

likuiditas, program kredit UKM, Bimtek, Program Rintisan Penerapan Teknologi sederhana, Diklat, fasilitas sertifikasi dan lain sebagainya. Selain penguatan kapasitas teknis dan produksi, juga diupayakan akses pasar bagi kelompok UMKM misalnya melalui pelatihan pemasaran, pengembangan sarana pemasaran melalui penyelenggaraan acara seperti Pasar Rakyat dan juga penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui berbagai pameran *(expo).*

Dalam kerangka berfikir *LED*, pertumbuhan *big business* yakni investor luar idealnya tidak boleh bersifat kontradiktif dengan upaya pembangunan dan penguatan ekonomi komunitas atau masyarakat. Pada aspek ini, pemerintah perlu mendesain kebijakan kemitraan industri antara industri kecil dan industri besar agar dapat tercipta relasi simbiosis mutualisme. Tentunya pemerintah tidak begitu saja mengandalkan pihak swasta atau bisnis namun juga harus mengupayakan berbagai insentif dan program yang dapat menarik minat pihak bisnis untuk berinvestasi.

2. Faktor Lokalisional.

Secara sederhana faktor lokalisional atau *locational factor* dapat diartikan sebagai faktor-faktor atau fitur-fitur yang menentukan apakah suatu daerah atau wilayah memenuhi kualifikasi bisnis (Edward, 1994) dalam bukunya *Planning Local Economic Development* menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja akan lebih berhasil dan efektif jika disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah atau komunitasDalam konteks yang sederhana, faktor lokalisional dapat berupa infrastruktur baik itu komunikasi, jalan, pelabuhan, proses perizinan yang transparan, *cost business* yang rasional, ketersediaan sumber daya, baik alam, manusia maupun energi, dan juga iklim usaha serta *supporting industries,* hingga pada aspek geografis. Secara geografis, NTB diberkahi kontur geografis dan bentang alam yang potensial bagi pengembangan ekonomi kelautan dan kemaritiman. Oleh karenanya, NTB menjadi salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Faktor lokalisional memberikan kemudahan bagi kelompok industri dalam mengakses bahan baku. Kelimpahan bahan baku rumput laut di NTB dipandang sebagai faktor yang menarik minat para investor di Lombok.

Pada aspek infrastruktur, pemerintah NTB selama sepuluh tahun terakhir telah mengupayakan proyek pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, air dan listrik, komunikasi dan lain sebagainya. Pada tahun 2016 misalnya, capaian pembangunan jalan pemerintah Provinsi NTB telah mencapai 147,15 kilometer dengan 18 ruas jalan, dimana persentase kemantapan jalan nasional mencapai 100 persen dan 72,3 persen untuk jalan provinsi. Begitupula dengan listrik, NTB telah mengupayakan kecukupan energi listrik untuk menunjang geliat ekonomi yang semakin tumbuh.Selain itu, NTB juga telah membangun KEK Mandalika untuk mendorong pertumbuhan investasi dan juga pembangunan *Global Hub* yang akan menjadikan Lombok sebagai pusat perdagangan dan aktifitas ekonomi untuk Indonensia bagian Tengah dan Timur. Meski masih dalam proses *groundbreaking,* namun upaya pembangunan kota pelabuhan terintegrasi diharapkan dapat memunculkan keyakinan bahwa NTB sebagai kota industri masa depan.

3. Aspek Keberlanjutan.

Aspek keberlanjutan atau *sustanaibility* sesungguhnya menangkap sinergisitas antara aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi. Dengan demikian pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan sebagai inklusifitas pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial dan konservasi ekologi atau lingkungan. Dalam (Erlania & Radiarta, 2015) budidaya rumput laut merupakan budidaya yang dapat dikatakan berbiaya rendah karena tidak membutuhkan biaya pemiliharaan yang tinggi, dan budidaya organic yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan, budidaya rumput laut tidak membutuhkan pakan yang dapat meninggalkan residu organik yang dapat menyebabkan pencemaran di perairan. Sebaliknya, rumput laut dapat menyerap nutrien organik berupa nitrogen dan fosfor terlarut dari perairan dan dimanfaatkan untuk pertumbuhannya. Selain itu, rumput laut juga menyerap CO2 terlarut dari perairan, yang dikenal sebagai blue carbon, yang digunakan dalam proses fotosintesis.

Namun demikian, ada hal yang patut diperhatikan terkait budidaya rumput laut. *Pertama,* budidaya rumput laut bukanlah sektor yang bebas ancaman. Ancaman budidaya rumput laut terutama berasal dari organisme organic di perairan seperti jamur, virus ataupun ikan pemakan rumput *(herbivorous fish).* Ancaman terhadap rumput laut kerap menggoda petani untuk menggunakan produk-produk anti hama dan virus dalam proses budidaya rumput laut. Penggunaan zat anorganik atau kimia akan mengancam kesehatan perairan

wilayah budidaya laut. Oleh karenanya, diperlukan suatu mekanisme untuk menjamin penerapan budidaya yang bertanggung jawab. *Kedua*, menurut Michael De san dalam (Soejarwo & Fitriyanny, 2016) budidaya rumput laut haruslah memenuhi daya dukung perairan karena rumput laut sangat sensitif dan bergantung pada aspek lingkungan lokasi budidaya rumput laut. Pengaruh lingkungan yang berkaitan dengan kualitas perairan, pencemaran dan kondisi hidro-oseanografi mempunyai dampak yang besar terhadap usaha budidaya rumput laut.

Regulasi mengenai tata kelola wilayah perairan dan wilayah pesisir. Pada tingkat nasional peraturan atau undang-undang yang menjadi payung hukum peraturan daerah terkait lingkungan hidup adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan regulasi terkait kelautan dan wilayah pesisir yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Ditingkat daerah, pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai penataan zonasi wilayah dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua regulasi tersebut kemudian menjadi landasan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAKP3K) hingga pada perumusan rencana Zonasi Rinci.

Ruang partisipasi masyarakat dalam upaya penjagaan dan konservasi lingkungan menurut (Munara, 2018, Agustus 1) melalui pengakuan aturan adat atau *awig-awig.* Dipertegas oleh (Solihin & Satria, 2007) Dalam beberapa kasus di daerah Lombok, penetapan aturan adat atau *awig-awig* oleh masyarakat berkaitan dengan kemunculan kesadaran bersama *(collective consciousness)* terhadap kerusakan lingkungan dan penurunan potensi ekonomi yang dialami masyarakat. Penetapan awig-awig memastikan hak wilayah laut masyarakat pesisir terhadap pemanfaataan sumber daya laut dan pesisir. Pengakuan awig-awig oleh pemerintah daerah merupakan perwujudan semangat demokratisasi ekonomi, prinsip desentralisasi dan otonomi serta visi pembangunan partisipatif.

Upaya merekonstruksi dan merivitalisasi awig-awig pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1994 oleh Pemerintah Desa Tanjung Luar, Keruak. Awig-awig masyarakat Tanjung Luar tersebut menetapkan “Jalur/Zona Penangkapan Ikan” bagi nelayan tradisional dan nelayan modern/semi modern. Aturan adat tersebut juga mengatur alat tangkap yang boleh digunakan kedua kelompok nelayan tersebut. Penggunaan alat tangkap yang merusak dilarang dan akan dikenakan sanksi. Namun pada waktu itu, tidak ada regulasi atau produk undang-undang yang mengakui eksistensi institusi lokal dalam upaya pengelolaan sumber daya laut maupun ikan karena pengelolaan pembangunan pada waktu itu masih menerapkan prinsip sentralisme, awig-awig tersebut pun tidak bisa dilembagakan dan tidak didokumentasikan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berkaitan tentang desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan memberi angin segar bagi kelompok masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya laut yang mereka miliki.

4. Sinergi Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Sosial.

Sinergisitas pembangunan ekonomi dan sosial dapat diwujudkan melalui visi pembangunan partsipatif dengan menitikberatkan pada pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) yang meletakkan masyarakat pada posisi strategis sebagai subyek dengan didukung upaya atau program-program pengentasan kemiskinan *(poverty allevation)* dan ketimpangan gender. Perempuan merupakan komponen penting dalam budi daya rumput laut. Hampir seluruh aktifitas budi daya rumput laut dikerjakan oleh perempuan, mulai dari pemasangan bibit pada *longline,* mengikat bibit hingga pada masa panen dan penjemuran. Mudahnya perempuan mengakses kerja budi daya rumput laut dikarenakan budi daya rumput laut tidak memerlukan teknologi yang rumit. Namun, budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat pesisir mengancam perempuan karena membatasi perempuan untuk mengakses sumber daya

ekonomi dan fasilitas budi daya rumput laut. Artinya, perempuan hanya berperan pendamping terhadap laki-laki.

Dalam situasi tertentu didapati juga kasus dimana perempuan berdaya secara ekonomi, dan perempuan menjadi aktor utama dalam budi daya rumput laut. Kepemilikian *longline* oleh perempuan dilatari oleh pemberian suami, sebagai bentuk tanggung jawab nafkah ekonomi. Pada aspek lain, suami justru memilih sektor lain seperti ternak untuk memenuhi ekonomi keluarga. Sesekali laki-laki berperan dalam rantai aktifitas budi daya rumput laut, yakni pada masa tanam karena harus menyelam dan mendayung untuk mengikat tali *longline.* Namun kasus ini bersifat tentative dan bukan representasi umum situasi sosiologis masyarakat pesisir.

Pemerintah telah berupaya membangun kemandirian masyarakat pesisir melalui berbagai program pemberdayaan misalnya dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan produk perikanan atau rumput laut, seperti dodol dan manisan. Tujuan dari program ini adalah agar petani pembudi daya dapat meningkatkan nilai produk komoditas rumput laut, dan diversifikasi rantai perdagangan rumput laut di kalangan petani rumput laut. Namun, program pemberdayaan ini tidak terdistribusi dengan baik. Di Teluk Sereweh misalnya, kelompok perempuan dan nelayan mengeluhkan kurangnya akses dan program-program pemberdayaan ekonomi. Program-program pemberdayaan cenderung berupaproyek birokrasi tanpa ada komitmen yang kuat dari kelompok birokrasi. Program-program pemberdayaan kerap hanya terhenti pada proses pembuatan laporan tanpa ada kejelasan program lanjutan *(follow-up)*.

5. Aspek Tata Kelola (*Governance).*

Segitiga *governance* dalam heksagon *LED* (Mayer & Stamer, 2014) dan (Weisbrod, lynch, & collin, 2004) berkaitan dengan sinergisitas sektor publik dan sektor privat atau kelompok pemerintah dan masyarakat. Sinergisitas antar kelompok aktor tidaklah selalu berbentuk lembaga atau organisasi, melainkan dapat berbentuk jaringan yang menghubungkan kelompok-kelompok aktor tersebut. Dalam konteks ini, setiap aktor dapat memiliki andil proses *decision-making* sehingga corak demokratis dapat lebih tercipta dalam proses pembangunan. Selain itu, tata kelola juga berkaitan dengan kontribusi dan sebaran tugas dan fungsi setiap aktor dalam jaringan pembangunan ekonomi lokal.

Model atau pola *networking* antara kelompok terkait dalam budidaya rumput laut belumlah matang ditataran pemerintahan daerah. Dalam perspektif *LED*, aktor utama pembangunan ekonomi adalah pemerintah lokal atau pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Hal ini terkait dengan motivasi memperkuat prinsip desentralisasi dalam perspektif *LED*atau PEL. Ketiadaan panel atau forum *LED* merupakan salah satu persoalan yang dapat memicu disintegralisasi dan sinergisitas pembangunan ekonomi lokal. Persoalan ini pada dasarnya bermuara pada kurang kuatnya visi atau perspektif PEL yang dianut oleh pemerintah daerah. Jargon pembangunan lokal kerap terucap namun tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini terlihat misalnya saja terjadinya tumpang tindih tupoksi antara dinas yang satu dengan dinas lainnya. Misalnya saja mengenai pembangunan ekonomi rumput laut, mulai dari Bappeda, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM hingga DKP memiliki bidang agroindustri rumput laut. Begitu pula dengan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan rumput laut, yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perindustrian.

Upaya sinergi birokrasi pada dasarnya telah diupayakan, dilihat dari adanya Lembaga Perencana dan Pengawasan seperti Bappeda. Bappeda dan SKPD memiliki jadwal rutin untuk sinergi kebijakan. Namun demikian, perlu diberikan catatan bahwa sinergi ini kerap bersifat birokratis dimana pertemuan antar lembaga terkait hanya pada ketika rapat rutin *(business as usual).* Padahal, Keberhadiran pelembagaan lokal atau forum konsultatif akan memudahkan pengawasan dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pola sinergi atau relasi yang bersifat integral antara ketiga aktor tersebut belum cukup kuat dan belum cukup terlembaga.

6. Aspek Manajemen.

Aspek manajemen sesungguhnya berkaitan dengan kesadaran bahwa program Pembangunan Ekonomi Lokal sebagai suatu *life-cycle,* yang bisa dimulai namun tidak pernah usai. *LED* atau PEL berhadapan dengan target bergerak, dalam artian

penyelesaian suatu masalah dalam lingkaran sektor, akan selalu ada identifikasi persoalan baru dan upaya pencapaian standar yang lebih baik. Hal inilah yang menyebabkan kapasitas evaluasi dan pengawasan program *LED* sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan prinsip *good management.*

Dalam sektor budi daya rumput laut, upaya monitoring dan evaluasi dilakukan oleh aktor pemerintah terkait dengan implementasi kebijakan dan program. Misalnya saja dinas-dinas terkait melakukan upaya diagnosis melalui penyusunan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja, kemudian setelah program target dijalankan, baru disusun Laporan Evaluasi Kebijakan. Hal tersebut merupakan *task* dari kelompok birokrat. Namun jika menggunakan perspektif *LED*, proses manajemen tersebut haruslah melibatkan berbagai aktor atau *stakeholders,* yang dapat digagas melalui pembentukan panel *LED*. Namun sekali lagi, panel *LED* tersebut nampaknya belum dikelola secara maksimal, akibatnya upaya manajemen pun masih bersifat sektoral dan parsial.

Berikut gambaran pengembangan rumput laut dalam prespektif PEL terangkum dalam Gambar 4.

PENUTUP

Pengembangan komoditas Rumput Laut Di NTB belum optimal dalam pendekatan pembangunan ekonomi lokal. Beberapa hal diantaranya; aspek pertama *targeting group,* pemerintah NTB hanya berorientasi pada pembangunan *big business* dan minim dalam penguatan sektor mikro dan kecil dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan rumput laut. Aspek kedua lokasional faktor, pengembangan rumput laut NTB masih belum optimal dibandingkan potensi area yang dimiliki, namun cukup tinggi dalam skala dan trend produksi di tingkat nasional. Aspek ketiga keberlanjutan, untuk mendukung pengembangan rumput laut pemerintah daerah NTB telah mendasain *Blue Economy* dengan regulasi yang mendukung pembangunan keberlanjutan pada pengembangan rumput laut, selain itu masyarakat lokal diberikan kemandirian dalam mengelola pengembangan rumput laut di wilayah mereka dengan hukum atau adat-istiadat yang dikenal dengan istilah awig-awig. Aspek keempat yakni sinergi pembagian ekonomi dan sosial. Pengembangan rumput laut NTB masih jauh dari konsep *Fair Trade*, akses petani ke pasar masih bergantung pada pengepul yang menjadikan nilai

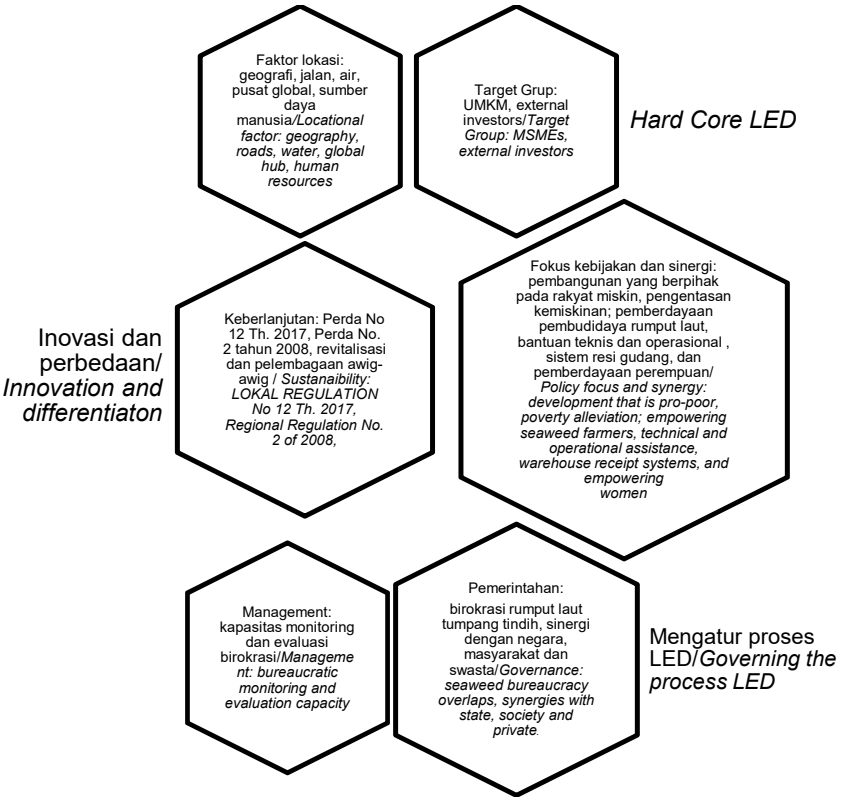
Faktor lokasi: geografi, jalan, air, pusat global, sumber daya manusia/Locational factor: geography, roads, water, global hub, human resources
Target Grup: UMKM, external investors/Target Group: MSMEs, external investors
Hard Core LED
Inovasi dan perbedaan/ Innovation and differentiaton
Keberlanjutan: Perda No 12 Th. 2017, Perda No. 2 tahun 2008, revitalisasi dan pelembagaan awig-awig / Sustanaibility: LOKAL REGULATION No 12 Th. 2017, Regional Regulation No. 2 of 2008,
Fokus kebijakan dan sinergi: pembangunan yang berpihak pada rakyat miskin, pengentasan kemiskinan; pemberdayaan pembudidaya rumput laut, bantuan teknis dan operasional , sistem resi gudang, dan pemberdayaan perempuan/ Policy focus and synergy: development that is pro-poor, poverty alleviation; empowering seaweed farmers, technical and operational assistance, warehouse receipt systems, and empowering women
Management: kapasitas monitoring dan evaluasi birokrasi/Management: bureaucratic monitoring and evaluation capacity
Pemerintahan: birokrasi rumput laut tumpang tindih, sinergi dengan negara, masyarakat dan swasta/Governance: seaweed bureaucracy overlaps, synergies with state, society and private.
Mengatur proses LED/Governing the process LED

Gambar 4. Hexagonal PEL Rumput Laut NTB.
Figure 4. Hexagonal LED NTB Seaweed.

rumput laut belum mampu memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan petani dan masyarakat pesisir, namun disatu sisi pengembangan rumput laut telah memberikan kesempatan pada wanita-wanita untuk mendapatkan posisi pada mata rantai pengembangan rumput laut di NTB. Kelima aspek sinergitas aktor, pengembangan rumput laut di NTB memiliki masalah besar pada sinegitas diantara masyarakat, pemerintah dan swasta. Hal ini terlihat dari belum adanya kelembagaan yang menaungi aktor pengembangan rumput laut di NTB. Aspek keenam, yakni aspek manajemen, pengelolaan rumput laut di NTB belum sesuai dengan jargon PIJAR NTB yang menjadi komoditas unggulan di NTB. Monitoring dan evaluasi dalam kerangka pengembangan rumput laut masih bersifat parsial dan belum tepat sasaran.

Selian itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian pengembangan komoditas rumput laut dalam prespektif PEL yakni pertama aspek *overlapping bureaucracy* yakni masih terjadinya tumpang tindih tupoksi antara satu dinas dan dinas lainnya. Satu program sejenis dapat dijalankan oleh beberapa dinas atau lembaga. Hal ini menyebabkan fokus kebijakan dan sinergi kebijakan tidak berjalan optimal karena ada semacam perebutan arena kerja. *Kedua,* pemerintah belum membentuk suatu panel atau forum yang menjadi wadah konsultasi dan pertukaran informasi dengan kelompok-kelompok terkait dalam sektor rumput laut. *ketiga,* kebijakan *pro-poor* serta pemberdayaan komunitas dan kelompok perempuan belum digarap secara maksimal. Program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan kerap bercorak *bureaucrat project* tanpa adanya visi dan komitmen yang kuat. Hal ini pun menyebaban diskontinuitas program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. *Keempat,* aspek lingkungan mesti diperkuat tidak saja melalui regulasi namun pada aspek penindakan. Sinergi lingkungan dengan sektor industri lain juga diperlukan. Pemerintah perlu mengkaji dampak pariwisata, pelayaran dan industri pertambangan terhadap industri rumput laut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh *stakeholder* pengembangan rumput laut pemerintah provinsi NTB serta perangkat desa serewa lotim beserta seluruh kelompok tani rumput laut di wilayah serewa lotim

DAFTAR PUSTAKA

Antara, B. (2012, November 28). *Jerman Dukung Pengembangan Ekonomi Lokal Di NTB. Mataram, NTB, Indonesia*. Retrieved April 9, 2018, From Berita Antara: Https://Mataram.Antaranews.com.

Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian.* Yogyakarta, ID: Pusataka Pelajar.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2013). *Analisis Rumah Tangga Komoditas Unggulan Daerah Nusa Tenggara Barat Hasil Sensus Pertanian.* Mataram.

Bambang, B. (2005). Telaah Implementasi Kebijakan Local Economic Development (LED) di Jawa Tengah. *Eko-Regional-Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*.

Bisnis Indonesia, (2017). *Komoditas Ekspor :NTB Pacu Produksi Rumput Laut*. Retraived From: https://koran.bisnis.com/read/20170914/452/689684/komoditas-ekspor-ntb-pacu-produksi-rum-put-laut.

Edward, B. (1994). *Planning Local Economic Development.* California, USA: Sage Publications.

Erlania & Radiarta, I. N. (2015). Pengembangan Budidaya Rumput Luat : Implikasi Penerpan Blue Economi di teluk Sereweh, NTB. *Media Akukultur* , 97-101.

Hidayat, S. &Safitri, P. (2017). *Analisis Rantai Nilai Komoditas Rumput Laut NTB.* Mataram; repository unram.

Indonesia, R. (2007). *UU No. 26 Tentang Penataan Ruang.*

Indonesia, R. (2007). *UU No.27 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.*

Indonesia, R. (2009). *UUNo 32.* Jakarta.

Kicknew. (2009).*Pembangunan Indfrasturktur Din NTB Terus Meningkat.*Retrieved November 2018, From Kicknew: Http://Kicknew.

Mayer, D. &J.Stamer. (2014). *Sustaining Local Economic Development Initiative:* Mesopartner.Retraived From: https://www.mesopartner.com/fileadmin/media_center/Working_papers/mp-wp03_01.pdf.

NTB, P. (2017). *Peraturan Daerah No 12 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.*

Saragih, J. R. (2012). Model Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Berbasis Produktivitas Kopi Arabika Spesialti di Kabupaten Simalungun. *Wahana Hijau: Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*.

Soejarwo, A. P., & Fitriyanny, W. P. (2016). Pengelolaan Budidaya Rumput Laut Berkelanjutan Untuk Masyarakat pesisi Pulau Pajang Serang Banten. *Jurnal Kebijakan Sosek KP* , 123-134.

Solihin, A. & A. Satria. (2007). Hak Ulayat Di Era Otonomi Daerah Sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-Awig. Transdisiplin, Komunikasi Dan Ekologi Manuisa. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*,67-68.Retrieved from:http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality.

Sugiyono. (2012*). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, ID: Afabeta.

Weisbrod, G., T. Lynch &M. Collin. (2004). *Handbook: Assessing Local Economic Development Oppurtunities With Arc-Leap.*Washington DC, USA : Appalachian Regional Commission.

IMPLIKASI KEBIJAKAN RELOKASI KAPAL IZIN PUSAT TERHADAP NELAYAN LOKAL DI KEPULAUAN ARU

Policy Implications of Relocating Centralized Vessels Licensie to Local Fishers in the Aru Islands

***Christina Yuliaty, Nendah Kurniasari, Rizky Muhartono dan Fatriyandi N. Priyatna**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 20 Nopember 2018 Diterima setelah perbaikan: 18 Maret 2019
Disetujui terbit: 26 Juni 2019

ABSTRAK

Kebijakan yang diambil Kementerian Kelautan Perikanan berupa relokasi wilayah tangkap kapal berijin pusat (> 30 GT) dari WPP 712 ke wilayah-wilayah yang dianggap masih mempunyai sumberdaya perikanan yang lebih moderat, di antaranya ke WPP 718 memberikan dampak bagi masyarakat di wilayah tujuan relokasi. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan implikasi nelayan pendatang terhadap relasi dan pola usaha nelayan lokal yang berada di Kepulauan Aru. Kajian ini dilakukan di Kota Dobo dan beberapa desa di Kepulauan Aru sebagai salah satu lokasi relokasi kapal berijin pusat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran kondisi secara nasional, meskipun pendalaman dilakukan pada lokasi sampel yang terbatas. Hasil penelitian memperlihatkan jumlah kapal berijin pusat di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 293,2% selama periode 2015-Maret 2018 dan terdapat potensi konflik terkait perebutan ruang tangkapan dan perubahan terhadap potensi relasi produksi ilegal.

Kata Kunci: kebijakan relokasi kapal ijin pusat; nelayan lokal; Kepulauan Aru

ABSTRACT

The policy of Ministry of Marine Affairs and Fisheries to relocate the capture areas of in central licensed vessels (> 30 GT) from Fisheries Management Area (WPP) 712 to other more moderate fishery areas including to WPP 718 gives an impact on communities in the destination areas. This paper aims to describe the implications of migrant fishers on the relations and business patterns of local fishers in the Aru Islands. This study was conducted in Dobo City and several villages in the Aru Islands as one of destination fishing area. This is a descriptive qualitative reserach. This study gives an overview of national condition, even though more comprehensive analysis focused on limited sample location. The results showed a significant increase in the number of central licensed vessels in the WPP 718 Fisheries Management Region of 293.2% during 2015 to March 2018. This study also found potential conflicts related to struggle for fishing areas and changes to the potential of illegal production.

Keywords: relocation of central licensed vessel; local fishers; Aru Islands

PENDAHULUAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Aturan ini bermaksud mengatur pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan. Pengaturan jalur penangkapan disesuaikan dengan hasil perhitungan estimasi potensi sumberdaya ikan di masing-masing wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50 Tahun 2017 tentang estimasi potensi jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP-NRI. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah dalam hal ini KKP mengatur kegiatan relokasi wilayah tangkap kapal –kapal dari WPP 712 ke wilayah-wilayah yang dianggap

*Korespodensi Penulis:
email: yuliaty.christina@gmail.com
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia

masih mempunyai sumberdaya perikanan yang lebih moderat, di antaranya ke WPP 718.

Kapal-kapal yang dikenakan aturan relokasi wilayah penangkapan adalah kapal yang memiliki izin pusat yaitu kapal > 30 GT termasuk di dalamnya kapal-kapal eks cantrang yang berukuran > 30 GT yang telah dirubah alat tangkapnya dan diberikan ijin baru penangkapan pada Wilayah Pengolaan Perikanan (WPP) 711 dan 718. Aturan ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 Tentang Perpanjangan Masa Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Dan Pukat Hela Di WPPNRI.

Penetapan perairan Arafura dan sekitar Kabupaten Kepulauan Aru menjadi salah satu wilayah tujuan penangkapan pada kebijakan penyesuaian wilayah *fishing ground* dari WPP 712 ke WPP 718, didasarkan pada pertimbangan wilayah tersebut masih memiliki pasokan sumberdaya yang cukup. Kegiatan relokasi wilayah tangkap merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah sebagai jalan keluar saat menghadapi masalah tekanan sumberdaya di sebuah perairan. Aktivitas relokasi ini, tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan baik pada komunitas nelayan yang melakukan relokasi maupun komunitas nelayan di wilayah tujuan relokasi. Gunawan, Ruyadi & Alia, (2017) mengemukakan bahwa sosial-ekonomi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat atau lebih umumnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, nelayan dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam hal ini adalah aktivitas penangkapan ikan, pasti akan melakukan interaksi dan hubungan sosial yang kemudian membentuk jejaring dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Upaya relokasi wilayah tangkap ke WPP 718, tidak hanya berdampak positif berupa berkurangnya tekanan terhadap sumberdaya di WPP 712, namun juga diindikasikan membawa dampak negatif terutama di daerah tujuan relokasi. Dilansir dari laman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (2018) diketahui bahwa Komisi IV DPR RI menemukan adanya kecemburuan nelayan tradisional di Kepulauan Aru terhadap nelayan eks cantrang dari Jawa yang mempunyai fasilitas kapal yang lebih besar. Nelayan lokal di perairan Aru sebagian besar merupakan nelayan *one day fishing* yang menggunakan perahu < 5 GT dengan alat tangkap yang sederhana. Peningkatan jumlah kapal berizin pusat dengan ukuran > 30 GT dengan alat tangkap yang jauh lebih modern dibandingkan dengan teknologi nelayan lokal, diprediksi akan memberikan pengaruh pada kehidupan nelayan lokal yang selama ini menangkap ikan di wilayah perairan Aru.

Berdasarkan hal tersebut, makalah ini bertujuan untuk memaparkan implikasi datangnya nelayan pendatang terhadap relasi dan pola usaha nelayan lokal yang berada di Kepulauan Aru. Makalah ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Bulan Februari 2018 di Kota Dobo dengan pertimbangan perairan di sekitar wilayah tersebut merupakan lokasi tujuan program relokasi kapal > 30 GT, dan Kepulauan Aru merupakan sentra nelayan tradisional. Peneliti menggunakan tehnik observasi dan wawancara dalam mengumpulkan data primer. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti tanpa pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut (Nasir, 2005). Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh nelayan atau masyarakat. Cara yang paling efektif dalam melakukan pengamatan langsung adalah melengkapi format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi (Arikuntho, 2006). Metode wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan biasanya percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005). Wawancara dilakukan dengan nelayan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, tanggapan masyarakat mengenai permasalahan penelitian, dan solusi yang masyarakat harapkan dapat diimplementasikan. Peneliti melakukan joting terhadap hasil wawancara baik berupa rekaman maupun catatan untuk kemudian di analisis. Hasil pengambilan data melalui observasi dan wawancara didokumentasikan dalam bentu foto, rekaman, video kegiatan pelaksanaan penelitian, dan catatan-catatan hasil observasi dan wawancara.

Data primer yang dikumpulkan berupa karakteriktik usaha nelayan lokal, nelayan pendatang, pedagang, dan perusahaan perikanan untuk menggambaran pola produksi dan

relasi produksi perikanan di kota Dobo. Guna menganalisis implikasi nelayan pendatang terhadap nelayan lokal di Kepulauan Aru, peneliti memperoleh data primer melalui observasi lapang dan wawancara dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, nelayan lokal, nelayan pendatang, pedagang serta perusahaan penampung ikan hasil tangkapan. Data sekunder diperoleh dari institusi terkait perijinan kapal yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dokumen perijinan dari Pemerintah Daerah, serta catatan keluar masuk kapal, produksi serta catatan pelanggaran dari PSDKP Wilayah Kerja Kota Dobo.

Analisis data dilakukan dengan cara *deskriptif analysis*. Tahapan yang dilakukan dalam analisis dekriptif menurut Miles & Haberman (1992) adalah mereduksi data yang sudah terkumpul, penyajian data dengan mengorganisasikan data, dan terakhir menarik keterkaitan antar kelompok data dan diinterpretasikan secara *logic* untuk ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Meskipun pendalaman dilakukan pada lokasi sampel yang terbatas, namun penelitian berupaya memberikan rekomendasi skala nasional. Karena itu, selain data primer lapangan, peneliti memanfaatkan informasi sekunder, yakni berbagai laporan kegiatan dan hasil-hasil penelitian berkenaan dengan program-program perlindungan yang sudah berjalan selama ini di pusat dan daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian berkaitan dengan kebijakan (*research for policy)* karena ditujukan untuk mengkaji aspek sosial terhadap nelayan lokal di Kota Dobo akibat kebijakan pengalihan wilayah tangkap (*fishing ground*) kapal berukuran > 30 GT dari Perairan WPP 712 ke WPP 718. Menurut Dunn (2000), analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen. Sedangkan menurut Weimer & Vining (1998) analisis kebijakan publik seperti ini merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah di lapangan. Sesuai dengan klasifikasi Dunn (2000), maka ini merupakan kegiatan analisis kebijakan prospektif, yakni berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Hasil penelitian merupakan alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Gambaran Umum Kepulauan Aru dan WPP 718

Kepulauan Aru merupakan sebuah kabupaten baru yang muncul hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003. Kabupaten Kepulauan Aru dengan kota Dobo sebagai ibukota kabupaten. Kabupaten Kepulauan Aru, terdiri dari gugusan pulau-pulau dengan lima buah pulau besar yaitu Pulau Wokam, Trangan, Kobror, Maekor dan Kota. Secara keseluruhan Kabupaten ini terdiri dari 547 pulau dengan 87 pulau diantaranya berpenghuni. Pulau-pulau tersebut tersebar dalam 10 kecamatan, 117 desa, dan 2 kelurahan.

Posisi Kota Dobo dan Kabupaten Kepulauan Aru sangat strategis dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 718. Kabupaten Kepulauan Aru terletak di 5°- 8° Lintang Selatan dan 133°5´ - 136°5´Bujur Timur. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Aru di Utara berbatasan dengan Provinsi Papua, bagian Barat berbatasan dengan Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Papua, dan pada bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafura.

Berdasarkan Peraturan Menteri KP No.1 Tahun 2009 jo Permen No.18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia mengasumsikan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagai satu unit stok yang harus dikelola oleh wilayah administrasi di seputarnya. Perairan Kepulauan Aru merupakan bagian dari WPP 718 bersama Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. Berdasarkan hasil kajian Suman, Irianto, Satria & Amri, (2016). WPP 718 memiliki potensi sumber daya ikan tertinggi dibandingkan 10 WPP lainnya yaitu sebesar 1,992 juta ton/ tahun (20%). Sebagian besar perairan ini masuk dalam perairan Provinsi Maluku dan Papua yang memiliki potensi sumber daya ikan demersal dan ikan karang.

Potensi sumber daya ikan yang tinggi membuat WPP 718 menjadi salah satu wilayah tujuan penangkapan, terutama kapal-kapal berukuran > 30 GT yang berijin pusat. Terbukti saat ini Pelabuhan Dobo menjadi salah satu pelabuhan tempat bersandar kapal > 30 GT yang berasal dari Pulau Jawa. Siaran Pers Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menyatakan bahwa 1100 kapal eks pengguna cantrang dari berbagai daerah saat ini diarahkan untuk mencari ikan di perairan Dobo yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718[1]. Peningkatan jumlah kapal berijin pusat di WPP 718 yang cukup signifikan diperlihatkan pada Gambar 1.

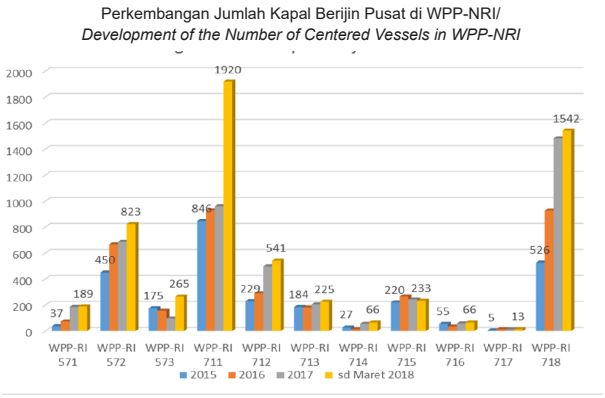

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kapal Berijin Pusat di WPP- NRI.

Figure 1. Development of the Number of Centered Vessels in WPP-NRI.

Sumber: DJPT, 2018./*Source: DJPT, 2018.*

Gambar 1 memperlihatkan bahwa pada periode 2015- Maret 2018 terjadi peningkatan jumlah kapal berijin pusat di WPP 718 sebesar 1016 kapal (293,2%) yang tersebar di beberapa *landing base* di antaranya Dobo, Merauke,dan Kaimana. Data dari PSDKP Wilayah Kerja Dobo (2018) memperlihatkan bahwa kedatangan kapal berijin pusat dan propinsi yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Aru juga mengalami peningkatan jumlah.

Data lainnya diperlihatkan dari data frekuensi kapal yang datang di Kabupaten Kepulauan Aru yang memperlihatkan kenaikan jumlah kapal berijin pusat di perairan Dobo hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu. Peningkatan frekuensi terjadi pada bulan September hingga Desember yang merupakan musim banyaknya ikan pelagis kecil. Ikan tersebut merupakan ikan target dari kapal pendatang yang sebagian besar menggunakan alat tangkap *purse seine*.

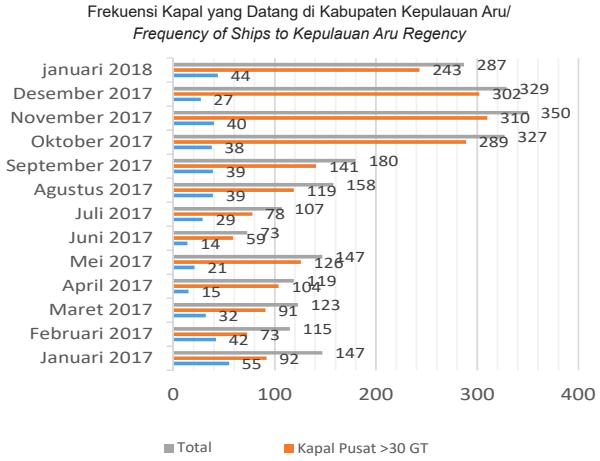

Gambar 2. Frekuensi Kapal yang Datang di Kabupaten Kepulauan Aru.

Figure 2. Frequency of Ships to Kepulauan Aru Regency.

Sumber: PSDKP Wilker Dobo, 2018./*Source: PSDKP Wilker Dobo, 2018.*

Berdasarkan besarnya GT kapal pendatang yang masuk ke perairan Dobo, kapal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai nelayan andon karena kapasitas kapalnya lebih dari 30 GT. Kenaikan jumlah kapal berijin pusat di perairan Dobo hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu. Peningkatan frekuemsi terjadi pada bulan September hingga Desember yang merupakan musim banyaknya ikan pelagis kecil. Ikan tersebut merupaka ikan target dari kapal pendatang yangs ebagain besar menggunakan alat tangkap *purse seine*. Wilayah perairan tersebut merupakan wilayah penangkapan secara legal tanpa harus mengurus perijinan penangkpaan di wilayah provinsi, dan atau tanpa harus disertai MoU antara provinsi asal kapal dengan provinsi daerah tujuan.

Musim Penangkapan

Nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru membagi musim penangkapan ke dalam 2 musim berdasarkan pengetahuan nelayan mengenai angin yaitu musim barat dan musim timur. Musim menentukan lokasi penangkapan ikan dan musim ikan. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober hingga Maret yang ditandai dengan ombak yang tinggi, curah hujan tinggi, angin kencang namun

[1]Sumber http://kmsv2.sosialekonomi.com/2018/03/13/ratusan-kapal-eks-cantrang-dari-jawa-melaut-di-perairan-dobo-aru-kenapa/

sumberdaya ikan melimpah. Pada musim barat, nelayan mensiasati kegiatan penangkapan pada saat angin/ombak mereda, dan ada pula nelayan yang beralih menggunakan alat tangkap sero selama musim barat. Lokasi pembuatan sero berada didekat rumah nelayan.

Musim Timur berlangsung dari bulan April hingga September, ditandai dengan curah hujan rendah dan ombak yang tidak terlalu tinggi. Pada musim ini, nelayan tetap melakukan kegiatan penangkapan seperti biasa.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa ikan-ikan dasar/ karang dapat ditangkap oleh nelayan sepanjang tahun. Ikan pelagis seperti kembung, tongkol banyak ditangkap pada bulan Januari s/d Maret dan Oktober s/d Desember. Telur ikan terbang terdapat pada bulan April s/d Agustus dan Tenggiri pada bulan September s/d Desember.

Karakteristik Nelayan di Kepulauan Aru

Masyarakat nelayan Kepulauan Aru membedakan nelayan ke dalam tiga kelompok, yaitu: nelayan asli dan lokal; nelayan pendatang dari sulawesi dan nelayan pendatang dari Jawa.

Nelayan Asli

Nelayan asli adalah nelayan yang berasal dari suku Aru. Mereka umumnya nelayan yang menggunakan perahu di bawah 5 GT yang digunakan oleh 1-2 orang. Alat tangkap yang dipakai masih sederhana seperti jaring dan pancing, dengan hasil tangkapan berupa demersal dan ikan karang. Ririhena (2017) mengungkapkan bahwa di perairan Kepuluan Aru pada radius 0-12 mil jenis ikan demersal yang tertangkap adalah kakap merah, semntara untuk ikan karang adalah kerapu dan udang.

Nelayan asli tersebar di pulau-pulau kecil, dan masih menggunakan mekanisme sasi di daerah petuanan dalam mengelola sumberdaya perairannya. Hal ini didukung oleh penelitian Cantika, Arifin, Prayoga & Sanjaya, (2017) bahwa Area penangkapan ikan (*fishing ground*) masyarakat adat masuk ke dalam wilayah adat atau patuanan marga sehingga aturan dan pengelolaannya dibawah kewenangan tetua adat atau kepala desa. Oleh karenanya nelayan ini sebagian besar tidak terpengaruh oleh maraknya nelayan pendatang dari Jawa.

Nelayan Lokal

Berdasarkan pemahaman Masyarakat, nelayan asli adalah nelayan yang berasal dari suku Aru. Mereka umumnya nelayan yang menggunakan perahu di bawah 5 GT dengan alat tangkap yang masih sederhana seperti jaring dan pancing. Satu armada digunakan oleh 1-2 orang. Sementara yang disebut dengan nelayan lokal yaitu nelayan yang bukan asli suku Aru (non Suku Aru) yang sudah lama menetap di Dobo dan sekitarnya namun telah memiliki kartu identitas sebagai warga Dobo. Nelayan lokal Aru tersebar di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Aru sebagian besar menggunakan perahu dari fiber dengan ukuran panjang 9 meter dan lebar 80 cm dan dilengkapi dengan mesin tempel berkapasitas 15 PK. Perahu biasa disebut dengan *'longboat'*. Perahu model lainnya yang biasa digunakan adalah ketinting panjang yang terbuat dari kayu dengan panjang 5-6 meter dan lebar 50 cm serta menggunakan mesin tarik berkekuatan 6,5 pk. Alat tangkap yang umumnya digunakan pancing dan jaring udang *(trammel net)* dengan target tangkapan ikan karang dan udang.Nelayan lokal merupakan nelayan *one day fishing* yang berangkat mencari ikan pada pukul 05.00 WIT dan pulang pada pukul 10.00 WIT. Perahu dan alat tangkap yang sederhana membuat nelayan lokal hanya mampu menangkap ikan di wilayah pesisir hingga < 2 mil. Hal ini membuat nelayan lokal Aru yang tersebar di pulau tidak merasakan secara langsung dampak kedatangan nelayan pendatang di perairan Aru.

Tabel 1. Jadwal Tangkapan Ikan Berdasarkan Musim.
Table 1. Seasonal Fishing Schedule.

Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Augt	Sep	Okt	Nov	Des
Ikan kembung dan ikan tongkol/ Indian *Mackerel and mackerel tuna*									Ikan kembung dan Tongkol/ *Indian mackerel and mackerel tuna*		
									Tenggiri/*Narrow barred mackerel*		
				Telur ikan terbang/*Flying fishes eggs*							
									Cumi/*Squid*		
Kuwe, kakaktua, kakap merah/ *Giant trevally fish, parrotfish, red snapper*											

Sementara itu, nelayan lokal di Kota Dobo menggunakan alat tangkap mini *purse seine* dan pancing tonda. Nelayan mini *purse seine* menggunakan perahu kayu dengan ukuran panjang 23 meter dan lebar 6 meter. Perahu dilengkapi dengan 2 mesin yang berukuran masing-masing 40 PK. Perahu belum dilengkapi dengan mesin pendingin sehingga nelayan harus menggunakan box pendingin berukuran 50 kg. Satu kapal *purse seine* terdiri dari 7- 9 orang yang umumnya adalah warga kota Dobo. Nelayan mini *purse seine* adalah nelayan *one day fishing* yang akan memulai aktivitas mencari ikan pada pukul 04.00 WIT.

Ikan hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke pasar atau ke penampung yang biasa disebut dengan istilah ‘‘kontainer’’. Disebut dengan istilah ‘‘kontainer’’ karena penampung ini akan mengirim ikan ke Jawa (Surabaya dan Jakarta) menggunakan jasa ‘kontainer’ yang diangkut menggunakan kapal pengangkut. Ikatan antara ‘‘kontainer’’ dengan nelayan melalui pinjaman modal operasional yang diberikan pada setiap trip. Modal operasional yang dibutuhkan Nelayan mini purse seine sebesar Rp1.000.000,00/ trip. Ada 11 orang yang berperan sebagai ‘‘kontainer’’ di seputar kota Dobo.

Nelayan Pendatang Jawa

Istilah Nelayan pendatang dari Jawa diberikan kepada nelayan yang mencari ikan di perairan Kepulauan Aru dan Arafura yang berciri menggunakan kapal besar berkapasitas > 30 GT hingga maksimal 149 GT dengan 40-50 orang ABK. Kapal dari Jawa sebagian besar menggunakan alat tangkap purse seine dan pancing cumi yang menggunakan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan. Beberapa informan menceritakan, pada saat musim cumi dan kembung, situasi perairan Kepulauan Aru terlihat menjadi terang-benderang menyerupai kota di tengah laut. Ikan hasil tangkapan nelayan *purse seine* antara lain ikan kembung (lema) dan tongkol.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok nelayan kapal pendatang dari Jawa, perusahaan menunjuk orang lokal yang berperan sebagai perpanjangan tangan perusahaan yang sebagian besar dari Jakarta dan Bagan Siapi-api. Nelayan biasa menyebut dengan istilah ‘pengurus’ yang bertugas membantu perusahaan dalam memenuhi keutuhan BBM, bahan makanan, Surat Laik Operasional (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sebagian dari pengurus ada yang berperan ganda mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Jakarta dan Surabaya (kolekting) sehingga bertanggung jawab atas pembayaran retribusi ikan hasil tangkapan. Ada 11 (sebelas) pengurus yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru dan 3 orang lainnya yang hanya berperan mengirimkan hasil tangkapan(kolekting).

Nelayan Pendatang Sulawesi

Masyarakat lokal mengakui banyaknya nelayan pendatang dari Sulawesi seperti Bugis, Makasar dan Buton (Sulawesi Tenggara) yang mencari pencaharian hidup di perairan Aru. Nelayan ini merupakan nelayan andon. Sebagian besar nelayan pendatang berasal dari sulawesi menggunakan perahu > 10 GT. Berdasarkan kebijakan provinsi Maluku, untuk mendapatkan ijin mencari ikan perairan wilayah provinsi Maluku maka pemilik perahu harus tinggal dan menjadi warga provinsi Maluku terlebih dahulu. Hal ini disebabkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2017 belum memiliki kesepakatan (MoU) dengan provinsi lain terkait dengan nelayan andon sesuai dengan Peraturan Menteri KP No.36 tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan. Oleh karena itu perahu dari sulawesi ini memiliki status perahu lokal (memiliki SIPI provinsi Ambon) dan bukan perahu andon.

Nelayan pendatang dari Sulawesi, seperti Bugis dan Makassar sebagian besar menggunakan alat tangkap mini purse seine sementara nelayan yang berasal dari Sulawesi Tenggara dikenal oleh masyarakat lokal sebagai nelayan pencari telur ikan terbang. Tabel 2 menjelaskan karakteristik dari masing-masing kelompok nelayan.

Pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa nelayan pendatang Jawa menggunakan teknologi yang jauh lebih tinggi, kapal yang memiliki kapasitas lebih besar dan alat tangkap yang bersifat lebih hebat sehingga nelayan lokal jauh tertinggal dari teknologi, jumlah ikan yang tertangkap dan pendapatan. Oleh sebab itu ada potensi kecemburuan sosial ekonomi antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang akibat adanya kesenjangan kapasitas dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel 2. Karakteristik Nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru.
Table 2. Fishers Characteristic in Kepulauan Aru Regency.

Kategori/ ***Category***	**Nelayan Setempat[2]/** ***Local Fishers[2]***	**Nelayan Andon[3]/** ***Andon Fishers[3]***	**Nelayan Pendatang (Jawa)/** ***Migrant Fishers (Java)***
Kapal/*ship*	(*)perahu motor (kayu)/*long boat* (fiber) < 5 gt (**)kapal kayu/*wooden ship* < 15 gt	- kapal kayu/*wooden ship* 5-30 gt	- kapal kayu/ *wooden ship* - 30 – 149 gt
Alat Tangkap dan target ikan/ *fishing gear and fish target*	**(*) Suku Aru (tradisional):** - Pancing: kakap/*Fishing rod: snaper fish* - Jaring udang/*Trammel net* - Sero/*Guiding Barriers* - Jaring insang/*Gill nets* **(**) Non Suku Aru:** - Jaring bobo ukuran 1,75 Inci: pelagis */Mini Purse Seine mesh size 1.75 Inch: pelagis* - Tonda: tenggiri*/Trolling line: Narrow barred mackerel*	- Jaring bobo ukuran 1,75 Inci: pelagis*/Mini Purse Seine mesh size 1.75 Inch: pelagis* Tonda: tenggiri*/ Trolling line: Narrow barred mackerel*	- Jaring bobo ukuran 1 inci /*Purse seine mesh size 1 inch* - Pancing cumi: cumi*/ Squid fishing: squid* - Rawai/*long line*
Alat bantu penangkapan Ikan/*Aid for catching fish*	-	-	- Rumpon/*Purse Seine*
Asal nelayan/ *origin fishers*	(*)Aru (**)Bugis-Makassar	Bugis-makassar, Buton	Juwana, Tegal, Pekalongan, Probolinggo
Perijinan/ *Permission*	(*)Pencatatan Kapal <5 GT/ *Ship Registration <5 GT* (**)SIPI Provinsi Lengkap setelah memiliki KTP Maluku/*SIPI Province Complete after having Maluku KTP*	Tanpa SIPI Andon/ *Without SIPI Andon*	Izin pusat/ *Central permission*
Pemasaran/ *Marketing*	- Pasar lokal di Kota Dobo/*Local market in Dobo City* - Penampung atau yang biasa disebut ‘‘kontainer’’ untuk nantinya di bawa ke luar Dobo/*Container or commonly called 'container' to be brought outside Dobo* - Untuk rajungan sebagian dijual ke nelayan pendatang/*For crabs, some are sold to migrant fishermen*	- Pasar lokal di Kota Dobo/*Local market in Dobo City* - Penampung atau yang biasa disebut ‘‘kontainer’’ untuk nantinya di bawa ke luar Dobo/ *Container or commonly called 'container' to be brought outside Dobo*	Dikirim ke Jawa melalui kapal kolekting dan pengiriman berinsulasi (ex:Temas dan SPIL)/ *Sent to Java via collectable shipping and insulated shipping (ex: Temas and SPIL)*
Jumlah hari per/ *amount every day trip*	- Tangkapan satu hari/ *One day fishing*	10-15 hari/*10-15 day*	3-8 minggu/*3-8 weeks*
Jumlah tangkapan per trip/*amount cacthing fishing every trip*	5-20 kg/*5-20 kg*	3-4 ton/*3-4 tons*	- Jaring bobo *40-80 ton* / *purse seine: 40-80 tons*
Jumlah ABK/ *Amount of labour*	1-2 orang/*1-2 persons*	4-5 ton/*4-5 tons*	40-50 orang/*40-50 persons*

[2]Nelayan setempat adalah nelayan asli Suku Aru (*) dan nelayan non Suku Aru (**) yang sudah menetap di Kepulauan Aru dan memiliki KTP Aru

[3]Nelayan Andon adalah nelayan yang berasal dari luar Provinsi Maluku yang umumnya pada musim-musim tertentu

Pola Relasi Produksi

Berdasarkan kapasitas kapal yang dipakai, nelayan yang beroperasi di Perairan Aru yang berlabuh di pesisir sekitar Kota Dobo dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu nelayan di bawah 5 GT, nelayan 5 - < 10 GT, nelayan 10 – 30 GT dan nelayan di atas 30 GT. Nelayan-nelayan tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain antar nelayan, mereka juga berinteraksi dengan pelaku usaha perikanan lainnya seperti pedagang, pengurus, dan pengolah hasil perikanan. Berikut ini interaksi antar pelaku yang terkait dalam pemanfaatan sumber daya ikan di Kota Dobo.

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa nelayan lokal dan nelayan asli terkadang melakukan kegiatan penangkapan di area yang sama dengan target tangkapan adalah ikan demersa, dan ikan karang. Sedangkan kapal nelayan lokal (>10 GT) memiliki irisan pada wilayah penangkapan dengan kapal pendatang baik dari Jawa ataupun Sulawesi.

Hasil tangkapan ikan oleh nelayan asli dipasarkan melalui pedagang pengumpul di tingkat desa, kemudian di jual ke pasar lokal di kota atau dijual kepada pedagang pengumpul kota/'kontainer'. Demikian halnya dengan hasil tangkapan nelayan lokal juga dipasarkan kepada pengumpul kota/'kontainer' dan ada sebagian kecil yang dijual ke pasar lokal. Pengumpul 'kontainer' ada yang menjual ikan langsung kepada pemesan di luar Dobo menggunakan kapal angkut atau melalui pedagang besar dan dikirim juga melalui kapal laut. Untuk komoditas tertentu dalam jumlah terbatas, produk ikan bisa dikirim melalui jalur via udara.

Untuk memudahan proses kegiatan bongkar muatan ikan dan pengiriman hasil tangkapan, nelayan pendatang bekerja sama dengan pengurus kapal setempat untuk mengkordinasikan selama kapal mendarat (izin bongkar muat, pengisian BBM dan Ransum), termasuk mengirimkan hasil tangkapan. Pengurus kapal melalukan proses packing ikan hasil tangkapan dan selanjutnya mengirimkan hasil tangkapan tersebut melalui jalur laut.

Kedatangan kapal-kapal dari luar ke wilayah kepulauan Aru, secara tidak langsung dapat mendatangkan peluang ekonomi bagi masyarakat, seperti tumbuhnya usaha input produksi seperti penyediaan ransum untuk kegiatan penangkapan, usaha perbengkelan, jasa pengiriman ikan dan tumbuhnya peluang ekonomi dari sektor informal lainnya seperti warung makan, penjual pulsa, dan lainnya. mengandung banyak potensi konflik. Selain menimbulkan peluang ekonomi, kedatangan kapal-kapal tersebut juga dapat menimbulkan

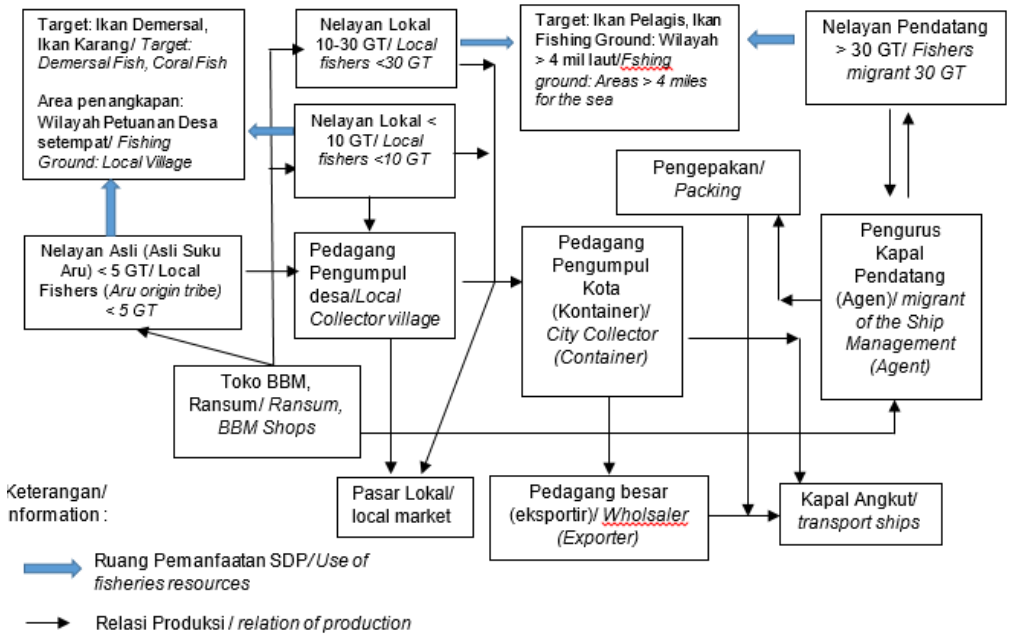
Target: Ikan Demersal, Ikan Karang/ Target: Demersal Fish, Coral Fish
Area penangkapan: Wilayah Petuanan Desa setempat/ Fishing Ground: Local Village
Nelayan Lokal 10-30 GT/ Local fishers <30 GT
Nelayan Lokal < 10 GT/ Local fishers <10 GT
Target: Ikan Pelagis, Ikan
Fishing Ground: Wilayah > 4 mil laut/Fishing ground: Areas > 4 miles for the sea
Nelayan Pendatang > 30 GT/ Fishers migrant 30 GT
Pengepakan/ Packing
Nelayan Asli (Asli Suku Aru) < 5 GT/ Local Fishers (Aru origin tribe) < 5 GT
Pedagang Pengumpul desa/Local Collector village
Pedagang Pengumpul Kota (Kontainer)/ City Collector (Container)
Pengurus Kapal Pendatang (Agen)/ migrant of the Ship Management (Agent)
Toko BBM, Ransum/ Ransum, BBM Shops
Keterangan/ nformation :
Pasar Lokal/ local market
Pedagang besar (eksportir)/ Wholsaler (Exporter)
Kapal Angkut/ transport ships
Ruang Pemanfaatan SDP/Use of fisheries resources
Relasi Produksi / relation of production

Gambar 3. Pola Relasi Produksi dan Pemanfaatan Sumber Daya di Kab. Kep. Aru.
Figure 3. Patterns of Relation Between Production and Utilization of Resources in Kepulauan Aru Regency.

konflik. Hal ini dikarena aktivitas perikanan tangkap yang dilakukan tidaklah semata-mata merupakan aktivitas ekonomi yang bebas dari pengaruh sosial. Interaksi antara nelayan pendatang dengan nelayan lokal dan pelaku usaha perikanan dapat memunculkan potensi konflik yang diantaranya timbul karena adanya kecemburuan terhadap hasil tangkapan yang didapat (penurunan hasil tangkapan nelayan lokal).

Potensi Konflik Antar Nelayan

Kebijakan pengalihan wilayah tangkapan (*fishing ground*) kapal berukuran > 30 GT dari WPP 712 ke WPP 718 yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tidak hanya memberikan dampak positif, namun di lain pihak ternyata memiliki potensi konflik baik diantara sesama nelayan pendatang maupun dengan nelayan lokal kepulauan Aru.

Nelayan lokal yang menggunakan *mini purse seine* berpotensi konflik dengan nelayan pendatang Jawa yang memakai *purseseine* sebab meskipun wilayah tangkapan berbeda namun memiliki target ikan yang sama. Ketidakseimbangan kepemilikan alat dan teknologi penangkapan yang digunakan menjadi salah satu sumber masalah. Nelayan pendatang dari Jawa yang menggunakan kapal berukuran > 30 GT umumnya menggunakan alat tangkap yang lebih canggih dan memiliki kapasitas yang besar. Teknologi GPS dan VMS pun turut serta dalam kegiatan penangkapan ikan yang diilakukan, sehingga kapal-kapal tersebut mampu menangkap dengan lokasi tangkapan yang menyesuaikan dengan keberadaan ikan. Selain itu, nelayan pendatang mempunyai rumpon yang juga dianggap sebagai salah satu penyebab nelayan lokal mengalami penurunan hasil tangkapan.

Nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap pancing tonda berpotensi konflik dengan nelayan pendatang Jawa yang menggunakan *purse seine*. Hal ini disebabkan ikan yang menjadi target utama tangkapan nelayan tonda adalah tenggiri, sementara nelayan *purse seine* menangkap ikan yang menjadi makanan tenggiri. Berkurangnya sumber makanan tenggiri dianggap sebagai penyebab menurunnya hasil tangkapan nelayan. Bagi nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap tonda, nelayan *purse seine* dianggap lebih merugikan dari pada nelayan cumi yang terkadang juga menangkap tenggiri di luar musim cumi. Hal ini disebabkan yang ditangkap nelayan cumi hanya tenggiri dan bukan sumber makanan tenggiri.

Nelayan lokal dengan nelayan pendatang dari Jawa karena perbedaan penggunaan ukuran mata jaring *purse seine*. Ukuran mata jaring purse seine yang digunakan oleh nelayan pendatang dari Jawa adalah 1 inch, sementara nelayan lokal menggunakan ukuran mata jaring 1,5 – 1,75 inch. Perbedaan ukuran mata jaring menjadi potensi konflik tersendiri. Meskipun demikian, ukuran mata jaring nelayan pendatang Jawa sudah sesuai dengan Permen KP No.71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ukuran mata jaring yang lebih kecil yang digunakan oleh nelayan pendatang Jawa dianggap sebagai penyebab penurunan hasil tangkapan nelayan lokal. Nelayan lokal meyakini ukuran mata jaring yang digunakan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya.

Potensi konflik yang timbul akibat terganggunya sistem permodalan dan pemasaran yang selama ini sudah berjalan. Kapal mini purse yang dioperasikan oleh nelayan lokal mendapatkan modal dari operasional dari para penampung atau bakul yang disebut dengan istilah lokal ‘‘kontainer’’. Disebut dengan ‘kontainer’ karena penampung akan mengirim ikan ke Jawa (Surabaya dan Jakarta) menggunakan jasa ‘kontainer’ yang diangkut menggunakan kapal pengangkut. ‘‘kontainer’’ akan membuat ikatan dengan memberikan pinjaman modal operasional sebesar Rp.1.000.000,- per trip kepada nelayan purse seine, dengan harapan ‘kontainer’ mendapatkan pasokan rutin ikan segar dari hasil yang didapatkan nelayan. Di Kota Dobo, setidaknya terdapat 11 orang yang menjalankan usaha dan berfungsi sebagai ‘‘kontainer’’.

PENUTUP

Kebijakan relokasi wilayah tangkap kapal berijin pusat (> 30 GT) dari WPP 712 ke WPP 718 memberikan dampak peningkatan jumlah kapal secara signifikan yaitu sebesar 293,2 % atau sebanyak 1016 kapal yang tersebar di beberapa landing base diantaranya Dobo, Merauke, dan Kaimana sejak periode 2015-Maret 2018. Peningkatan frekuensi kedatangan kapal berijin pusat terjadi pada bulan September hingga Desember yang merupakan musim banyaknya ikan pelagis kecil sebab kapal berijin pusat ini menggunakan alat tangkap *purse seine.* Kedatangan kapal berijin pusat ke wilayah perairan

Aru memberikan dampak bagi nelayan lokal. Dampak positif adalah meningkatnya aktivitas perekonomian yang dapat mendatangkan peluang ekonomi bagi masyarakat. Tumbuhnya usaha input produksi seperti penyediaan ransum untuk kegiatan penangkapan, usaha perbengkelan, jasa pengiriman ikan dan tumbuhnya peluang ekonomi dari sektor informal lainnya seperti warung makan, penjual pulsa, dan lainnya. Namun di sisi lain kedatangan nelayan kapal berijin pusat mengandung banyak potensi konflik. Kesenjangan kapasitas dan teknologi penangkapan antara nelayan pendatang dan lokal dapat menimbulkan kecemburuan akibat penurunan hasil tangkapan dari sisi nelayan lokal.

Terdapat dua opsi rekomendasi beserta implikasi rekomendasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan. Opsi rekomendasi kebijakan pertama adalah, melakukan pengkajian kembali jumlah izin kapal penangkapan ikan dan rumpon di WPP 718 sesuai dengan potensi stok ikan yang teridentifikasi. Implikasi rekomendasi dari rekomendasi ini adalah berupa: (1) Ditjen Perikanan Tangkap melakukan pengkajian kembali tentang jumlah izin kapal (SIPI) pusat yang beroperasi di WPP 718. Kuota / pembatasan izin kapal oleh pusat dilakukan juga berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah; (2) Ditjen Perikanan Tangkap melakukan pengkajian kembali tentang jumlah izin penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan di WPP 718; (3) Pemerintah pusat mengkaji ulang ukuran minimum mesh size untuk meningkatkan selektivitas hasil tangkapan guna keberlanjutan usaha perikanan; dan (4) Pemerintah daerah cq Dinas KP Propinsi Maluku berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten setempat lebih mengaktifkan kembali Pokmaswas untuk bersama-sama dengan pihak berwenang (DJPSDKP KKP, Polairud, TNI AL) melakukan pengawasan atas praktek perikanan di WPP 718.

Sementara opsi rekomendasi kebijakan kedua adalah, melakukan penguatan Kelembagaan Lokal dan Peran Masyarakat Lokal di WPP 718. Implikasi rekomendasi dari rekomendasi ini adalah berupa: (1) Pemerintah Propinsi Maluku segera menginventarisasi dan menetapkan desa-desa adat berikut wilayah adatnya untuk dimasukkan ke dalam RZWP3K agar memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pengelolaan perikanan berlandaskan wilayah dan aturan adat; (2) Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan pembinaan terhadap ABK lokal (keterampilan dan pengetahuan); (3) Pemerintah pusat menyusun aturan turunan yang berisi kewajiban merekrut tenaga setempat (nelayan lokal) sebagai ABK pada kapal > 30 GT; dan (4) Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan untuk melakukan *scale up* armada penangkapan nelayan lokal secara bertahap agar mampu bersaing dengan nelayan pendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian "IMPLIKASI NELAYAN PENDATANG TERHADAP POLA USAHA NELAYAN LOKAL DI KEPULAUAN ARU" dengan sumber dana berasal dari DIPA BBPSEKP T.A. 2018. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Yayan Hikmayani,M.Si sebagai Penanggung Jawab Output kegiatan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan pembantu lapang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data. Selain itu, ucapan terima kasih juga kepada segenap tim redaksi yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arikuntho, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelatan dan Perikanan (BBRSEKP). 2018. Ratusan Kapal Eks Cantrang dari Jawa Melaut di Perairan Dobo Aru. Kenapa. (http://kmsv2.sosialekonomi.com/2018/03/13/ratusan-kapal-eks-cantrang-dari-jawa-melaut-di-perairan-dobo-aru-kenapa/). (Diakses tanggal: 13 Mei 2018).

Cantika, F.S., Arifin, M., Prayoga, A.P. & Sanjaya, A. (2017). *Potret Aktivitas Ekonomi Masyarakat Adat Kabupaten Kepulauan Aru*. Forest Watch Indonesia dan LPPM IPB. Bogor.

Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IV. (2014). *Adanya Kecemburuan Nelayan Tradisional Kepulauan Aru*. Diambil dari Laman DPR RI http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19421/t/Adanya+Kecemburuan+Nelayan+Tradisional+Kepulauan+Aru. Retraived: pada tanggal 1 Mei 2019.

Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Gunawan N.A, Ruyadi, Y., & Alia M.N. (2017). Analisis Perubahan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Blok Pekauman Desa Astana Dengan Keberadaan Tradisi Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Di Cirebon. *Sosietas*, Vol. 7, No. 1, 2017.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50 tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemafaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Miles, B. M. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, L.J. (2005). *Metodologi Penelitian.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nasir, M. (2005). *Metode Penelitian*. PT. Ghalia. Indonesia.

Peraturan Menteri KP no. 1 Tahun 2009 Jo No.18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Ririhena, J.E. (2017). *Kondisi Perikanan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Aru. 2017. Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Alam dan Kesehatan* Vol. 1 No.1 Tahun 2017. LPPM Universitas Hein Namotemo. Halmahera Utara.

Suman, A., Irianto, H.E., Satria, F. & Amri, K. (2016). Potensi dan Tingkat Pemafaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. Volume 8 No.2 Nopember 2016. Pp.97- 110.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 Tentang Perpanjangan Masa Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Dan Pukat Hela Di WPPNRI.

Weimer, D.L & Vining, A.R. (1998). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. Prantice Hall.

ANALISIS DESKRIPTIF FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN TANGKAP (Studi Kasus: Kota Kendari)

Descriptive Analysis of Socio Economic Factors Influencing to Fishers' Household Income (Case Study: Kendari City)

***Deshinta Vibriyanti**

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Jl. Jend. Gatot Subroto No. Kav 10 Kuningan Barat, DKI Jakarta 12710, Indonesia

Diterima tanggal: 11 Januari 2019 Diterima setelah perbaikan: 8 April 2019
Disetujui terbit: 26 Juni 2019

ABSTRAK

Sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun pada kenyataannya belum mampu membuat nelayan keluar dari jeratan kemiskinan. Pendapatan yang bersifat tidak pasti membuat keberlanjutan profesi sebagai nelayan tangkap menjadi terancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data primer di lakukan pada bulan Mei tahun 2015 di desa Purirano dan Bungkutoko dengan mewawancarai 200 responden di tingkat rumah tangga. Data primer diperoleh juga melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga sampel per-bulan di kedua lokasi Rp2.307.863. Pendapatan rata-rata di Kelurahan Purirano Rp3.094.803 lebih tinggi dari pendapatan di Kelurahan Bungkutoko sebesar Rp1.981.209. Rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi diperoleh pada musim gelombang tenang (sekitar Rp3 juta), dan terendah pada musim panceklik (sekitar Rp1,6 juta). Faktor pembeda pendapatan nelayan yaitu (1) faktor internal (kepemilikan jenis armada dan alat tangkap dan besarnya biaya produksi), (2) faktor eksternal (musim, harga dan pemasaran, dan degradasi sumber daya laut).

Kata Kunci: faktor sosial ekonomi; pendapatan nelayan; rumah tangga nelayan tangkap; Kota Kendari

ABSTRACT

Fisheries resources are potential to improve the living standard and welfare of fishers, however, its production has not able yet to lift fishers out of poverty. The uncertain level of income threaten the sustainability of the fishers livelihood. This study aims to determine factors that influence the income of fishers and fisheries resources management in Kendari City, Southeast Sulawesi. Primary data were collected from 200 household respondents in May 2015 through Focus Group Discussion (FGD) in Purirano and Bungkutoko villages. Secondary data were collected from literature. Data were analysed using SPSS program. The results showed that average household income per month in the two locations was IDR2,307,863. The average income in Purirano Sub-district was IDR3,094,803. It was IDR1,981,209 higher than the income in Bungkutoko Sub-District.The highest average household income was obtained during the calm wave season (around IDR 3 million), and the lowest income was obtained in the strong wave season (around IDR 1.6 million). The fishers income differentiate factors are (1) internal factors (ownership of fleet type, fishing gear, and production costs), (2) external factors (season, prices and marketing, and degradation of marine resources).

Keywords: socio economic factors; income fishers; capture fisheries; Kendari City

**Korespodensi Penulis:*
email: akuchie2@gmail.com
Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Jl. Jend. Gatot Subroto No. Kav 10 Kuningan Barat, DKI Jakarta 12710, Indonesia

PENDAHULUAN

Berbagai studi tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan dan pesisir menunjukkan satu kesimpulan yaitu masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat dengan stereotipe kemiskinan (Imron, 2011; Tain, 2011; Retnowati, 2011; Nasution, 2005; Humaedi, 2012; Saptana, 2018). Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan tersebut disebabkan oleh faktor yang saling terkait yaitu kualitas sumber daya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar dan modal. Hal ini menyebabkan lemahnya kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya (Sipahelut, 2010). Tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir umumnya menempati strata yang paling rendah dibandingkan dengan masyarakat lainnya di darat (Kusnadi, 2009), karena kebijakan pembangunan yang dirancang pemerintah cenderung lebih berorientasi ke daratan (Rahim, 2012).

Identitas kebudayaan masyarakat nelayan berbeda dengan kelompok sosial lainnya seperti petani dataran rendah, pedagang, kelompok masyarakat di sekitar hutan dan masyarakat di daerah perkotaan karena sumber daya ekonomi dan lingkungannya (Kusnadi, 2009). Pendapatan nelayan tangkap (khususnya nelayan tradisional) bersifat tidak pasti (*uncertainty*), spekulatif dan fluktuatif, berbeda dengan petani atau pedagang yang keuntungannya dapat diprediksi (Rahim & Astuti, 2016).

Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapan, hasil itu mempengaruhi besarnya pendapatan yang diterima nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menemukan bahwa variabel lama melaut dan ukuran mesin yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nelayan, yang berarti bahwa setiap penambahan lama melaut dan ukuran mesin yang digunakan maka pendapatan nelayan tangkap juga akan meningkat (Syahma, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Rahim dan Hastuti (2016) menunjukkan bahwa harga minyak tanah, lama melaut, dan umur nelayan mempengaruhi perubahan pendapatan nelayan tangkap di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Selain itu Harahap (2003) menemukan bahwa pendapatan usaha tangkap nelayan di Kota Medan dipengaruhi oleh jam melaut, modal, dan tanggungan keluarga. Kusnadi (2003) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian pendapatan nelayan tangkap menjadi dua, yaitu: faktor alamiah dan faktor non-alamiah. Faktor alamiah merujuk pada musim penangkapan yang fluktuatif dan struktur alamiah sumber daya alam. Sedangkan faktor non alamiah berkaitan dengan keterbatasan teknologi alat tangkap, armada, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran dan belum berfungsinya koperasi nelayan, serta dampak negatif dari kebijakan modernisasi perikanan.

Dengan melihat dinamika yang mempengaruhi pendapatan nelayan dan potensi yang cukup besar di Kota Kendari, maka pendapatan nelayan tangkap di Kota Kendari menarik untuk dikaji. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pendapatan rumah tangga nelayan tangkap di Kota Kendari dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mewawancarai 200 rumah tangga nelayan terpilih di dua lokasi penelitian, yaitu: Kelurahan Purirano, Kecamatan Kendari dan Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Kedua lokasi ini dipilih dengan pertimbangan kedua lokasi merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan tangkap. Pemilihan responden pada masing-masing lokasi menggunakan teknik *systematic random sampling*. Sementara itu, data kualitatif juga dikumpulkan melalui obsevasi lapangan, dan *FGD* (*Focus Group Discussion*). Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dari nara sumber yang terpercaya (Sugiyono, 2012).

Satuan analisis yang digunakan penelitian ini adalah rumah tangga nelayan. Rumah tangga nelayan adalah rumah tangga yang sekurang-kurangnya terdapat satu anggota rumah tangga atau lebih yang bekerja di lapangan usaha/ bidang pekerjaan utamanya sebagai nelayan (memancing atau menjaring ikan atau hewan laut atau tanaman laut). Dalam rumah tangga tersebut diantaranya akan menghitung pendapatan dan biaya penangkapan ikan.

Pendapatan merupakan salah satu komponen yang menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang/rumah tangga. Pendapatan merupakan hasil usaha/upah atau balas jasa yang diperoleh seseorang/rumahtangga dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Pendapatan rumah tangga

meliputi pendapatan semua anggota rumah tangga (berumur 10 tahun ke atas) dari rumah tangga terpilih yang bekerja seminggu yang lalu.

Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan rumah tangga nelayan dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan enam lapangan pekerjaan yaitu 1) perikanan tangkap, 2) perikanan budidaya 3) buruh/pegawai tetap 4) pertanian 5) perdagangan 6) industri 7) sumber lainnya. Sumber pendapatan rumah tangga pada survei ini tidak dibedakan antara sumber pendapatan utama dengan sumber pendapatan tambahan.

Selanjutnya Tabel 1 memberi informasi sumber pendapatan rumah tangga nelayan dari masing-masing 100 responden rumah tangga di Bungkutoko dan Purirano. Sumber pendapatan rumah tangga adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, buruh, pertanian, perdagangan, industri dan sumber lainnya. Di Bungkutoko dari 100 responden, 31% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari perikanan tangkap (rata-rata pendapatan Rp1.981.209/ bulan), 1% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari perikanan budidaya (rata-rata pendapatan Rp943.750 bulan), 33% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari bekerja sebagai buruh (rata-rata pendapatan Rp2.012.685/bulan), 4% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari pertanian (rata-rata pendapatan Rp759.643/ bulan), 18% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari perdagangan (rata-rata pendapatan Rp2.108.833), 4% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari dari industri (rata-rata pendapatan Rp1.072.222/bulan), dan 9% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari sumber lainnya (rata-rata pendapatan Rp845.833).

Di Purirano, dari 100 rumah tangga responden 13% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari perikanan tangkap (rata-rata pendapatan Rp3.094.803), 1% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari perikanan budidaya (rata-rata pendapatan Rp666.667), 41% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari bekerja sebagai buruh (rata-rata pendapatan Rp1.931.667), 10% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari pertanian (rata-rata pendapatan Rp262.564), 14% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari pertanian (rata-rata pendapatan Rp262.564), 7% rumah tangga responden memiliki pendapatan yang berasal dari industri (rata-rata pendapatan Rp262.564), dan 14% rumah tangga responden memiliki pendapatan dari sumber lainnya (rata-rata pendapatan Rp907.285).

Dari dua lokasi tersebut Bungkutoko dan Purirano terlihat bahwa pendapatan dari perikanan tangkap sudah tidak menjanjikan lagi sebagai sumber pendapatan rumah tangga. Di Bungkutoko sumber pendapatan rumah tangga nelayan mulai tergantung pada kegiatan berburuh dan berdagang. Fenomena yang sama ditunjukkan juga oleh rumah tangga responden di Purirano.

Tabel 1. Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Menurut Sumber Pendapatan di Lokasi Penelitian, Kota Kendari, 2015 (Rupiah).

Table 1. Average Monthly Household Income by Source of Income in Research Sites, Kendari City, 2015 (IDR).

Sumber Pendapatan/ *Source of Income*	Bungkutoko/ *Bungkutoko*			Purirano/ Purirano			Total/ *Total*		
	Jumlah/ Total	n/ N	%*/ %	Jumlah/ Total	n/ N	%*/ %	Jumlah/ Total	n/ N	%*/ %
Perikanan tangkap/ *Capture fisheries*	1.981.209	31	31	3.094.803	13	13	2.307.863	44	22
Perikanan budidaya/ *Aquaculture*	943.750	1	1	666.667	1	1	851.389	2	1
Buruh/*Worker*	2.012.685	33	33	1.931.667	41	41	1.967.963	74	37
Pertanian/*Agriculture*	759.643	4	4	262.564	10	10	407.545	14	7
Perdagangan/*Trading*	2.108.833	18	18	1.375.696	14	14	1.790.679	32	16
Industri/*Industry*	1.072.222	4	4	781.361	7	7	878.315	10	5
Sumber lain/*Others resources*	845.833	9	9	907.285	14	14	882.704	24	12
Total N (sampel)	**100**			**100**			**200**		

*) Persentase dihitung dari n/N X 100%/**) Percentage calculated by n/N X 100%*

Pergeseran struktur pendapatan ini terjadi karena *effort* penangkapan di Teluk Kendari telah melebihi daya dukung lingkungan. Data menunjukkan hingga tahun 2017 telah terjadi penyusutan luas hutan mangrove sekitar 30% dari 525 hektare turun menjadi 367,5 hektar (https://www.antaranews.com/berita/641845/kawasan-mangrove-di-kendari-semakin-menyusut). Kerusakan ini menyebabkan *spawning ground* ikan di hutan mangrove Teluk Kendari telah hilang. Tekanan pada lingkungan ini menyebabkan usaha di perikanan tangkap semakin tidak efisien (biaya penangkapan semakin tinggi dibandingkan dengan pendapatan). Hal ini menyebabkan terjadi pergeseran sumber pendapatan rumah tangga nelayan kepada sumber pendapatan lain.

Struktur Lapangan Kerja

Berbeda dengan karakteristik pekerjaan di sektor pertanian, karakteristik pekerjaan sektor perikanan tangkap sangat tergantung dengan alam. Kondisi cuaca merupakan penentu nelayan untuk dapat turun ke laut menangkap ikan. Ketergantungan yang tinggi pada kondisi alam dan ketidakpastian hasil produksi menjadikan profesi nelayan dianggap tidak cukup menjanjikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Oleh karena itu berbagai strategi dilakukan oleh para nelayan diantaranya memiliki pekerjaan sampingan atau pekerjaan tambahan di saat musim paceklik atau ketika tidak sedang melaut. Banyak ditemui para nelayan yang bekerja ke sektor jasa (menjadi tukang ojek, tukang bangunan, supir). Bahkan sektor industri dan perdagangan. Pada sektor industri, nelayan dibantu oleh istri dan anggota keluarga membuat produk makanan olahan berbahan baku ikan seperti bakso, kerupuk, otak-otak, dan lain sebagainya.

Walaupun pendapatan rata-rata tertinggi berasal dari usaha perikanan tangkap (Lihat Tabel 2), penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan tangkap berbeda di dua lokasi. Tabel 1 menunjukkan distribusi penduduk yang bekerja (berusia 10 tahun ke atas) menurut lapangan pekerjaan utama di kedua lokasi penelitian. Di Bungkutoko, 32,2% penduduknya bekerja sebagai nelayan tangkap, 19,8% penduduknya bekerja di bidang perdagangan, 14% bekerja di bidang pekerjaan jasa, 12,3% bekerja di industri, 6,5% bekerja di bidang lainnya (termasuk listrik, air, gas dan keuangan), 5,3% bekerja di bidang konstruksi, 5,2% bekerja di bidang transportasi, 4,1% bekerja di bidang usaha pertanian, dan 0,6% penduduknya bekerja di bidang perikanan budidaya.

Sementara itu di Purirano, persentase terbesar adalah penduduk yang bekerja di bidang jasa yaitu 20,5%, diikuti oleh penduduk yang bekerja di bidang perikanan tangkap yaitu 13,7%, 13% penduduk bekerja di bidang transportasi, 11,8% penduduk bekerja di bidang industri, 9,3% penduduk bekerja di bidang konstruksi, 7,5% penduduk bekerja di

Tabel 2. Distribusi Penduduk Bekerja (Usia 10 Tahun ke Atas) Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Lokasi Penelitian, 2015 (persen).

Table 2. Distribution of Labor Force (10 Years Old and More) by Main Occupation in Research Location, 2015 (percent).

Lapangan Pekerjaan Utama/ *Main Occupation*	Bungkutoko (%)/ *Bungkutoko* (%)	Purirano (%)/ *Purirano* (%)	Jumlah(%)/ *Total* (%)
Pertanian (pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan)/ *Agriculture (food, plantation, livestock, forestry).*	4,1	7,5	5,7
Perikanan tangkap/ *Capture fisheries*	32,2	13,7	23,2
Perikanan budidaya/ *Aquaculture*	0,6	0,6	0,6
Pertambangan dan penggalian/ *Mining and qurrying*	-	1,2	0,6
Industri (pengolahan dan industri rumah tangga)/ *Industry (processing and home industry)*	12,3	11,8	12,2
Konstruksi/ *Construction*	5,3	9,3	7,2
Perdagangan (Perikanan dan non perikanan)/ *Trade (fisheries and non-fisheries)*	19,8	16,2	18,0
Transportasi (darat, sungai, laut)/ *Transportation (land, river, sea)*	5,2	13,0	9,0
Java/*Service*	14,0	20,5	17,2
Lainnya (listrik, air, gas, keuangan)/ *Others (electricity, water, gas, finance)*	6,5	6,2	6,3
Jumlah/*Total*	**100**	**100**	**100**

bidang pertanian, 6,2% penduduk bekerja di bidang lainnya (termasuk listrik, air, gas dan keuangan), 16,2% penduduk bekerja di bidang perdagangan, 1,2% penduduk bekerja di bidang pertambangan dan penggalian, dan 0,6% penduduk bekerja di bidang perikanan budidaya.

Armada dan Teknologi Alat Penangkap Ikan

Memberi informasi tentang jumlah dan jenis teknologi armada dan alat produksi yang digunakan oleh rumah tangga nelayan tangkap di masing-masing lokasi penelitian. Di Bungkutoko pada 100 responden yang diwawancara diketahui 14 rumah tangga nelayan memiliki 21 unit perahu tanpa motor, 8 rumah tangga nelayan memiliki 9 unit perahu motor tempel, dan 4 rumah tangga nelayan memiliki 7 unit kapal motor. Sementara itu teknologi alat tangkap yang dikuasai oleh rumah tangga di Bungkutoko 1 unit bagan dikuasai oleh 1 rumah tangga nelayan, 875 unit bubu dikuasai oleh 9 rumah tangga nelayan, 4 unit muro ami/pukat dikuasai oleh 2 rumah tangga nelayan, 2 unit jaring insang dikuasai oleh 2 rumah tangga nelayan, 155 unit pancing rawe dikuasai oleh 16 rumah tangga nelayan, 7 unit alat transportasi komersil dikuasai oleh 5 rumah tangga nelayan, dan 1 unit lahan (pangan dan perkebunan) dikuasai oleh 1 rumah tangga nelayan dapat dilihat pada Tabel 3.

Di Purirano terdapat 12 rumah tangga nelayan memiliki 16 unit perahu tanpa motor, 21 rumah tangga nelayan memiliki 21 unit perahu motor tempel dan 1 rumah tangga nelayan memiliki 1 unit kapal motor. Sementara itu kepemilikan alat produkasi, 1 unit keramba dikuasai oleh 1 rumah tangga nelayan, 3 unit bagan dikuasai oleh 2 rumah tangga nelayan, 252 unit bubu dikuasai oleh 4 rumah tangga nelayan, 6 unit jaring insang dikuasai oleh 5 rumah tangga nelayan, 4 unit pancing rawe dikuasai oleh 2 rumah tangga nelayan, 1 unit alat transportasi komersil dikuasai oleh 1 rumah tangga nelayan, dan 9 unit lahan (pangan dan perkebunan) dikuasai oleh 7 rumah tangga nelayan.

Kepemilikan dan penguasaan sarana/ alat-alat produksi dan non produksi bagi suatu rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan keluarga tersebut (Fadillah, 2011). Gambaran di atas menunjukkan bahwa nelayan tangkap di kedua lokasi tergolong sebagai nelayan kecil yaitu nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan perahu tanpa motor maupun perahu motor tempel. Begitu juga dengan kepemilikan alat produksi. Nelayan di kedua lokasi menguasai jenis alat produksi yang relatif sama yaitu mayoritas menggunakan *bubu* dan *pancing rawe*. Kondisi ini dapat menjawab

Tabel 3. Distribusi Rumah Tangga Menurut Teknologi Armada dan Kepemilikan Alat Produksi di Lokasi Penelitian, (Unit dan Rata-rata).

Table 3. Distribution of Households Ownership by Type of Fishing Vessel and Gear at the Research Locations, (Units and Averages).

Armada dan Alat Tangkap/ *Fishing Fleet and Gear*	Kelurahan Bungkutoko/ *Bungkutoko Village*			Kelurahan Purirano/ *Purirano Village*			Jumlah/*Total*		
	Unit/ *Units*	Jml rt-n/ *Number of household-n*	Rata2 Unit/n *Unit mean/n*	Unit/ *Unit*	Jml rt-n/ *Number of household-n*	Rata Unit/n *Unit mean/n*	Unit/ *Unit*	Jml RT-n/ *Number of household-n*	Rata2/ *Mean*
Perahu tanpa motor/ *Non-powered boat*	21	14	1,5	16	12	1,3	37	26	1.4
Perahu motor tempel/ *Outboard powered board*	9	8	1,1	21	21	1	30	29	1.0
Kapal motor/*Powered boat*	7	4	1.75	1	1	1	8	5	1.6
Karamba/*Cage*	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Bagan (kelong, sero dll)/ *Bagan*	1	1	1	3	2	1.5	4	3	1.3
Bubu/*Trap*	875	9	97.2	252	4	63	1127	13	86.6
Muro ami, pukat/*Muro ami, Pukat*	4	2	2	-	-	-	4	2	2
Jaring Insang /*Gill net*	2	2	1	6	5	1.2	8	7	1.1
Pancing Rawe, ulur/*Hand line*	155	16	9.6	4	2	2.0	159	18	8.8
Tambak/Brackishwater *pond*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat transportasi komersil/ *Commercial transportation*	7	5	1.4	1	1	1	8	6	1.3
Lahan (pangan & perkebunan)/ *Land (food & plantation)*	1	1	1	9	7	1,2	10	8	1

Keterangan: n- jumlah rt yang menjawab ya/*Remaks: n-number of household answed yes*

mengapa terjadi pergeseran struktur pendapatan nelayan tangkap ke bidang-bidang pekerjaan/ usaha lainnya.

Biaya Operasional

Dikarenakan karakteristik nelayan di dua lokasi penelitian yang tergolong nelayan kecil/ tradisional, maka biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaut juga tidak terlalu tinggi. Sekali melaut nelayan yang berawak 2-3 orang hanya membutuhkan bensin (5-10 liter), dan perbekalan makanan secukupnya dan rokok. Nelayan mayoritas berusaha sendiri dengan pola kerja kekeluargaan. Biasanya mereka mempekerjakan anggota keluarga dan saudara terdekat dalam berusaha sehingga tidak memiliki beban biaya upah buruh.

Permasalah lain yang dihadapi nelayan adalah ketersediaan ketersediaan bahan bakar yang tidak stabil baik bahan bakar jenis bensin maupun solar. Kesulitan mendapatkan BBM sangat mengkhawatirkan nelayan karena tanpa BBM mereka tidak bisa melaut. Nelayan harus ngantri dari pagi untuk mendapatkan bahan bakar. Proses mengantri pun hanya dibatasi dengan menggunkan botol air mineral dengan volume (1 liter) maksimal 4 botol. Prioritas pengisian pun didahulukan kepada konsumen kendaraan bermotor (motor dan mobil). Harga bensin per liter saat ini Rp7.200,-. Untuk bahan bakar solar malah lebih sulit lagi karena tidak diijinkan membeli dengan menggunakan botol minuman minerel bekas. Jika beli eceran (bukan di Pertamina harganya 10.000/liter–15.000/liter). Para ibu istri nelayan merasa dianaktirikan dalam hal akses terhadap bahan bakar yang digunaan untuk melaut. Biasanya lama antrian bisa mencapai ½ jam sampai 1,5 jam, jika mulai antri pukul 8:30 maka baru bisa membeli pukul 10:00 Waktu Indonesia Tengah (WITA). Salah satu strategi yang dilakukan oleh nelayan adalah menggunakan motor untuk membeli bensin, kemudian disedot. Tugas membeli bahan bakar ini dilakukan oleh para istri nelayan ketika para suami (nelayan) sedang melaut atau baru pulang melaut. Menurut masyarakat program-program terkait bahan bakar yang diberikan kepada mereka sering salah sasaran, yang diperuntukkan kepada nelayan kecil akhirnya banyak yang memanfaatkan nelayan besar. Contohnya saja pada SPBU khusus nelayan di Purirano, namun saat ini lebih banyak nelayan besar yang diuntungkan dibanding nelayan kecil.

Musim/iklim

Kegiatan kenelayanan di laut dipengaruhi oleh pergantian musim dan cuaca (Purnomo, Suryawati, Radjawane & Sembiring, 2015). Demikian pula hasil yang diperoleh nelayan dari kegiatan penangkapan ikan sangat fluktuatif sepanjang tahun, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis armada, peralatan tangkap, pengalaman masing-masing nelayan dan perubahan musim (Azizi & Fahrudin, 2017). Terkait dengan aktivitas nelayan di laut terdapat tiga musim utama yang berbeda yaitu: 1) Musim Gelombang Tenang (MusimTimur) yang berlangsung antara bulan April hingga Oktober; 2) Musim Gelombang Kuat (Musim Barat) atau Musim Panceklik, berlangsung antara bulan Oktober hingga April, dan; 3) Musim Pancaroba adalah musim peralihan antara musim Barat dan Musim Timur berlangsung selama 3 bulan (bulan Oktober hingga Desember). Pada musim gelombang tenang angin dan ombak tenang mengakibatkan banyak ikan yang ditangkap, sehingga dianggap sebagai musim panen ikan. Keadaan sebaliknya terjadi pada musim gelombang kuat (musim Barat) di mana angin bertiup kencang dan ombak lebih kuat, sehingga menyulitkan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan. Musim Pancaroba adalah musim peralihan dari kedua musim tersebut. Perubahan musim ini mempengaruhi frekuensi nelayan ke laut sehingga berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Pada musim gelombang kuat frekuensi ke laut menurun drastis sehingga hasil yang diperoleh nelayan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kemungkinna lokasi kedua daerah kajian yang berada di teluk agak berbeda dengan kondisi daerah pantai yang berhadapan dengan laut lepas. Pengaruh perubahan musim terhadap rata-rata pendapatan rumah tangga di kedua lokasi kajian dapat dilihat pada Tabel 4.

Secara keseluruhan dapat dilihat pendapatan rata-rata rumah tangga tertinggi diperoleh pada musim Timur (sekitar Rp3 juta), dan terendah pada musim Barat (sekitar Rp1,6 juta). Sementara rata-rata pendapatan rumah tangga di musim pancaroba berada diantara kedua musim yaitu 2,1 juta rupiah. Pola ini sejalan dengan pola pendapatan menurut musim di Bungkutoko yang melibatkan 52. nelayan. Pendapatan rata-rata rumah tangga pada musim gelombang tenang mencapai lebih dari dua kali lipat pendapatan pada musim Barat (sekitar Rp2,7 juta dan Rp1,2 juta). Sementara pada musim pancaroba pendapatan rata-rata rumah tangga berada diantaranya (sekitar Rp2 juta).

Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Perikanan Tangkap Menurut Musim di Lokasi Penelitian, Kota Kendari, Tahun 2015 (Rupiah).
Table 4. Average Income of Fishers' Household by Season in Research Location, 2015 (IDR).

Desa/ *Villages*	Pendapatan Rata-rata RT Per Bulan Per Musim/ *Average Household Income Per Month Per Season*		
	Musim Timur)/ *East Season*	Musim Pancaroba/ *Transition Period*	Musim Barat)/ *West Season*
Kelurahan Bungkutoko/ *Bungkutoko Village*	2.673.231	2.065.000	1.233.577
Kelurahan Purirano/ *Purirano Village*	4.325.409	2.299.773	2.569.318
Jumlah/*Total*	**3.164.419**	**2.134.797**	**1.630.689**

Pola ini menegaskan perubahan musim masih sangat berpengaruh terhadap aktivitas nelayan di laut (Khalfianur, Niati & Harahap, 2017; Bachtiar & Novico, 2012; Assad, 2019). Pada musim Timur frekuensi nelayan melaut meningkat, populasi ikan banyak sehingga nelayan memperoleh pendapatan yang relatif banyak di musim ini. Keadaan sebaliknya pada musim Barat, nelayan banyak mengurangi aktivitas melaut karena selain populasi ikan banyak berkurang pendapatan nelayan tidak sebanding denga biaya yang dikeluarkan. Maka banyak nelayan beralih aktivitas melakukan kegiatan non nelayan yang dianggap lebih menguntungkan.

Harga dan Pemasaran Produksi

Harga ikan di pasaran juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan para nelayan tangkap. Walaupun memiliki TPI (TPI Sodohoa), namun pada umumnya pemasaran dilakukan secara langsung melalui *papalele* (pedagang ikan). Beberapa nelayan menyebutkan bahwa sistem TPI dinilai merugikan nelayan dimana TPI hanya memilih ikan-ikan yang bagus saja untuk dibeli. Belum lagi sistem pembayaran yang tidak langsung. Harga sering kali ditentukan oleh kondisi harga ikan di Makassar sehingga akan dibayarkan ke nelayan ketika sudah ada gambaran harga pedagang yang akan mengambil ikan dari Makassar. Oleh karena itu banyak nelayan kecil yang menjual hasil tangkapannya hanya ke *papalele* atau dijual langsung kepada industri-industri kecil pengolahan ikan. Selain itu menurut nelayan, TPI di bawah pemerintah daerah banyak dikuasai oleh tokoh-tokoh pemilik modal besar (elit juragan) sehingga dinilai tidak menguntungkan sebagai tempat pemasaran bagi nelayan kecil di sekitar Teluk Kendari.

Ikan tangkapan yang banyak diperoleh oleh nelayan di kedua lokasi relatif sama, seperti ikan Malaja (*siganus canaliculatus*) ikan Belanak (m*oolgarda seheli*), dan ikan Putih (*coregonidaes)*. Perdagangan ikan di TPI biasanya menggunakan satuan kilogram atau kotak gabus (sejenis *steoroform*). Namun satuan berat bagi perdagangan ikan (*papalele*) biasa menggunakan satuan kilogram, ikat dan tusuk. Satu tusuk ikan bisa terdiri dari beberapa ekor ikan tergantung ukuran ikan. Untuk ikan ukuran besar, satu tusuk berisi sekitar dua ekor ikan dan untuk ikan ukuran kecil, satu tusuk berisi sekitar 6-8 ekor ikan. Jika dikonversi ke dalam satuan kilogram, satu tusuk ikan kira-kira seberat 1 hingga 1,5 kg. Harga ikan per tusuk pun bervariasi sesuai dengan jenis ikan. Harga-harga ikan dan hasil laut di lokasi penelitian adalah sebagai berikut: Kepiting (*Scylla spp*)= Rp35.000/kg, ikan Baronang (*Siganus canaliculatus*)= Rp15.000/ tusuk, ikan Belanak (*moolgarda seheli*) =Rp 25.000/ tusuk, ikan Bolu/Bandeng (*Chanos chanos)*= Rp40.000/tusuk, Ikan teri/mairo (*Stolephorus sp*)= Rp 70.000-150.000/kg, ikan Katamba *(Lethrinidae)* = Rp25.000/tusuk, Gamat/teripang *(Holothuroidea)*= Rp450.000/kg.

Degradasi Sumber Daya Pesisir dan Laut

Pada dasarnya Teluk Kendari menyimpan potensi kelautan yang cukup menjanjikan, namun permasalahan lingkungan menjadi isu yang cukup kuat mempengaruhi penurunan produksi tangkapan nelayan di sekitar Teluk Kendari Salah satu penyebab memburuknya kualitas perairan di Teluk Kendari adalah sedimentasi. Sedimentasi yang terjadi di Teluk Kendari ditandai dengan perairan yang semakin keruh terutama pada lokasi-lokasi yang berdekatan dengan muara sungai dan daratan (Subhan & Afu, 2017). Degradasi lingkungan yang

disebabkan oleh aktifitas di sekitar Teluk Kendari antara lain limbah industri (limbah pabrik, minyak/ oli industri yang bermuara ke laut), reklamasi pantai untuk pembangunan, dan penebangan pohon mangrove untuk berbagai keperluan seperti pemukiman, untuk kayu bakar, bahan bangunan, keperluan rumah tangga/perkakas, bahan kertas, bahan tekstil, alat perikanan, pupuk pertanian dan obat-obatan. Kondisi tersebut merupakan penyebab terjadinya percepatan proses abrasi, pencemaran (kekeruhan), serta pendangkalan perairan Teluk Kendari (Fajriah, 2015). Akibatnya dirasakan oleh nelayan melalui berkurangnya hasil tangkapan di sekitar Teluk kendari. Salah seorang nelayan menyebutkan hasil *sero* setiap hari biasanya 10 tusuk sekarang paling hanya 2 tusuk/hari.

Pembangunan Kota Kendari sedang intensif dilakukan sehingga berdampak terhadap lingkungan di sekitar Teluk Kendari (Tridipta, 2012). Ramainya arus lalu lintas kapal kontainer yang berukuran besar juga membawa permasalahan pada kualitas air teluk yang semakin tercemar oleh sisa-sisa bahan bakar kapal. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada produksi ikan nelayan yang semakin menurun (Zulham *et al.,* 2017).

Pengunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan juga masih cukup banyak ditemui di Teluk Kendari. Walaupun dirasakan jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, namun pengguna bom dan racun untuk menangkap ikan masih dilakukan oleh oknum nelayan di Teluk Kendari. Pengrusakan batu karang atau terumbu karang juga masih ditemui guna menangkap ikan-ikan hias karang yang dijadikan komoditi ikan hias. Pengambilan batu karang masih dijumpai untuk kemudian dibakar dan dijadikan bahan baku pembuatan cat, keperluan tambang, tambak dan lain sebagainya. Akibat dari penambangan karang ini telah menyebabkan abrasi pantai, karena karang sebagai penahan ombak telah rusak sehingga menyebabkan gelombang langsung menggerus pantai sedangkan pasir laut yang ditambang telah mencemari wilayah terumbu karang sekitarnya.

Pemerintah daerah Kota Kendari melalui peraturan Daerah Kota Kendari nomor 5 tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Kendari Tahun 2011-2031 pada pasal 38, telah mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Kendari. Sanksi yang dikenakan juga telah diatur pada pasal 45, yaitu pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda sebesar Rp50.000.000.- (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari, 2013). Larangan terhadap aktivitas pengrusakan lingkungan menurut pemerintah daerah sudah pernah dilakukan namun beberapa masyarakat tetap nekad melakukannya dengan dalih tidak memiliki alternatif pekerjaan lainnya. Penegakan hukum dirasa perlu dilakukan untuk mencegah meluasnya praktek-praktek pengrusakan lingkungan laut ini. Selain itu pemerintah beserta stakeholders terkait perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar untuk merubah *mind set* dan perilaku nelayan yang merugikan.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan tangkap perbulan di kedua lokasi penelitian yaitu sebesar Rp2.307.863. Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan tangkap di Kelurahan Purirano lebih tinggi (Rp3.094.803) dibandingkan dengan rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan tangkap di Kelurahan Bungkutoko (Rp1.981.209). Pendapatan dari usaha perikanan tangkap di kedua lokasi dirasakan sudah tidak menjanjikan lagi sebagai satu-satunya sumber pendapatan rumah tangga karena mulai tergantung pada kegiatan lain seperti berburuh dan berdagang. Pergeseran struktur pendapatan ini terjadi karena potensi ikan di Teluk Kendari sangat berkurang, sementara effortnya meningkat.

Nelayan tangkap di kedua lokasi tergolong sebagai nelayan kecil yaitu nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan perahu tanpa motor maupun perahu motor tempel. Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan nelayan kecil ini, pemerintah daerah perlu memperluas cakupan bantuan modal berupa armada dan alat tangkap produksi yang dilakukan dengan skema kelompok. Diversifikasi jenis usaha rumah tangga nelayan juga perlu dikembangkan, sehingga di musim-musim paceklik nelayan tangkap masih memiliki sumber pendapatan. Mekanisme yang mempertimbangkan kepentingan nelayan kecil/ tradisional dalam TPI perlu diperhatikan sehingga hasil-hasil tangkapan mereka dapat ditampung dengan harga yang adil. Untuk isu degradasi lingkungan, komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dapat dilakukan melalui sosialisasi bahaya pengunaan bahan-bahan peledak dan racun bagi kelestarian biota laut, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah meluasnya praktek-praktek pengrusakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui skema pendanaan kegiatan penelitian Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait (COREMAP-CTI). Ucapan terima kasih juga kepada para mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Haluoleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai enumerator survei dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antaranews. com. (2017). Kawasan Mangrove di Kendari Semakin Menyusut. https://www.antaranews.com/berita/641845/kawasan-mangrove-di-kendari-semakin-menyusut.

Assad, I. (2019). *Analisis Peran Cuaca dan Iklim Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Pesisir Utara Jawa (Pantura) Di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara*. Skripsi. Program Studi Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Azizi, E.I.K. Putri dan A. Fahrudin. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pendapatan Nelayan Akibat Variabilitas Iklim. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol 12(No 2), 225-233.

Bachtiar, H. dan Novico, F. (2012). *Analisis Spasial Potensi Bahaya Daerah Pantai terhadap Perubahan Iklim*. Kolokium Hasil penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, hal 1-14.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari. (2013). *Laporan Tahunan Dinas Kelautan Perikanan Kota Kendari.* Kendari.

Fajriah. (2015). Laporan Penelitian Hibah Desentralisasi Dosen Pemula Kemenristek Dikti. *Analisis Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Kota Kendari*. Kendari. Universitas Muhammadiyah Kendari.

Fadillah. (2011). *Analisis Daya Saing Komoditas Unggulan sektor Perikanan Provinsi Jawa Timur.* Tesis. Bogor. IPB.

Harahap, A. S. (2003). *Analisis Masalah Kemiskinan dan Tingkat Pendapatan Nelayan Tradisional di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuan Kota Medan*. Tesis. Universitas Sumatera Utara (tidak dipublikasikan).

Humaedi, A.M. (2012). Kemiskinan Nelayan: Studi Kasus Penyebab Eksternal dan Upaya Revitalisasi Tradisi Pengentasannya di Kaliori, Rembang, Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Ekonomi Kelautan dan Perikanan,* Vol 7(No 2), 193-206.

Imron, M. (2011). Nelayan dan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. 13 (Edisi Khusus), 57-82.

Khalfianur, W., Niati, R., dan Harahap, A. (2017). Pengaruh Gelombang Laut Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Di Kuala Langsa. *Jurnal Samudra akuatika* Vol1 (2): 21-25.

Kusnadi. (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta, ID: LKiS Pelangi Aksara.

Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir.* Yogyakarta, ID: Ar-Ruzz Media.

Nasution, M.A., Badaruddin dan Subhilhar. (2005). *Isu-Isu Kelautan dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*. Yogyakarta, ID: Pustaka Pelajar.

Purnomo, A.H., S.H. Suryawati, I.M. Radjawane dan K.O. Sembiring. (2015). *Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir: Konsep dan Aplikasi Strategi Adaptasi*. Bandung, ID: Penerbit ITB.

Peraturan Daerah (PERDA) (2013). *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kota Kendari* . Kota Kendari.

Rahim, A. (2012). Komparatif Pendapatan Per-Trip Musim Penangkapan Nelayan Tangkap Tradisional Perahu Motor Tempel dan Perahu Tanpa Motor. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pertanian*, Vol 2(No 1), 121-131.

Rahim, A. dan Hastuti. D.R.D. (2016). Determinan Pendapatan Nelayan Tangkap Tradisional Wilayah Pesisir Barat Kabupaten Barru. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol 11(no 1), 75-88.

Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum). *Jurnal Perspektif*, Vol 14(no 3), 149-159.

Saptana. (2018). Keunggulan Komparatif dan Kompetitif dan Strategi Kemitraan. https://media.neliti.com/media/publications/44039-ID-keunggulan-komparatif-kompetitif-dan-strategi-kemitraan.pdf.

Sipahelut, M. (2010). *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Syahma, A. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap Di Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.* Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar Makassar.

Subhan dan Afu (2017). Pengaruh Laju Sedimentasi Terhadap Rekrutmen Karang Di Teluk Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Manusia & Lingkungan*, 2017, 24(2):73-80.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, ID: Alfabeta.

Tain, A. (2011). Penyebab Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan di Wilayah Tangkap Lebih, Jawa Timur. *Jurnal Humanity*, Vol 7 (No1), 01-10

Tridipta, A., (2012). Dampak Pembangunan Di Kawasan Pesisir Teluk Kendari Studi Kasus Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tesis. Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada.

Zulham, A., Subaryono dan Mahulette, (2017). *Pengembangan Perikanan Tangkap Laut Kota Kendari*. Depok, ID: Rajawali Press.

(Indeks Pengarang)
(Author Index)

Alisjahbana, Armida S. ..... 37 - 44
Andoyo, Robi ..... 37 - 44
Anna, Zuzy ..... 37 - 44
Hidayat, Alfian ..... 45 - 55
Istiqomah, Titis ..... 1 - 10
Kurniasari, Nendah ..... 57 - 67
Muhartono, Rizky ..... 57 - 67
Priyatna, Fatriyandi N. ..... 57 - 67
Pudjihardjo, M. ..... 1 - 10
Ramadhan, Andrian ..... 11 - 21
Rosidah, Rahmahwati ..... 37 - 44
Safitri, Purnami ..... 45 - 55
Salim, Wilmar A. ..... 11 - 21
Sumarno ..... 1 - 10
Susilowati, Indah ..... 23 - 35
Triyanti, Riesti ..... 23 - 35
Vibriyanti, Deshinta ..... 69 - 78
Yanuwiadi, Bagyo ..... 1 - 10
Yuliaty, Christina ..... 57 - 67

(Indeks Subjek)
(Subject Index)

Daya Saing ..... 45 - 55
Ekosistem Laut ..... 11 - 21
Faktor Sosial Ekonomi ..... 69 - 78
GMP ..... 37 - 44
Gunungkidul ..... 23 - 35
Keberlanjutan ..... 11 - 21
Kebijakan Relokasi Kapal Ijin Pusat ..... 57 - 67
Kepulauan Aru ..... 57 - 67
Kesejahteraan Subjektif ..... 37 - 44
Kolaboratif ..... 11 - 21
Kota Kendari ..... 69 - 78
Marine Spasial Planning (MSP) ..... 11 - 21
Model Hexagon ..... 45 - 55
Nelayan Lokal ..... 57 - 67
Non - GMP ..... 37 - 44
Olahan dan Pemasaran ..... 1 - 10
Pemangku Kepentingan ..... 23 - 35
Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) ..... 45 - 55
Pendapatan Nelayan ..... 69 - 78
Pengelolaan Pesisir Berkelanjutan ..... 23 - 35
Perempuan Pesisir ..... 37 - 44
Potensi Keberlanjutan ..... 1 - 10
Problematika ..... 11 - 21
Produk Perikanan ..... 1 - 10
Rumah Tangga Nelayan Tangkap ..... 69 - 78
Rumput Laut NTB ..... 45 - 55
Sektor Perikanan ..... 1 - 10
Usaha Perikanan ..... 1 - 10

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEDOMAN BAGI PENULIS

Misi publikasi ini adalah membahas isu aktual kebijakan kelautan dan perikanan dalam bentuk gagasan, dialog maupun polemik. Sesuai dengan misi tersebut, maka naskah harus mengandung pembahasan tentang isu analisis kebijakan kelautan dan perikanan yang aktual.

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan jurnal ilmiah yang berisi naskah hasil riset, review, analisis, yang difokuskan untuk formulasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang cakupannya meliputi: Dinamika Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Sistem Usaha, Pemasaran dan Perdagangan, Sosial dan Kelembagaan, Hukum dan Politik.

Naskah yang diterima yaitu karya tulis yang merupakan karya asli dan belum pernah diterbitkan Dipublikasi lainnya.

UMUM

Kertas	:	HVS A4 (21,0 cm x 29,7 cm)
Margin	:	Kiri 3 cm
		Bawah, Kanan dan Atas 2 cm
Huruf	:	Arial, 11 pt, hitam, 1,5 spasi, ketik dalam Bahasa Indonesia (kecuali abstrak) atau Bahasa Inggris yang baik dan benar, tidak diperkenankan menggunakan singkatan yang tidak umum.
Struktur	:	Judul, Abstrak, Pendahuluan, Pokok Pembahasan, Sintesa, Penutup, Ucapan Terima Kasih dan Daftar Pustaka.

Naskah dikirim secara *Online* di alamat web **http://ejournal-balitbang.kkp.go.id index.php/jkse**.

Alamat Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Gedung BRSDM KP I, Komplek Bina Samudera, Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta 14430, telp (021) 64700924, fax (021) 64711583, *Email*: **kebijakan.sosek @gmail.com.**

Judul

Judul harus ditulis secara ringkas (maksimal 15 kata), tetapi cukup informatif untuk menggambarkan isi tulisan. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan di bawahnya dalam Bahasa Inggris, menggunakan huruf Arial, kapital Bold, 12 pt, center.

Penulis dan institusi

Penulis dan Institusinya ditulis berurutan di bawah judul. Nama penulis ditulis dengan huruf Arial, kapital bold, 10 pt, center. Institusi asal (alamat, nomor telepon, nomor faksimil, serta e-mail) ditulis dengan huruf Arial, kapital dan kecil, 10 pt, center.

Abstrak

Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata dan hanya satu paragraf. Spasi antar baris kalimat 1.0. Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, lokasi dan waktu penelitian, tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta kesimpulan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt.

Kata Kunci

Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, terdiri dari 4 sampai 6 kata tulis di bawah abstrak. Pada kata kunci diberikan font bold arial 10 pt. Isi kata kunci tidak di bold, dan pada akhir kata kunci tidak diberi tanda titik (.). Pemisah setiap kata kunci menggunakan titik koma (;) sesuai dengan templete jurnal.

Pendahuluan

Pendahuluan sebaiknya dimulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian, arti penting penelitian, pernyataan masalah, waktu dan lokasi penelitian, metodologi yang digunakan, dan tujuan penelitian.

Pokok Pembahasan 1 s.d n

Pokok bahasan n (minimal terdapat 2 pokok bahasan). Membahas singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang resmi. Pada dasarnya pokok pembahasan membahas permasalahan dengan pemecahan masalah yang dikaji yang dapat dibantu dengan faktor pendukung dan penghambat.

Sintesa Pokok Pembahasan 1 s.d n

Sintesa diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok pembahasan serta kemampuan mengartikulasikan temuan. Sintesa yang menjawab pada setiap pokok pembahasan,

ditulis secara singkat dan jelas dalam beberapa kalimat pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Jika belum, jelaskan apa penyebabnya. Jumlah sintesa sesuai jumlah pokok pembahasan yang telah dibahas sebelumnya.

Penutup

Bagian penutup laporan penelitian merupakan bagian untuk mengakhiri laporan penelitian. Berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, penegasan kembali hal-hal yang telah diuraikan/dijabarkan pada bagian pokok pembahasan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan Terima Kasih ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu berlebihan.

Daftar Pustaka

Referensi hendaknya dari sumber yang jelas dan terpercaya. Setiap referensi yang tercantum dalam daftar pustaka harus dikutip (disitir) pada naskah dan sebaliknya setiap kutipan harus tercantum dalam daftar pustaka. Acuan penulisan sitasi menggunakan *APA citations style (American Psychological Association) – 6th edition*. APA merupakan “sistem penulis – Tahun”. APA memiliki beberapa edisi penulisan sitasi manual, yang tujuannya adalah untuk membantu penulis dalam persiapan naskah.

Sitasi pada teks

Penulis Tunggal. Menurut Zamroni (2018) beberapa aksi kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diambil untuk meningkatkan diversifikasi rumput laut untuk produk bernilai tambah. **Atau,** beberapa aksi kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diambil untuk meningkatkan diversifikasi rumput laut untuk produk bernilai tambah (Zamroni, 2018).

2 (dua) Penulis. Dalam Zamroni dan Istiana (2017) konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang. **Atau,** konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang (Zamroni & Istiana, 2017).

Tiga, empat, atau lima penulis. Cantumkan setiap penulis untuk pertama kali sitasi pada teks dirtuliskan. Setelah itu, kutip hanya nama belakang yang pertama penulis diikuti oleh "*et al. atau et al.,*"

Contoh:

Penulisan sitasi pertama. Koeshendrajana, Mira, Anna, Nugroho, Muawanah, & Dewitasari (2018) Menemukan bahwa…

Penulisan kedua. Koeshendrajana *et al.* (2018) atau Koeshendrajana *et al.,* 2018.

Enam atau lebih penulis. Sitasi hanya pada nama terakhir penulis pertama, kemudian di ikuti dengan "*et al.* atau *et al.,*"

Mohon sumber berupa Undang-undang, Peraturan pemerintah, Surat Keputusan dan sebagainya agar dimasukan kedalam daftar pustaka.

Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain. Proporsi daftar pustaka yang diacu yaitu 80% merupakan rujukan primer dan merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Tuliskan hanya pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada majalah, koran, atau media lainnya yang non-ilmiah. Minimal daftar pustaka 25. Disusun berdasarkan abjad.

Contoh Penulisan Buku:

Nama Belakang Penulis, Inisial Pertama. (Tahun Publikasi). *Judul*. Kota, Singkatan Negara: Penerbit.

Zulham, A., Subaryono & Mahulette, R.T. (2017). Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Ternate dan Sekitarnya. *Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan*. Jakarta, ID: PT Rajagrafindo Persada.

Contoh Buku Elektronik (e-book):

Carruthers, W. (Ed.) (2014). *Histories of Egyptology: Interdisciplinary measures*. Retrieved from https://www.taylorfrancis.com

Contoh e-jurnal Ilmiah dengan doi:

Hafsaridewi, R., Khairuddin, B., Ninef, J., Rahadiati, A. & Adimu, H.E. (2018). Pendekatan sistem sosial – ekologi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikan*, Vol 4(2), 61-74. doi: 10.15578/marina.v4i2.7389.

Contoh e-jurnal Ilmiah tanpa doi:

Cohen, A., Medlow, S., Kelk, N., & Hickie, I. (2019). Young people's experiences of mental health care: Implicatons for the headspace NationalYouth Mental Health Foundation. *Youth Studies Australia*, *28*(1), 13-20. Retrieved from http://www.acys.info/journal.

Artikel dari situs internet;

World Wide Fund. (2019). *WWF Kembangkan Upaya Mitigasi Tangkapan Sampingan Penyu di Ujung Tenggara Pulau Sulawesi.* Retrieved from https://www.wwf.or.id/?72583/WWF-Kembangkan-Upaya-Mitigasi-Tangkapan-Sampingan-Penyu-di-Ujung-Tenggara-Pulau-Sulawesi.

Contoh Laporan di website:

Tang, Y., & Choo, X. (2009). *Intrinsic divergence for face recognition*. (CTN Technical Report 20090204-001). Centre for Theoretical Neuroscience: Retrieved from http://compneuro.uwaterloo.ca/cnrglab.

Contoh hasil membuat sitasi dan daftar pustaka (bibliografi) mengunakan aplikasi:

(Muliawan & Firdaus, 2018)

Muliawan, I., & Firdaus, M. (2018). Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang di Taman Wisata Peraiaran Kapoposang, Sulawesi Selatan Economic Value Of Coral Reef Ecosystem In The Kapoposang Marine Park Conservation , South Sulawesi. *Jurmal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *Vol 13*(No 1), 133–142.

Tabel

Judul tabel (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di atas tabel. Tabel ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan tidak dalam bentuk JPEG. Sumber dicantumkan di bawah tabel.

Contoh:

Tabel 1. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.
Table 1. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke.

Kategori Nilai Ekonomi/ *Category Economic Value*	**Total Nilai/ *Total value* (Rp/Tahun)**	**Total Nilai/ *Total value* (Rp/Ha/Tahun)**
Nilai Guna Langsung/*direct value*	121,120,873,947	11,964,919
Nilai Guna Tidak Langsung/*Indirect Value*	48,361,817,303,4	4,777,419
Nilai Pewarisan/*Value Inheritance*	2,728,107,120	269,496
Total/ *Total*	177,419,407,910	17,528,367

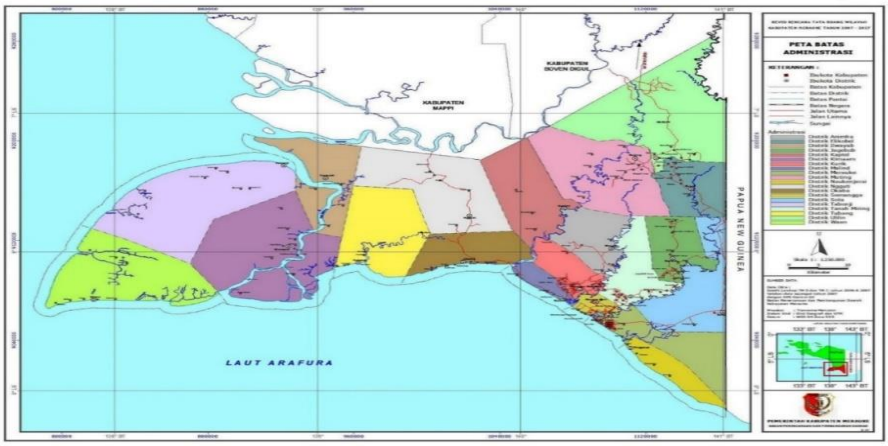

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Data
Figure 1. Location Data Collection
Sumber: www.merauke.go.id/*Source: www.merauke.go.id*

Catatan Gambar.1: Peta pada gambar harus memiliki keterangan administrative dan bujur koordinator.

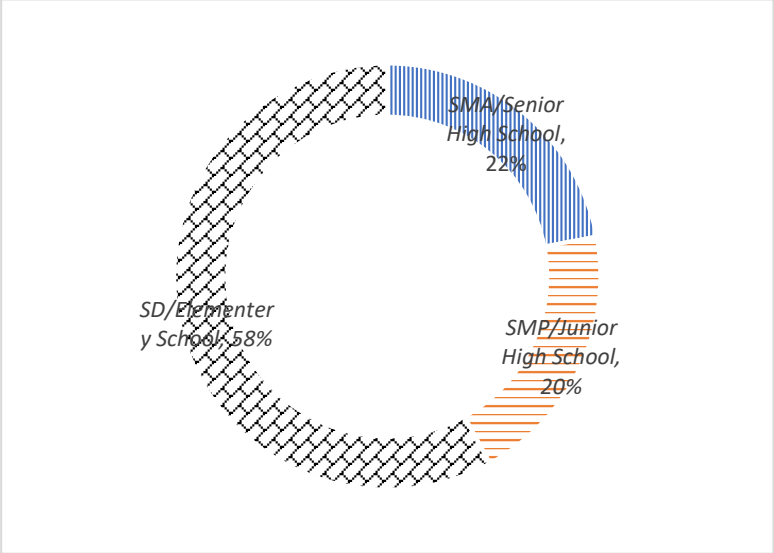

Gambar 2. Tingkat Pendidikan Responden
Figure 2. Education Level of Respondents
Sumber: Data Sekunder Widiastuti et al. (2018)/*Widiastuti secondary data et al. (2018)*

Catatan Gambar.2: Grafik pada gambar harus jelas, diberikan arsir berwarna agar dapat dipahami dengan baik.

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Gedung BRSDM KP LT. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : www.bbrse.kkp.go.id
www.bbrse.net
email : pt.sosek@gmail.com

ISSN **2089-6980**